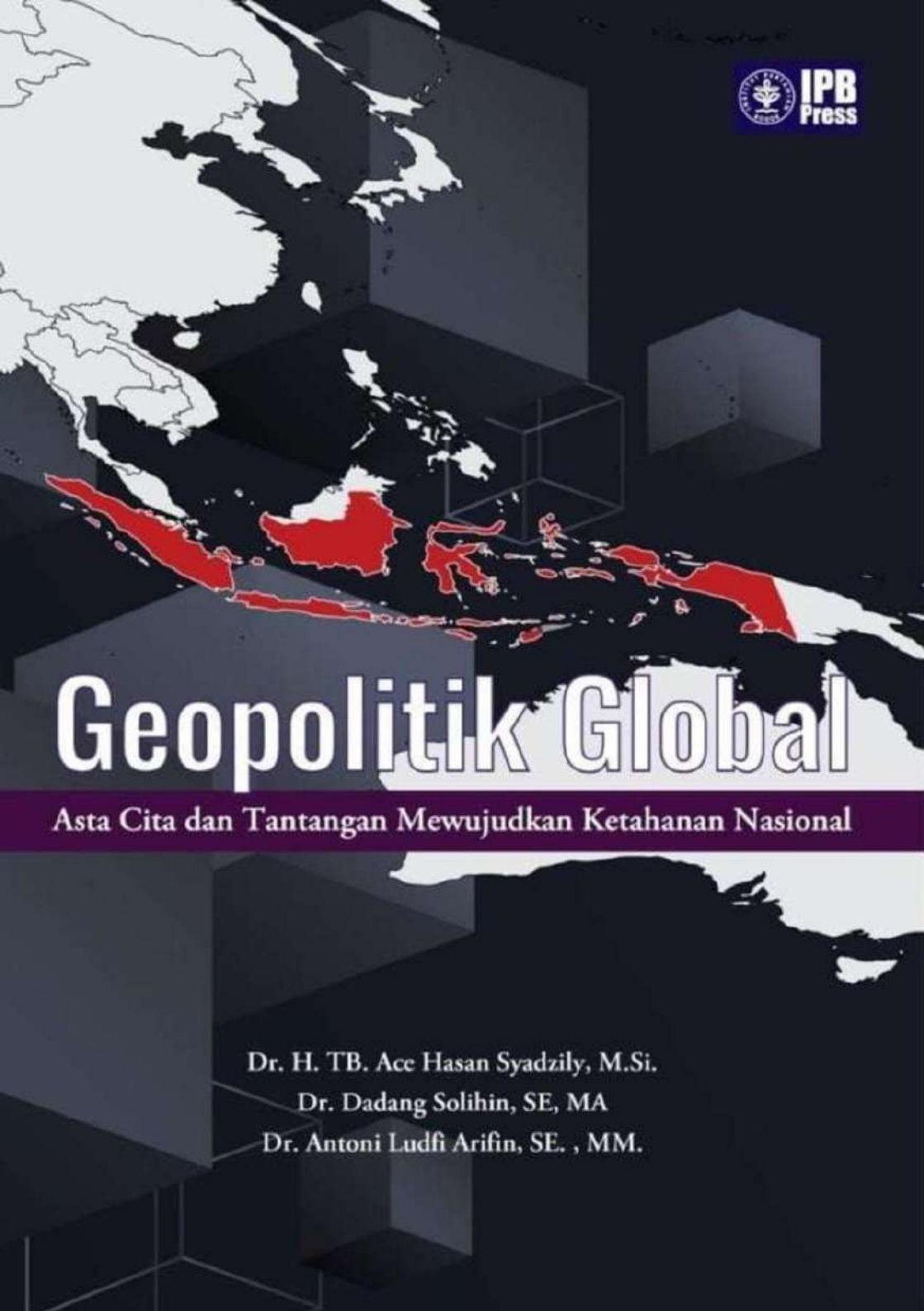

Geopolitik Global

Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional

Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Antoni Ludfi Arifin, SE. , MM.

IPB Press

TANHANA DHARMMA MANGRVA

Geopolitik Global

Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
LEMHANNAS

Geopolitik Global

Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional

Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A.
Dr. Antoni Ludfi Arifin, S.E., M.M.

Penerbit IPB Press
Jalan Taman Kencana No. 3,
Kota Bogor - Indonesia

C.01/05.2025

Judul Buku:
Geopolitik Global: Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional

Penulis:
Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.
Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A.
Dr. Antoni Ludfi Arifin, SE., M.M.

Penyunting Bahasa:
Ina Meinarini Herdiyanti

Desain Sampul & Penata Isi:
Alfyandi

Jumlah Halaman:
148 + 12 halaman romawi

Edisi/Cetakan:
Cetakan 1, April 2025

Dicetak dan Diterbitkan oleh
PT Penerbit IPB Press
Anggota IKAPI
Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp. 0251-8355 158 E-mail: ipbpress@apps.ipb.ac.id
www.ipbpress.com

ISBN:

© 2025, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul *"Geopolitik Global: Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional"* ini dapat disusun dan disajikan kepada khalayak, khususnya para pemangku kepentingan strategis bangsa.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), sebagai institusi strategis yang didirikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965, memiliki mandat untuk menyiapkan kader-kader pemimpin nasional yang memiliki kemampuan berpikir strategis dan berwawasan kebangsaan. Dalam konteks dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, peran Lemhannas RI menjadi semakin penting, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan, tetapi juga sebagai pusat pengkajian strategis dan pelestarian nilai-nilai kebangsaan.

Buku ini hadir sebagai refleksi atas pentingnya pemahaman mendalam mengenai geopolitik global dan bagaimana Asta Gatra, sebagai instrumen analisis ketahanan nasional, dapat digunakan untuk menavigasi berbagai tantangan dan peluang dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Kita berada di tengah pusaran transisi global–dari unipolar ke multipolar, dari konflik bersenjata ke perang teknologi, dari kerawanan ekonomi ke disrupsi sosial budaya. Semua ini menuntut kepemimpinan nasional yang tangguh, visioner, dan berpijak pada nilai-nilai dasar kebangsaan.

Perlu disampaikan bahwa kandungan buku ini pernah diberikan sebagai Materi Pembekalan Gubernur Lemhannas RI pada kegiatan Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang pada tanggal 22 Februari 2025.

Dalam forum tersebut, materi ini mendapat perhatian besar sebagai bagian dari upaya membangun kesamaan pandang strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan geopolitik global.

Melalui buku ini, Lemhannas RI ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpikir lebih luas dan strategis. Para pemimpin daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan generasi muda diharapkan mampu membumikan wawasan kebangsaan dalam konteks global, serta menjadikan ketahanan nasional sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi, pemikiran, dan panduan dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaulat.

Jakarta, 20 Mei 2025

Penulis

Daftar Isi

Daftar Isi vii

Pendahuluan ix

Bab 1 Lemhannas RI dalam Lintasan Sejarah Geopolitik Bangsa 1

Bab 2 Posisi Strategis Indonesia dan Modal Dasar Ketahanan Nasional 15

Bab 3 Konsep Ketahanan Nasional dalam Perspektif Asta Gatra 33

Bab 4 Lanskap Geopolitik Global Kontemporer 43

Bab 5 Ancaman dan Risiko Global terhadap Ketahanan Nasional 61

Bab 6 Asta Cita—Jalan menuju Ketahanan Nasional yang Tangguh 83

Bab 7 Peran Kepala Daerah sebagai Pilar Ketahanan Nasional . . . 103

Bab 8 Menuju Indonesia Emas 2045: Refleksi dan Proyeksi 117

Penutup 129

Daftar Pustaka 141

Tentang Penulis 143

Pendahuluan

Di tengah gelombang dinamika global yang terus bergulir dengan cepat, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang menuntut kesiapsiagaan, ketangguhan, dan keteguhan arah pembangunan nasional. Ketahanan nasional bukanlah konsep abstrak semata, melainkan pijakan strategis yang sangat nyata bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kejayaan bangsa di tengah tatanan dunia yang makin kompleks. Dalam konteks inilah, buku *"Geopolitik Global: Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional"* hadir untuk memperkaya wawasan strategis dan memperkuat kesadaran geopolitik seluruh komponen bangsa, terutama para pemimpin di berbagai level pemerintahan dan masyarakat.

Sejak kelahirannya pada 20 Mei 1965, Lemhannas RI telah menjadi simbol dan motor utama pengembangan kepemimpinan nasional yang berwawasan kebangsaan dan geopolitik. Pendiriannya oleh Presiden Soekarno bukan semata sebagai institusi pendidikan dan kajian, melainkan manifestasi dari gagasan besar tentang perlunya membentuk pemimpin-pemimpin bangsa yang mampu berpikir strategis, memiliki daya tahan moral, serta mampu membaca arah angin global untuk menentukan posisi Indonesia dengan penuh martabat dan kepercayaan diri.

Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya mendalam untuk menautkan benang merah antara sejarah, potensi strategis bangsa, konsepsi ketahanan nasional, dan realitas global yang terus berubah. Dalam Bab 1, pembaca diajak untuk menelusuri jejak historis pendirian Lemhannas RI sebagai respon atas kebutuhan strategis membangun bangsa yang kokoh di tengah konstelasi dunia. Visi Soekarno tentang "*nation and character building*" serta pentingnya memiliki pemimpin-pemimpin yang berpikir dalam kerangka geopolitik global menjadi fondasi penting yang terus relevan hingga hari ini.

Bab 2 mengajak kita memahami Indonesia bukan hanya sebagai entitas administratif, melainkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan posisi geografis strategis. Kekayaan ini adalah kekuatan, namun sekaligus menjadi sumber tantangan dalam bentuk kerentanan terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan potensi konflik sumber daya. Ketahanan nasional dalam konteks ini membutuhkan tata kelola yang bijak dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat pemahaman konseptual, Bab 3 menghadirkan pembahasan mendalam mengenai Asta Gatra—kerangka strategis yang memadukan gatra alam (geografi, demografi, dan sumber daya alam) dan gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan). Di sinilah ketahanan nasional dipahami secara menyeluruh, sebagai sistem yang saling terhubung dan saling memengaruhi dalam menjawab berbagai tekanan dari dalam dan luar negeri.

Bab 4 dan Bab 5 menjadi refleksi tentang lanskap global kontemporer yang sangat dinamis. Rivalitas antara kekuatan besar dunia, konflik regional, munculnya kekuatan baru seperti BRICS, serta fenomena regionalisme baru di Indo-Pasifik seperti AUKUS dan ketegangan di Laut China Selatan menunjukkan bahwa geopolitik hari ini jauh dari stabil. Indonesia, sebagai negara yang berdaulat dan berada di posisi strategis, tidak bisa bersikap pasif. Ancaman terhadap ketahanan nasional tidak lagi hanya berbentuk invasi militer, melainkan menjelma dalam bentuk kejahatan siber, krisis ekonomi global, ekstremisme ideologis, dan bahkan tekanan budaya global yang mengancam nilai-nilai keindonesiaan.

Namun, di tengah tantangan yang semakin kompleks tersebut, Indonesia memiliki arah dan cita-cita yang jelas. Bab 6 menguraikan Asta Cita sebagai delapan prioritas strategis nasional yang merupakan jawaban terhadap tantangan ketahanan nasional. Dari pembangunan SDM unggul, hilirisasi industri, hingga tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas, Asta Cita adalah cerminan dari visi besar untuk menjadikan Indonesia tangguh dari pusat hingga daerah.

Peran daerah dalam kerangka ketahanan nasional inilah yang menjadi fokus Bab 7. Kepala Daerah bukan hanya administrator, melainkan aktor kunci dalam menjaga stabilitas, memastikan pemerataan pembangunan, dan menguatkan kesadaran kebangsaan. Kesadaran geopolitik di tingkat daerah menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan dinamika lokal, yang pada akhirnya membentuk ketahanan nasional yang menyeluruh.

Sebagai penutup dari perjalanan naratif buku ini, Bab 8 mengajak pembaca untuk menatap masa depan: Indonesia Emas 2045. Impian menjadi kekuatan ekonomi Top 10 dunia bukanlah utopia, melainkan target realistis yang membutuhkan perencanaan matang, investasi berkelanjutan dalam kualitas manusia, serta kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif. Tantangan middle income trap, disrupsi teknologi, dan dinamika populasi harus dijawab dengan pendekatan yang inovatif dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.

Buku ini bukan sekadar rangkaian teori dan analisis, melainkan ajakan reflektif dan strategis untuk berpikir dan bertindak dalam kerangka ketahanan nasional yang holistik. Ia merangkul warisan pemikiran pendiri bangsa, sekaligus membuka ruang bagi inovasi kepemimpinan nasional di era disrupsi. Dalam setiap bab, pembaca akan menemukan kesadaran bahwa mempertahankan dan membangun Indonesia adalah tanggung jawab kolektif—bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga seluruh warga negara yang cinta tanah air.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Indonesia harus berani berpikir besar. Karena seperti yang disampaikan dalam epilog buku ini: *"Berpikirlah besar, karena kita adalah bangsa besar."* Maka, saatnya kita berhenti menjadi penonton dari arus global, dan mulai menempatkan Indonesia sebagai subjek aktif yang mampu menentukan arah perjalanannya sendiri—berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

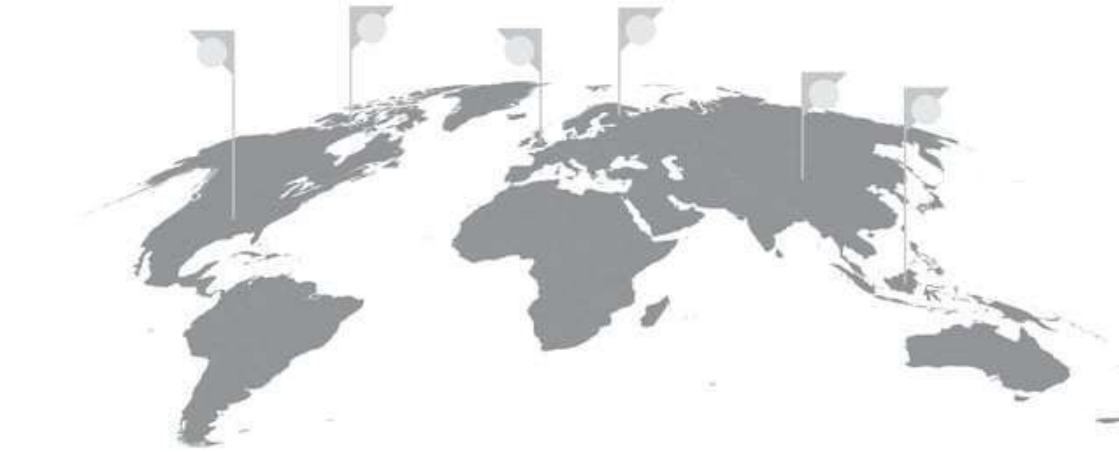

Bab 1 Lemhannas RI dalam Lintasan Sejarah Geopolitik Bangsa

Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sarat dinamika geopolitik, berdirinya Lemhannas RI pada tanggal 20 Mei 1965 merupakan tonggak penting yang tidak dapat dilepaskan dari visi besar Presiden Soekarno. Gagasan pembentukan lembaga ini dilandasi oleh kesadaran mendalam akan pentingnya ketahanan nasional sebagai fondasi utama dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan negara. Dalam konteks tersebut, Lemhannas RI didirikan sebagai pusat pendidikan dan pengkajian strategis untuk membentuk kader-kader pemimpin nasional yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas kebangsaan dan pandangan strategis terhadap masa depan bangsa.

Lemhannas RI lahir pada masa ketika Indonesia sedang menghadapi tantangan berat, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketegangan ideologi pada era Perang Dingin, gejolak politik domestik, serta persoalan ekonomi dan sosial yang kompleks menuntut kepemimpinan nasional yang kuat,

visioner, dan mampu menjawab tantangan zaman. Presiden Soekarno menyadari bahwa untuk menghadapi tekanan geopolitik global, Indonesia memerlukan pemimpin-pemimpin yang memahami peta kekuatan dunia, mampu menganalisis dinamika regional dan global, serta sanggup mengartikulasikan kepentingan nasional dalam forum internasional.

Sebagai lembaga strategis negara, Lemhannas RI mengemban peran ganda: pertama, sebagai lembaga pendidikan bagi calon-calon pemimpin nasional dari berbagai latar belakang—baik sipil, militer, birokrasi, akademisi, maupun tokoh masyarakat; dan kedua, sebagai think tank nasional yang merumuskan berbagai kajian strategis untuk mendukung kebijakan negara dalam bidang ketahanan nasional. Dalam perjalanannya, Lemhannas RI terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman, termasuk tantangan globalisasi, perubahan iklim, disrupsi teknologi, serta transformasi sosial-politik baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kesadaran geopolitik menjadi landasan utama dalam setiap program pendidikan dan pengkajian di Lemhannas RI. Konsep Asta Gatra—yang terdiri dari tiga gatra alamiah (geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam) dan lima gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan)—digunakan sebagai alat analisis ketahanan nasional yang holistik. Melalui pendekatan ini, Lemhannas RI mendorong peserta pendidikannya untuk memahami keterkaitan antara berbagai elemen kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pentingnya sinergi antaraktor dalam menjaga stabilitas dan kemajuan nasional.

Dalam menghadapi era ketidakpastian global saat ini—yang ditandai oleh pergeseran kekuatan dunia dari unipolar ke multipolar, meningkatnya konflik berbasis teknologi, dan tekanan terhadap nilai-nilai kemanusiaan—peran Lemhannas RI semakin strategis. Lembaga ini tidak hanya menjadi benteng pertahanan ideologis, tetapi juga menjadi mercusuar pemikiran strategis bangsa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah, mandat, dan kontribusi Lemhannas RI merupakan langkah penting dalam membangun

kesadaran kolektif bangsa akan pentingnya kepemimpinan nasional yang berwawasan kebangsaan dan berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila serta semangat kebhinekaan.

Konteks Sejarah dan Geopolitik Masa Awal

Latar belakang berdirinya Lemhannas RI tidak dapat dipisahkan dari dinamika sejarah dan geopolitik yang melingkupi Indonesia pada era 1960-an. Saat itu, dunia berada dalam cengkeraman Perang Dingin—konflik ideologi yang membelah dunia menjadi dua blok besar: blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan paham liberal-kapitalis, dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet dengan paham sosialis-komunis. Ketegangan global ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menjadi ajang perebutan pengaruh antara dua kekuatan besar tersebut.

Di tingkat nasional, Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan multidimensi. Politik dalam negeri tengah berada pada titik kritis, ditandai oleh ketegangan yang kian meningkat antara kekuatan militer, partai-partai politik, serta kelompok ideologis yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh dalam pemerintahan. Di sisi lain, Presiden Soekarno tengah mengusung konsep Demokrasi Terpimpin sebagai upaya untuk menstabilkan sistem politik dan memperkuat kepemimpinan nasional. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan pro dan kontra yang menambah kompleksitas politik dalam negeri.

Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam konfrontasi terbuka dengan Malaysia, yang dikenal dengan istilah Konfrontasi (1963–1966), sebagai bagian dari penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neo-kolonialis oleh Presiden Soekarno. Konflik ini menguras sumber daya nasional dan memperbesar tekanan internasional terhadap Indonesia.

Sementara itu, pembangunan nasional yang baru dirintis sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 berjalan di bawah banyak keterbatasan, baik dari segi sumber daya, infrastruktur, maupun kapabilitas institusi negara.

Melihat situasi tersebut, Presiden Soekarno menyadari bahwa Indonesia memerlukan pemimpin-pemimpin nasional yang tidak hanya mampu menghadapi kompleksitas masalah dalam negeri, tetapi juga memiliki kecakapan untuk membaca peta kekuatan global, memahami tekanan geopolitik, dan membela kepentingan nasional di tengah pertarungan ideologi dunia. Dari sinilah muncul gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan strategis tingkat tinggi yang bisa mengintegrasikan pendidikan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan analisis strategis dalam satu kerangka besar: Lemhannas RI.

Lemhannas RI dirancang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan bagi kalangan militer, tetapi juga sebagai tempat bertemunya berbagai unsur masyarakat strategis, termasuk birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, dan pimpinan sipil. Hal ini mencerminkan pendekatan inklusif dalam membentuk kepemimpinan nasional yang beragam, berwawasan kebangsaan, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika lokal, regional, dan global.

Dengan berdirinya Lemhannas RI pada 20 Mei 1965, Indonesia mengambil langkah besar dalam memperkuat fondasi ketahanan nasional melalui investasi pada sumber daya manusia strategis. Dalam konteks geopolitik masa awal tersebut, Lemhannas RI hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan mendesak bangsa akan kaderisasi pemimpin yang tangguh, visioner, dan mampu membawa Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia.

Visi Geopolitik Presiden Soekarno

Presiden Soekarno adalah tokoh visioner yang memiliki pandangan geopolitik tajam dan jauh melampaui zamannya. Bagi Soekarno, Indonesia bukan hanya sebuah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, melainkan sebuah entitas strategis yang memiliki posisi kunci dalam percaturan dunia. Ia memandang bahwa letak geografis Indonesia—di antara dua benua dan dua samudra—bukanlah sekadar posisi fisik, tetapi merupakan kekuatan geopolitik yang harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kedaulatan nasional dan memainkan peran aktif dalam konstelasi global.

Pandangan geopolitik Soekarno sangat dipengaruhi oleh pengalaman historis Indonesia dalam melawan kolonialisme. Ia menyadari bahwa meskipun penjajahan secara fisik telah berakhir, bentuk-bentuk penjajahan baru yang dikenal sebagai neo-kolonialisme dan imperialisme masih terus mengancam bangsa-bangsa berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, ia menggagas perjuangan melawan segala bentuk dominasi asing, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Pandangan ini bukan hanya diwujudkan dalam kebijakan luar negeri bebas aktif, tetapi juga dalam peran aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, yang menjadi simbol solidaritas negara-negara Selatan dalam menghadapi hegemoni global.

Salah satu warisan penting dari pemikiran geopolitik Soekarno adalah konsep Wawasan Nusantara. Konsep ini menegaskan bahwa Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh secara geografi, politik, ekonomi, dan budaya. Wawasan Nusantara menjadi landasan dalam menyatukan keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis, dan berbagai agama. Dalam kerangka ini, pembangunan

nasional dan pengembangan kepemimpinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek teknokratis semata, melainkan harus berakar pada kesadaran geopolitik tentang pentingnya persatuan, kemandirian, dan ketahanan nasional.

Lebih jauh, Soekarno memandang bahwa kepemimpinan nasional harus dibentuk melalui proses kaderisasi yang menyeluruh dan strategis. Para pemimpin masa depan Indonesia harus mampu memahami dinamika politik global, membaca perubahan zaman, dan menempatkan kepentingan nasional di atas segala hal. Inilah latar belakang utama dari gagasan pendirian Lemhannas RI pada tahun 1965—sebuah lembaga strategis yang bertujuan membentuk pemimpin-pemimpin nasional yang berwawasan kebangsaan, memiliki integritas, serta memahami secara mendalam konteks geopolitik nasional dan internasional.

Dengan demikian, visi geopolitik Soekarno bukanlah sekadar wacana, melainkan menjadi pijakan utama dalam membangun institusi strategis negara dan mengarahkan arah pembangunan nasional. Ia percaya bahwa hanya dengan kesadaran geopolitik yang kuat, Indonesia dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan mampu memainkan peran global yang signifikan. Dalam konteks inilah Lemhannas RI menjadi manifestasi konkret dari visi besar Soekarno dalam membangun ketahanan nasional melalui kepemimpinan yang strategis dan berwawasan global.

Lahirnya Lemhannas RI

Dalam konteks gejolak nasional dan internasional pada dekade 1960-an, pendirian Lemhannas RI oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965 merupakan sebuah langkah strategis yang monumental. Lembaga ini tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak akan kaderisasi kepemimpinan nasional, tetapi juga mencerminkan visi jauh ke depan tentang pentingnya membangun ketahanan nasional melalui pemimpin-pemimpin yang memahami secara mendalam konteks geopolitik dan dinamika kebangsaan.

Pemilihan tanggal 20 Mei sebagai hari pendirian Lemhannas RI bukanlah kebetulan. Tanggal tersebut merupakan Hari Kebangkitan Nasional, yang memperingati berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 sebagai tonggak awal kesadaran kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, pendirian Lemhannas RI secara simbolik mengandung semangat kebangkitan baru—yakni kebangkitan dalam bentuk penguatan kapasitas strategis bangsa melalui pendidikan dan pengembangan kepemimpinan nasional.

Tujuan awal dari pendirian Lemhannas RI dirancang untuk mencakup empat aspek utama yang saling terkait dan strategis:

1. **Mendidik dan menyiapkan kader pemimpin nasional** dari berbagai unsur seperti TNI, birokrasi sipil, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Para calon pemimpin ini dibekali dengan wawasan kebangsaan yang kuat dan integritas moral yang tinggi, agar mampu menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai situasi.
2. **Memberikan pemahaman mendalam tentang geopolitik dan strategi nasional**. Lemhannas RI menjadi tempat untuk menyinergikan pemikiran strategis lintas disiplin dan sektor. Para peserta pendidikan diajak untuk berpikir dalam kerangka besar (*big picture thinking*) mengenai posisi Indonesia dalam sistem global, sekaligus mempertajam kemampuan mereka dalam merumuskan kebijakan strategis yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
3. **Menjadi pusat kajian strategis nasional**. Lemhannas RI tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai *think tank* negara yang menghasilkan berbagai rumusan kebijakan strategis. Kajian-kajian yang dihasilkan bersifat ilmiah, integratif, dan berbasis pada data serta analisis mendalam terhadap permasalahan nasional maupun global.
4. **Membentuk jejaring kepemimpinan nasional**. Melalui pendidikan yang bersifat lintas sektor dan multidisipliner, Lemhannas RI membangun jalinan komunikasi dan koordinasi antar pemimpin dari

berbagai latar belakang. Jejaring ini penting untuk memperkuat kohesi nasional dan sinergi dalam pengambilan kebijakan strategis di tingkat pusat maupun daerah.

Lemhannas RI, sejak awal, dirancang sebagai institusi yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk karakter dan pola pikir pemimpin bangsa. Lembaga ini memainkan peran sentral dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah dinamika dunia yang terus berubah. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Lemhannas RI hadir sebagai benteng intelektual dan moral bagi para pemimpin Indonesia, sesuai dengan cita-cita besar yang diwariskan oleh Presiden Soekarno.

Lemhannas RI sebagai Manifestasi Kepemimpinan Geopolitik

Lemhannas RI hadir bukan hanya sebagai institusi pendidikan tinggi biasa, melainkan sebagai manifestasi konkret dari visi strategis kepemimpinan nasional yang berakar pada pemahaman geopolitik. Lemhannas RI adalah ruang intelektual dan strategis tempat para calon pemimpin bangsa—baik dari unsur sipil, militer, akademisi, hingga tokoh masyarakat—ditempa untuk mengembangkan cara pandang makro terhadap bangsa dan negara. Lembaga ini dibentuk untuk menjawab tantangan zaman, di mana pemimpin tidak cukup hanya cerdas secara teknokratik, tetapi juga harus memiliki kedalaman dalam memahami posisi Indonesia di tengah dinamika dunia.

Sebagai *think tank* strategis negara, Lemhannas RI menyatukan pemikiran dan praktik kepemimpinan dalam suatu kerangka kerja yang terintegrasi. Para peserta dididik untuk memahami bahwa kepemimpinan strategis tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan kekuatan nasional, potensi sumber daya, ancaman dan tantangan dari dalam maupun luar negeri, serta pentingnya menjaga kedaulatan dan eksistensi bangsa. Oleh karena itu,

pendidikan di Lemhannas RI tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada kemampuan analisis strategis dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi kompleks.

Konsep pendidikan Lemhannas RI bertumpu pada empat pilar utama:

1. **Wawasan Kebangsaan**: Peserta dididik untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang sejarah, budaya, ideologi, dan jati diri bangsa Indonesia. Ini menjadi fondasi moral dan ideologis dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin.
2. **Ketahanan Nasional**: Peserta dipersiapkan untuk memahami dan mengelola delapan gatra kehidupan nasional (Asta Gatra), yang terdiri dari gatra alamiah (geografi, kekayaan alam, dan penduduk) dan gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan). Dengan memahami ketahanan nasional secara komprehensif, pemimpin mampu menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan bangsa.
3. **Kepemimpinan Nasional**: Pendidikan kepemimpinan di Lemhannas menekankan pentingnya integritas, kemampuan komunikasi strategis, empati terhadap rakyat, serta kapasitas untuk memimpin dalam keragaman. Para peserta dilatih untuk menjadi pemimpin yang berkarakter, visioner, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
4. **Geopolitik**: Ini menjadi dimensi kunci yang membedakan Lemhannas dari lembaga pendidikan lainnya. Para peserta diajak memahami peta kekuatan global, konstelasi politik internasional, serta strategi-strategi geopolitik yang digunakan oleh negara-negara besar. Dengan bekal ini, pemimpin Indonesia diharapkan mampu menavigasi kepentingan nasional di tengah persaingan global yang ketat.

Melalui perpaduan keempat pilar tersebut, Lemhannas RI tidak hanya mencetak pemimpin, tetapi juga membentuk *statesman*—pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, etika publik, dan kemampuan membaca arah

zaman. Dalam era yang penuh dengan kompleksitas dan ketidakpastian, keberadaan Lemhannas RI sebagai institusi kepemimpinan geopolitik menjadi semakin relevan dan strategis bagi masa depan Indonesia.

Peran Strategis Lemhannas RI dalam Perjalanan Bangsa

Lemhannas RI merupakan institusi strategis yang perannya terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Sejak didirikan pada tahun 1965 hingga kini, Lemhannas RI tetap konsisten menjalankan mandat utamanya: menyiapkan kader pemimpin nasional yang memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran geopolitik, dan integritas moral yang tinggi. Perjalanan bangsa Indonesia yang penuh pasang surut menjadikan keberadaan Lemhannas RI sangat penting dalam menjaga kesinambungan dan stabilitas kepemimpinan nasional.

Pada era Orde Baru, Lemhannas RI memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas politik melalui kaderisasi pemimpin birokrasi, militer, dan sipil yang sejalan dengan arah pembangunan nasional saat itu. Lembaga ini menjadi arena pembentukan perspektif strategis bagi pejabat negara, sehingga mereka mampu mengelola pembangunan dalam kerangka ketahanan nasional. Setelah reformasi 1998, Lemhannas RI turut beradaptasi dengan semangat demokratisasi dan transparansi. Program-program pendidikan dan kajiannya diperluas untuk menjangkau berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, akademisi, aktivis, hingga pemimpin daerah, sejalan dengan semangat partisipasi publik dalam pembangunan bangsa.

Hingga saat ini, lulusan Lemhannas RI telah banyak mengisi posisi-posisi strategis di berbagai sektor: pemerintahan pusat dan daerah, lembaga legislatif, TNI dan Polri, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Lemhannas RI tidak hanya menjadi pusat pendidikan elite, tetapi juga ladang pembibitan pemimpin bangsa yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain fungsi pendidikan, peran strategis Lemhannas RI juga tampak dalam kapasitasnya sebagai *think tank* nasional. Lembaga ini aktif melakukan kajian strategis yang mendalam terhadap isu-isu nasional, regional, dan global yang berdampak terhadap ketahanan nasional. Hasil kajian tersebut disusun dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan multidisipliner dan integratif, Lemhannas RI menjadi tempat bertemunya berbagai pemikiran lintas bidang, menciptakan ruang dialog strategis yang konstruktif bagi masa depan bangsa.

Dalam konteks globalisasi, disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik dunia, peran Lemhannas RI menjadi semakin vital. Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu berpikir lintas batas, mengedepankan kepentingan nasional, dan mengambil langkah strategis yang berdampak jangka panjang. Lemhannas RI, dengan rekam jejak dan kapasitasnya, menjadi garda depan dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang mampu menjawab tantangan tersebut secara cerdas, beretika, dan berwawasan kebangsaan.

Dengan terus mengembangkan metode pendidikan, riset strategis, dan jaringan kepemimpinan nasional, Lemhannas RI tetap menjadi salah satu institusi kunci dalam perjalanan sejarah dan masa depan Indonesia—menjadi penjaga dan pengarah arah strategis bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Lemhannas RI dan Geopolitik Masa Kini

Memasuki abad ke-21, Indonesia menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks dan multidimensional. Globalisasi yang disertai dengan akselerasi transformasi digital, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi global, dan rivalitas antara kekuatan besar dunia, terutama di kawasan Indo-Pasifik, menciptakan lanskap strategis yang menuntut kesiapan dan

kecermatan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, keberadaan Lemhannas RI menjadi sangat relevan sebagai pusat kaderisasi pemimpin nasional dan lembaga kajian strategis bangsa.

Era digital membuka peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi menciptakan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru seperti disinformasi, ancaman siber, serta ketergantungan teknologi yang dapat mengganggu kedaulatan digital nasional. Lemhannas RI perlu memainkan peran penting dalam membentuk pemimpin yang tidak hanya memahami geopolitik tradisional, tetapi juga mampu merespons dinamika baru geopolitik digital, serta memformulasikan strategi ketahanan siber nasional.

Perubahan iklim merupakan isu global yang juga berdampak pada ketahanan nasional. Bencana alam, krisis energi dan pangan, hingga migrasi iklim merupakan tantangan nyata yang membutuhkan pendekatan lintas sektor. Dalam hal ini, Lemhannas RI harus mendorong lahirnya pemimpin yang memiliki kesadaran ekologis, mampu merumuskan kebijakan berkelanjutan, dan menjembatani kepentingan nasional dengan tanggung jawab global.

Sementara itu, rivalitas antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan kekuatan regional lainnya di kawasan Indo-Pasifik menghadirkan dinamika yang penuh ketegangan. Indonesia sebagai negara non-blok yang menganut politik bebas aktif, harus cermat menjaga keseimbangan strategis dan memainkan peran sebagai kekuatan penengah (balancer) yang aktif dalam menciptakan stabilitas kawasan. Lemhannas RI memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran geopolitik ini kepada para pemimpin bangsa, agar mampu bertindak secara cerdas dan berdaulat di tengah arus pertarungan kepentingan global.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Lemhannas RI harus mengembangkan pendekatan geopolitik yang adaptif, futuristik, dan berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendidikan dan pelatihan di Lemhannas

perlu terus diperbarui dengan memasukkan isu-isu global kontemporer, serta metodologi pembelajaran yang inovatif dan partisipatif. Dalam hal ini, wawasan kebangsaan harus tetap menjadi fondasi utama, agar para pemimpin yang dilahirkan tetap berpijak pada identitas nasional di tengah globalisasi yang mengaburkan batas-batas ideologi dan budaya.

Lebih dari itu, Lemhannas RI juga harus memperkuat perannya dalam menyusun kajian strategis jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan ketahanan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menjadi ruang integrasi antar-disiplin dan antarsektor, Lemhannas RI akan terus relevan sebagai garda terdepan dalam membangun kepemimpinan strategis bangsa yang mampu membawa Indonesia menghadapi masa depan dengan percaya diri, tangguh, dan bermartabat.

Penutup: Relevansi Sejarah untuk Masa Depan

Pendirian Lemhannas RI oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1965 merupakan sebuah langkah visioner yang berakar kuat pada pemahaman mendalam terhadap dinamika geopolitik dan kebutuhan bangsa akan kepemimpinan strategis. Dalam semangat kebangkitan nasional, Soekarno menanamkan nilai-nilai geopolitik, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional sebagai fondasi pembentukan karakter pemimpin masa depan Indonesia. Gagasan besar ini tidak hanya relevan pada masa ketika Indonesia menghadapi tekanan eksternal dan ketegangan internal, tetapi juga menjadi warisan intelektual dan strategis yang terus hidup hingga hari ini.

Sejarah telah mencatat bahwa Lemhannas RI tidak sekadar menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan, tetapi berkembang sebagai institusi strategis yang merajut dan menguatkan jaringan kepemimpinan nasional lintas sektor. Para lulusan Lemhannas telah menunjukkan kontribusi nyata dalam berbagai posisi penting di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini membuktikan bahwa

pendekatan holistik dalam pendidikan strategis yang dijalankan Lemhannas telah berhasil menanamkan nilai kepemimpinan yang tangguh, berwawasan luas, serta berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat.

Di era modern yang ditandai dengan ketidakpastian global, kompleksitas isu, dan akselerasi perubahan teknologi, peran Lemhannas RI semakin strategis. Dunia saat ini tengah dihadapkan pada tantangan multidimensi—dari konflik geopolitik, perubahan iklim, krisis energi dan pangan, hingga disrupsi akibat transformasi digital. Dalam konteks inilah, relevansi Lemhannas RI sebagai pusat penggemblengan pemimpin bangsa tidak pernah surut. Bahkan, tantangan zaman justru mempertegas pentingnya pembaruan pendekatan pendidikan geopolitik dan ketahanan nasional yang kontekstual, adaptif, dan berbasis nilai-nilai luhur bangsa.

Lemhannas RI harus terus menjaga marwahnya sebagai lembaga yang tidak hanya mendidik, tetapi juga memikirkan masa depan bangsa. Pemimpin yang dilahirkan tidak cukup hanya cerdas secara akademik dan strategis, melainkan juga harus memiliki integritas, kepekaan sosial, serta semangat juang yang berakar pada nasionalisme dan kemanusiaan. Dalam semangat itulah, Lemhannas dapat menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Refleksi terhadap sejarah pendirian Lemhannas RI seharusnya menjadi cermin sekaligus kompas bagi arah transformasi lembaga ini ke depan. Dengan menapaki jejak sejarah dan memetik pelajaran dari visi geopolitik Presiden Soekarno, Lemhannas RI memiliki bekal kuat untuk terus menjadi benteng ketahanan nasional yang adaptif dan progresif. Di tengah berbagai perubahan global, Lemhannas harus tetap menjadi rumah besar para pemikir strategis dan pemimpin bangsa, yang bersatu dalam visi membangun negeri, mengukuhkan kedaulatan, dan menapaki masa depan Indonesia yang gemilang.

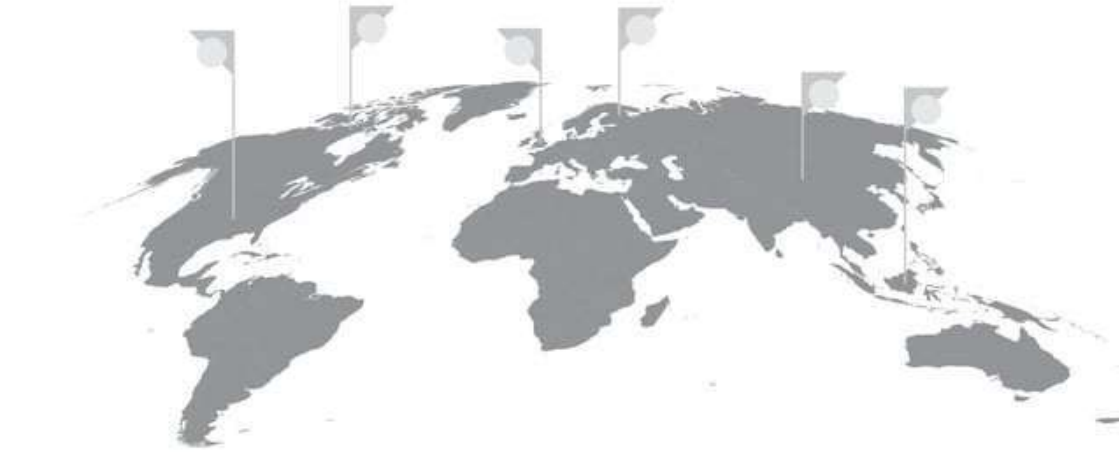

Bab 2 Posisi Strategis Indonesia dan Modal Dasar Ketahanan Nasional

Pendahuluan

Indonesia adalah negeri yang dikaruniai keberuntungan geografis, kekayaan sumber daya alam, serta keberagaman budaya dan etnis yang luar biasa. Letaknya yang berada di antara dua benua—Asia dan Australia—dan dua samudra–Pasifik dan Hindia—menjadikan Indonesia memiliki posisi geostrategis yang sangat penting dalam percaturan regional maupun global. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, Indonesia juga dikenal sebagai "poros maritim dunia" yang memiliki potensi besar dalam perdagangan, transportasi laut, dan geopolitik kelautan.

Namun, keberuntungan geografis tersebut juga datang dengan tantangan tersendiri. Posisi Indonesia di kawasan cincin api Pasifik (*ring of fire*) menjadikannya sangat rawan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Selain itu, kerentanan ekologis yang tinggi, perubahan iklim global, degradasi lingkungan, serta ketimpangan

pembangunan antarwilayah menjadi faktor-faktor krusial yang harus diantisipasi secara serius. Fenomena tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan pembangunan nasional, tetapi juga berpotensi melemahkan kohesi sosial dan ketahanan nasional jika tidak ditangani dengan pendekatan strategis.

Dalam konteks tersebut, konsep ketahanan nasional menjadi kunci utama. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjaga eksistensinya di tengah berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT), baik yang bersifat militer maupun non-militer, dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional yang kokoh menuntut sinergi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, tata kelola pemerintahan, dan nilai-nilai kebangsaan yang menyatu dalam satu visi keindonesiaan.

Pemahaman akan posisi strategis Indonesia serta segala potensi dan tantangan alaminya harus dijadikan sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan dan strategi nasional yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang berwawasan geopolitik, berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang, dan mampu mengelola keragaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan. Oleh karena itu, investasi pada pembangunan kepemimpinan strategis menjadi sangat penting, baik melalui pendidikan, penguatan lembaga strategis, maupun pengembangan kapasitas analisis dan pemikiran kebijakan.

Dalam kerangka inilah, Lemhannas RI memiliki peran sentral sebagai institusi yang bertugas menyiapkan pemimpin-pemimpin nasional yang memiliki kemampuan analisis strategis, pemahaman geopolitik yang tajam, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lemhannas tidak hanya mencetak pemimpin, tetapi juga menjadi penjaga nalar strategis bangsa yang mampu menjembatani antara masa lalu, masa kini, dan masa depan Indonesia.

Dengan menyadari keunggulan dan tantangan yang dimiliki bangsa ini, Indonesia dituntut untuk terus mengembangkan sistem ketahanan nasional yang adaptif, inklusif, dan progresif. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai negara maju, berdaulat, dan berperan aktif dalam membentuk tatanan dunia yang damai dan berkeadilan.

Kekayaan Sumber Daya Alam: Aset Strategis Bangsa

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA), yang menjadi salah satu kekuatan utama bangsa ini dalam mencapai kemajuan ekonomi dan ketahanan nasional. Kekayaan SDA Indonesia mencakup beragam sektor, mulai dari kehutanan, pertanian, sumber daya mineral dan energi, hingga kelautan dan perikanan, yang semuanya memiliki nilai strategis baik bagi pembangunan domestik maupun diplomasi internasional.

Sektor Kehutanan dan Pertanian

Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Kongo. Hutan-hutan ini tidak hanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dengan fungsi sebagai paru-paru dunia, tetapi juga menyediakan kayu, obat-obatan alami, dan hasil hutan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Keberagaman hayati yang terkandung dalam hutan Indonesia juga sangat kaya, menjadikan negara ini sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanah yang sangat subur, yang memungkinkan sektor pertanian untuk berkembang pesat. Tanah yang subur ini menjadi pendorong utama bagi sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi negara, menyediakan pangan bagi rakyat Indonesia dan surplus ekspor bagi negara.

Sumber Daya Mineral dan Energi

Indonesia dikenal sebagai negara kaya akan hasil tambang. Negara ini memiliki cadangan batubara, emas, tembaga, nikel, dan bauksit yang melimpah, yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga memiliki posisi strategis di pasar global. Selain itu, sektor energi Indonesia juga sangat berpotensi, dengan cadangan minyak dan gas bumi yang besar. Meskipun dunia sedang bergerak menuju energi terbarukan, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor ini, seperti energi panas bumi yang melimpah, energi air, energi surya, dan angin yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik serta mendukung keberlanjutan ekonomi yang ramah lingkungan.

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratan, menjadikannya negara dengan potensi kelautan yang sangat besar. Laut Indonesia kaya akan hasil perikanan, yang menjadikannya salah satu negara pengekspor ikan terbesar di dunia. Potensi sektor ini tidak hanya terbatas pada perikanan, tetapi juga pada transportasi laut dan pariwisata bahari. Transportasi laut, sebagai jalur utama perdagangan internasional, memberikan Indonesia posisi strategis dalam konektivitas global. Selain itu, pariwisata bahari Indonesia, dengan keindahan alam bawah lautnya, menarik wisatawan mancanegara, yang berkontribusi besar terhadap sektor pariwisata dan ekonomi negara. Industri maritim Indonesia pun terus berkembang dengan pemanfaatan pelabuhan dan infrastruktur kelautan yang semakin modern.

Secara keseluruhan, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi aset strategis yang sangat berharga bagi ketahanan ekonomi dan energi nasional. Pengelolaan SDA yang bijaksana dan berkelanjutan akan menguatkan posisi Indonesia dalam percaturan global. Lebih dari itu, SDA juga berperan penting dalam diplomasi internasional Indonesia, membuka peluang kerja

sama strategis dengan negara-negara lain, dan memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan regional. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan persaingan ekonomi dunia, pengelolaan SDA yang efektif dan efisien akan menjadi kunci untuk membangun ketahanan nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

Keanekaragaman Hayati: Kekayaan yang Tak Ternilai

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Sebagai negara *mega biodiversity*, Indonesia memiliki beragam ekosistem yang mendukung lebih dari 10% spesies tumbuhan berbunga dunia dan menjadi rumah bagi ribuan spesies fauna yang hanya ditemukan di tanah air ini. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan kekayaan alam luar biasa, termasuk hutan hujan tropis, savana, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Keanekaragaman ini tidak hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga berperan besar dalam ketahanan budaya dan ekonomi bangsa.

Fakta Keanekaragaman Hayati Indonesia

Salah satu fakta paling mencolok adalah bahwa Indonesia memiliki lebih dari 10% spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia. Ini menunjukkan betapa kayanya flora Indonesia yang memberikan manfaat besar baik dalam hal ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan. Di samping itu, Indonesia juga menjadi habitat bagi sejumlah satwa endemik yang sangat langka dan terancam punah, seperti orangutan di Kalimantan dan Sumatra, komodo di Pulau Komodo, harimau sumatra, badak jawa, serta burung cendrawasih yang hanya ditemukan di Papua. Keberadaan satwa-satwa endemik ini bukan hanya menjadi simbol identitas negara, tetapi juga bagian dari warisan alam yang harus dijaga kelestariannya.

Selain kekayaan flora dan fauna daratan, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Laut Indonesia merupakan bagian dari Coral Triangle, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Wilayah ini menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan, terumbu karang, dan organisme laut lainnya yang sangat penting untuk kesehatan ekosistem laut global. Terumbu karang Indonesia, yang terletak di sekitar pulau-pulau besar dan kecil di seluruh nusantara, merupakan salah satu ekosistem laut yang paling beragam dan produktif di dunia, mendukung kehidupan berbagai spesies laut yang berperan penting dalam rantai makanan dan sistem ekologi laut.

Pentingnya Keanekaragaman Hayati bagi Ketahanan Pangan dan Budaya

Keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya memainkan peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, tetapi juga memiliki manfaat yang sangat penting dalam ketahanan pangan. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia memberikan sumber daya alam yang esensial untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan. Misalnya, berbagai jenis tumbuhan obat yang ditemukan di hutan tropis Indonesia telah digunakan dalam pengobatan tradisional dan penelitian ilmiah untuk pengembangan obat-obatan baru.

Keanekaragaman hayati Indonesia juga tak terpisahkan dari identitas dan budaya masyarakatnya. Banyak suku bangsa di Indonesia yang menjalin hubungan erat dengan alam sekitarnya, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjadikannya bagian dari tradisi lokal. Ritual, seni, dan kebudayaan Indonesia banyak dipengaruhi oleh alam, yang tercermin dalam penggunaan flora dan fauna dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan, pakaian, hingga upacara adat.

Konservasi dan Tantangan Keanekaragaman Hayati

Namun, meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tantangan besar dalam menjaga keanekaragaman hayati tetap ada. Kerusakan lingkungan, deforestasi, perubahan iklim, dan perburuan liar adalah beberapa ancaman nyata yang harus dihadapi. Oleh karena itu, upaya konservasi dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati menjadi sangat penting, bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk keberlanjutan kehidupan di masa depan.

Dengan menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia, kita tidak hanya menjaga warisan alam yang tak ternilai, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus merasakan manfaat yang luar biasa dari alam yang kaya ini. Keanekaragaman hayati Indonesia adalah aset strategis yang harus dilindungi dan dimanfaatkan secara bijaksana demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan bumi.

Posisi Geografis Strategis: Simpul Geopolitik Dunia

Letak geografis Indonesia sangat strategis, menjadikannya sebagai simpul geopolitik dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan penting dalam perdagangan dan politik internasional. Terletak di antara dua samudra besar—Samudra Hindia dan Samudra Pasifik—serta di persimpangan benua Asia dan Australia, Indonesia memiliki posisi yang tak ternilai pentingnya dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global. Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai jembatan antar benua, tetapi juga sebagai pintu gerbang utama bagi perdagangan Asia Tenggara, yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kestabilan keamanan di kawasan ini.

Keunggulan Posisi Geografis Indonesia

Indonesia berada di jalur pelayaran internasional yang sangat vital, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Ketiga selat ini merupakan jalur utama bagi kapal-kapal perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dengan Eropa, Afrika, dan Australia. Selat Malaka, khususnya, adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik dan menjadi kunci utama bagi perdagangan global, dengan volume perdagangan yang mencapai triliunan dolar setiap tahunnya. Selat Sunda dan Selat Lombok juga memiliki peran penting sebagai jalur strategis dalam memperlancar arus barang dan energi, menghubungkan Indonesia dengan negara-negara tetangga serta pasar-pasar global.

Selain menjadi jalur perdagangan utama, letak Indonesia yang berada di kawasan Indo-Pasifik—pusat dinamika geopolitik dunia saat ini—membuat negara ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks pertahanan dan keamanan global. Indonesia menguasai wilayah laut dan udara yang menjadi titik krusial dalam menjaga stabilitas kawasan, serta memiliki potensi besar dalam memastikan kestabilan maritim yang memengaruhi keseluruhan kawasan Asia-Pasifik. Dalam kerangka ketahanan nasional, posisi ini memberikan Indonesia sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi diplomatik dan ekonominya di kancah internasional.

Keunggulan dalam Ketahanan Nasional

Posisi geografis Indonesia memberikan sejumlah keuntungan yang mendukung ketahanan nasional dalam berbagai aspek. Pertama, dalam hal ketahanan ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan konektivitas geografisnya untuk memperkuat logistik dan infrastruktur antar pulau serta antar negara. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh

nusantara, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi ekonomi melalui jalur pelayaran yang efisien, memperlancar arus barang, dan meningkatkan konektivitas regional.

Kedua, dalam hal ketahanan pertahanan, Indonesia menguasai wilayah laut dan udara yang vital bagi pertahanan nasional. Penguasaan atas selat-selat strategis dan wilayah perairan yang luas memberikan Indonesia kendali yang penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasional, baik dalam konteks pertahanan maritim maupun dalam merespons potensi ancaman dari luar.

Ketiga, dalam hal ketahanan diplomasi internasional, posisi geografis Indonesia memberikan negara ini posisi tawar yang tinggi dalam berbagai forum global. Sebagai negara yang berada di persimpangan jalur perdagangan dan kekuatan geopolitik utama, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik. Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam konflik regional, serta menjadi aktor utama dalam berbagai kerja sama multilateral, baik di tingkat ASEAN, APEC, maupun dalam forum global seperti PBB dan G20.

Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya sebagai simpul geopolitik dunia yang memainkan peran penting dalam perdagangan, pertahanan, dan diplomasi internasional. Keunggulan posisi ini memberikan Indonesia peluang besar untuk memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai aspek, sekaligus menjadikannya sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia-Pasifik. Dengan memanfaatkan sepenuhnya potensi strategis ini, Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

Negara Kepulauan Terbesar di Dunia: Tantangan dan Keunggulan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki potensi luar biasa yang tercermin dalam keberagaman budaya, bahasa, dan etnis. Keanekaragaman ini mencerminkan modal sosial dan budaya yang sangat kaya, menjadi kekuatan utama yang memperkuat integrasi nasional. Meskipun Indonesia memiliki banyak keunggulan sebagai negara kepulauan, status geografis ini juga menghadirkan tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Keunggulan Negara Kepulauan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keunikan dalam aspek budaya dan geografi. Keberagaman budaya dan bahasa yang ada di setiap pulau tidak hanya memperkaya kehidupan sosial, tetapi juga menciptakan peluang untuk memperkuat persatuan dalam keragaman. Setiap suku, tradisi, dan kepercayaan yang tumbuh di pulau-pulau yang tersebar menjadi bagian integral dari identitas nasional yang kuat, yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda tetapi tetap satu.

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan maupun di lautan. Kekayaan laut Indonesia, misalnya, menjadikannya sebagai negara dengan salah satu zona ekonomi eksklusif terbesar di dunia. Lautan Indonesia menyimpan berbagai potensi ekonomi seperti hasil perikanan, energi terbarukan (termasuk energi laut dan angin), serta potensi wisata bahari yang sangat besar. Keunggulan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perekonomian global, terutama dalam bidang maritim.

Tantangan Negara Kepulauan

Namun, menjadi negara kepulauan terbesar juga membawa serangkaian tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara bagian barat dan timur Indonesia. Wilayah-wilayah di Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, sering kali tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan akses pendidikan. Kesenjangan ini dapat memperburuk ketidakmerataan kualitas hidup antar daerah, dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif.

Tantangan kedua adalah keterbatasan infrastruktur konektivitas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus mengatasi kendala besar dalam hal transportasi antar pulau, distribusi barang, serta akses teknologi informasi. Infrastruktur yang terbatas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi efisiensi logistik, dan memperburuk kesenjangan antar daerah. Konektivitas antar pulau yang belum memadai juga menyulitkan pemerataan pembangunan, mengisolasi daerah-daerah tertentu dari kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi.

Ketiga, Indonesia juga menghadapi kerentanan terhadap penyelundupan dan pelanggaran kedaulatan, terutama di wilayah perbatasan laut. Dengan wilayah perairan yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, Indonesia sering kali menjadi sasaran kegiatan ilegal, seperti penyelundupan barang dan manusia, serta perburuan ikan ilegal. Hal ini tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga mengancam kedaulatan dan keamanan negara.

Kerangka Pembangunan Nasional: Wawasan Nusantara

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pembangunan nasional Indonesia harus dirancang dalam kerangka wawasan nusantara, yaitu pandangan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, baik dari

aspek politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan. Dalam kerangka ini, pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi, dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan setiap wilayah. Penguatan konektivitas antar pulau, penyediaan infrastruktur yang merata, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Dengan wawasan nusantara, Indonesia dapat memperkuat integrasi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat posisi sebagai negara yang tangguh dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Keberagaman yang menjadi kekuatan, jika dikelola dengan bijaksana, akan menjadi landasan bagi tercapainya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Tantangan Alam: Perubahan Iklim dan Ring of Fire

Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis, juga menghadapi kerentanannya terhadap bencana alam. Dua faktor utama yang menyebabkan Indonesia sangat rentan adalah letaknya yang berada di *Ring of Fire* dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kedua faktor ini menjadi tantangan besar bagi ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman terhadap keselamatan, lingkungan, dan ekonomi.

Letak di *Ring of Fire*

Indonesia terletak di kawasan *Ring of Fire* atau Cincin Api Pasifik, yang merupakan jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar: Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Posisi ini menyebabkan Indonesia sangat rawan terhadap aktivitas geologi yang dapat berujung pada bencana alam besar seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Wilayah ini sering mengalami gejolak tektonik yang menimbulkan kerusakan fisik yang besar, serta dampak sosial dan ekonomi yang merugikan.

Sejarah mencatat bencana-bencana besar yang disebabkan oleh faktor ini, seperti tsunami Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 230.000 orang dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Letusan Gunung Merapi, yang terakhir kali terjadi pada tahun 2010, juga menjadi contoh nyata dampak destruktif dari aktivitas vulkanik di Indonesia. Selain itu, gempa bumi yang mengguncang Lombok pada tahun 2018, serta gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, pada 2018, turut menunjukkan betapa rentannya Indonesia terhadap bencana alam. Bencana-bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian masyarakat dan menyebabkan kehilangan nyawa yang tak terhitung.

Dampak Perubahan Iklim

Selain ancaman geologis, Indonesia juga menghadapi tantangan besar terkait perubahan iklim. Pemanasan global yang terus meningkat telah mengubah pola cuaca di seluruh dunia, dan Indonesia tidak terkecuali. Dampak yang paling terasa adalah peningkatan suhu rata-rata tahunan yang menyebabkan pergeseran pola hujan, serta kenaikan permukaan air laut yang dapat mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perubahan iklim juga memperburuk frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, seperti hujan deras yang menyebabkan banjir bandang, kekeringan yang merugikan sektor pertanian, serta kebakaran hutan yang semakin sulit dikendalikan. Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra pada tahun 2015, yang menyebabkan kabut asap pekat, menyoroti kerentanannya terhadap perubahan iklim, yang tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan warga, tetapi juga ekosistem yang rapuh. Selain itu, abrasi pantai yang semakin meluas dan kerusakan ekosistem mangrove juga menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia.

Tantangan bagi Ketahanan Ekologi

Kondisi geologis dan iklim yang dinamis ini menjadi tantangan besar bagi ketahanan ekologi dan lingkungan hidup Indonesia. Pengelolaan bencana yang efektif, serta kebijakan yang berfokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan nasional ke depan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, dengan memastikan bahwa upaya mitigasi bencana dan penanggulangan dampak perubahan iklim menjadi bagian integral dari strategi ketahanan nasional.

Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, serta meningkatkan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca harus menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk memastikan Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan iklim tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan pembangunan ekonomi.

Indonesia memiliki potensi besar dalam menghadapi tantangan alam ini jika dikelola dengan bijak dan terencana. Dengan perhatian yang tepat pada isu-isu ekologis dan iklim, Indonesia dapat memperkuat ketahanan nasionalnya, menjaga kelestarian alam, dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Ketahanan Nasional: Integrasi Modal Alam, Sosial, dan Geopolitik

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang luar biasa dan posisi geografis yang strategis, memiliki modal dasar yang sangat besar untuk membangun ketahanan nasional yang kokoh. Modal ini terdiri dari sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang tinggi, keberagaman sosial budaya, serta posisi geopolitik yang vital. Namun, untuk mewujudkan ketahanan nasional yang sejati, seluruh potensi ini harus dikelola secara

bijak, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketahanan nasional Indonesia bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga melibatkan sektor-sektor lain seperti ketahanan pangan, energi, ekologi, ekonomi, dan budaya.

Memperkuat Kemandirian Nasional

Kemandirian nasional menjadi salah satu tujuan utama dalam mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Indonesia harus dapat memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki untuk menciptakan industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Sektor pertanian, perikanan, energi, dan kehutanan adalah beberapa contoh sektor yang dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif, tetapi juga mengembangkan sektor manufaktur dan teknologi yang berbasis pada sumber daya lokal. Kemandirian energi, misalnya, dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah, seperti energi surya, angin, dan panas bumi.

Menjaga Kedaulatan Wilayah

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan wilayah laut yang luas. Oleh karena itu, menjaga kedaulatan wilayah menjadi sangat penting dalam konteks ketahanan nasional. Dalam menghadapi ancaman dan intervensi asing, Indonesia perlu memiliki kekuatan untuk mengontrol dan mempertahankan seluruh wilayahnya, baik di daratan maupun di laut. Hal ini memerlukan modernisasi sektor pertahanan, terutama dalam hal pengamanan perbatasan dan pengelolaan sumber daya alam laut. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil, akan memperkuat integrasi nasional dan meminimalisir potensi ancaman terhadap kedaulatan negara.

Meningkatkan Kualitas Hidup Rakyat

Ketahanan nasional juga terkait erat dengan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, salah satu fokus utama adalah meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia secara merata. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi yang setara harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Dengan memperhatikan pemerataan pembangunan, ketimpangan sosial antara wilayah barat dan timur Indonesia dapat dikurangi, yang pada gilirannya memperkuat solidaritas sosial dan stabilitas politik. Ketahanan sosial yang kuat, di mana masyarakat dapat hidup dalam keharmonisan, sangat penting untuk menciptakan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Diplomasi Berbasis Kekuatan Domestik

Di tingkat internasional, Indonesia perlu mengembangkan diplomasi berbasis kekuatan domestik atau *domestic-driven diplomacy*. Sebagai negara dengan potensi besar dalam berbagai bidang—dari sumber daya alam hingga kekuatan budaya—Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dalam berbagai forum global. Diplomasi yang berfokus pada kekuatan domestik ini memungkinkan Indonesia untuk menggalang kerja sama internasional yang saling menguntungkan, tanpa tergantung pada pihak luar. Indonesia dapat memperkuat peranannya di dunia internasional dengan menjadikan kekuatan domestiknya sebagai modal untuk membangun hubungan yang lebih strategis dengan negara lain.

Untuk mencapai ketahanan nasional yang kokoh, Indonesia harus mengintegrasikan semua potensi yang dimilikinya—baik alam, sosial, maupun geopolitik—dalam satu kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengelola potensi tersebut dengan bijaksana dan terintegrasi, Indonesia tidak hanya dapat mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga memperkuat peranannya di dunia internasional dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara merata. Ketahanan nasional Indonesia yang terbangun dari kekuatan domestik yang solid akan menjamin masa depan bangsa yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

Penutup: Menjaga dan Meningkatkan Ketahanan Nasional Indonesia

Posisi strategis Indonesia dan modal dasar ketahanan nasional yang dimilikinya bukanlah warisan semata, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus terus dijaga, diperkuat, dan ditingkatkan. Keberadaan Indonesia di pusat geopolitik dunia, dengan kekayaan alam yang melimpah serta keberagaman sosial dan budaya, memberikan potensi yang luar biasa bagi pembangunan nasional. Namun, dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, tantangan yang dihadapi Indonesia juga semakin besar. Oleh karena itu, pengelolaan potensi serta tantangan alam yang dihadapi Indonesia harus menjadi bagian integral dari strategi geopolitik dan pembangunan berkelanjutan yang lebih adaptif, inklusif, dan visioner.

Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan nasional Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah tidak boleh menjadi beban atau potensi yang mudah disalahgunakan. Sebaliknya, ia harus dikelola secara adil dan lestari, dengan melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sumber daya alam yang dimiliki harus berfungsi sebagai pendorong utama ekonomi yang tidak hanya menguntungkan hari ini, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Hal ini tentunya memerlukan kebijakan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Di samping itu, pembangunan manusia sebagai penggerak utama ketahanan nasional menjadi sangat penting. Pendidikan yang berkualitas, pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam memperkuat kapasitas bangsa. Sumber daya manusia yang terdidik dan memiliki keterampilan tinggi akan menjadi aktor penting

dalam menciptakan inovasi, mendorong perkembangan ekonomi, serta menjaga stabilitas sosial. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan modal sosial dan budaya yang dimilikinya untuk membangun sebuah masyarakat yang produktif dan terhubung secara global.

Strategi pembangunan yang berbasis pada penguatan kapasitas nasional harus melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung terciptanya pemerataan ekonomi. Dengan demikian, ketimpangan sosial antarwilayah dapat dikurangi, yang pada gilirannya memperkuat kesatuan dan solidaritas nasional.

Indonesia juga perlu memperkuat daya saingnya di tingkat global dengan mengedepankan inovasi, riset, dan teknologi. Pengembangan sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, teknologi informasi, dan industri kreatif, dapat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam hal ini, peran diplomasi internasional yang berbasis pada kekuatan domestik akan sangat penting. Indonesia harus dapat memanfaatkan posisinya di berbagai forum internasional untuk mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain.

Sebagai penutup, semangat utama dalam membangun ketahanan nasional Indonesia adalah mengintegrasikan seluruh potensi alam, sosial, dan geopolitik yang dimilikinya. Dengan mengelola potensi tersebut secara bijaksana, Indonesia dapat menciptakan ketahanan nasional yang tangguh, berdaya saing global, dan mampu menghadapi segala guncangan yang datang. Ketahanan nasional yang utuh dan dinamis akan menjadi landasan bagi terciptanya masa depan bangsa yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

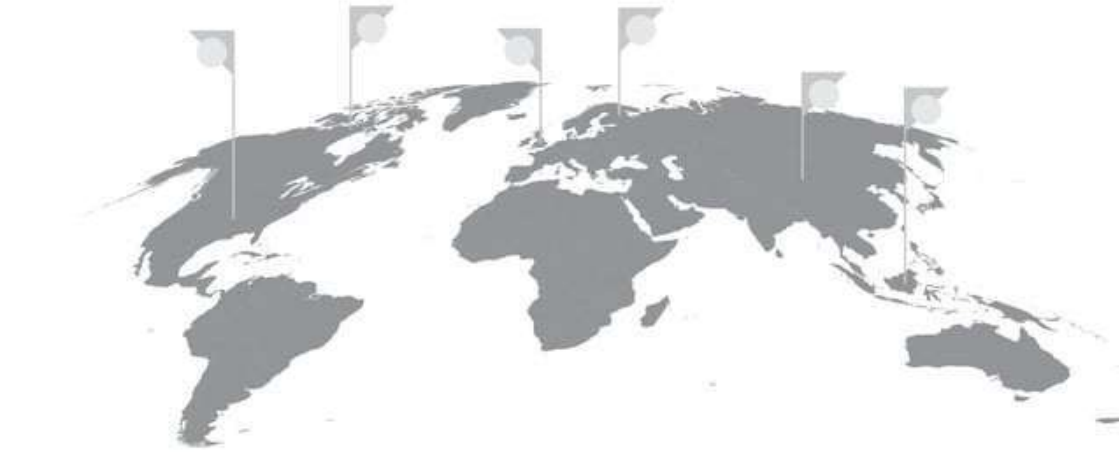

Bab 3 Konsep Ketahanan Nasional dalam Perspektif Asta Gatra

Pendahuluan

Ketahanan nasional merupakan konsep yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan hidup suatu negara, baik di tengah dinamika internal yang terus berkembang maupun dalam menghadapi tekanan dari faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi. Bagi Indonesia, ketahanan nasional tidak hanya dilihat dari satu aspek semata, melainkan harus dianalisis secara komprehensif, melibatkan berbagai dimensi kehidupan nasional. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ketahanan nasional Indonesia adalah Asta Gatra, yang terdiri dari delapan aspek kehidupan nasional yang terbagi dalam dua kategori utama: Trisula Gatra dan Pancagatra.

Trisula Gatra mencakup tiga aspek alamiah, yaitu geografi, demografi, dan kekayaan alam, yang menjadi fondasi dasar ketahanan nasional Indonesia. Geografi Indonesia yang berada di posisi strategis antara dua samudra dan dua benua menjadikan negara ini sebagai titik sentral dalam perdagangan

internasional dan geopolitik global. Demografi yang sangat beragam juga menjadi modal sosial penting, namun juga menghadirkan tantangan dalam menciptakan kesatuan bangsa. Sementara itu, kekayaan alam yang melimpah menjadi aset yang sangat berharga, baik dalam konteks ketahanan pangan, energi, maupun sebagai kekuatan ekonomi. Namun, pengelolaan sumber daya alam ini harus dilakukan dengan bijak agar tidak menjadi bencana ekologis yang justru mengancam ketahanan nasional itu sendiri.

Di sisi lain, **Pancagatra** menggambarkan aspek sosial yang lebih luas, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ideologi yang kokoh menjadi landasan utama dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta mengarahkan bangsa ini untuk tetap berkomitmen pada Pancasila sebagai dasar negara. Dalam ranah politik, ketahanan nasional Indonesia dituntut untuk mampu menjaga stabilitas politik domestik dan diplomasi internasional yang berimbang dan berbasis pada kepentingan nasional. Sementara itu, ekonomi yang kokoh menjadi penopang ketahanan, memberikan fondasi bagi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan.

Aspek sosial budaya di Indonesia sangat kompleks, mencakup beragam etnis, budaya, dan bahasa yang harus dikelola dengan bijak untuk memperkuat integrasi sosial dan menghindari potensi disintegrasi. Ketahanan pertahanan dan keamanan juga tidak kalah penting, mengingat ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri dapat menguji kesiapan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya. Pengelolaan aspek ini memerlukan kerja sama yang erat antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat.

Dalam dunia yang semakin global, Indonesia tidak terlepas dari dinamika global yang penuh tantangan. Globalisasi, perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta ketegangan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik dan dunia secara keseluruhan memberikan dampak langsung terhadap ketahanan

nasional Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan Asta Gatra harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi dan pengelolaan risiko yang ada.

Melalui kerangka Asta Gatra ini, kita dapat lebih memahami betapa pentingnya integrasi antara berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh, berdaulat, dan berdaya saing. Bab ini akan mengupas secara mendalam setiap gatra dalam konteks ketahanan nasional, serta menggali tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan ketahanan yang holistik dan adaptif.

Tri Gatra: Dimensi Statis

1. Geografi

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan dan geopolitik dunia. Namun, posisi ini juga membawa tantangan berupa kerentanan terhadap infiltrasi budaya, kejahatan lintas negara, serta ancaman keamanan maritim.

Tekanan global:

- Persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik memengaruhi stabilitas kawasan Indonesia.
- Perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Globalisasi menyebabkan masuknya pengaruh budaya asing yang kadang tidak selaras dengan nilai lokal.

2. Demografi

Dengan lebih dari 280 juta penduduk dan mayoritas berusia produktif, Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Ini adalah modal besar untuk pembangunan nasional, namun sekaligus bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik.

Tekanan global:

- Kompetisi tenaga kerja global menuntut peningkatan kualitas SDM nasional.
- Urbanisasi cepat menimbulkan masalah sosial baru seperti pengangguran, kriminalitas, dan ketimpangan.
- Arus migrasi internasional juga berdampak pada struktur kependudukan dan keamanan nasional.

3. Kekayaan Alam

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dari tambang, hutan, laut, hingga energi terbarukan. Ini merupakan kekuatan ekonomi sekaligus sumber konflik strategis.

Tekanan global:

- Eksploitasi berlebihan oleh korporasi global mengancam keberlanjutan dan kedaulatan sumber daya.
- Perubahan iklim berdampak pada produktivitas pertanian dan kualitas lingkungan.
- Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi pasar dunia.

Panca Gatra: Dimensi Dinamis

1. Ideologi

Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi ideologis bangsa yang mempersatukan keragaman Indonesia. Ideologi ini memberi arah bagi pembangunan nasional dan kehidupan berbangsa.

Tekanan global:

- Penyebaran ideologi transnasional (liberalisme ekstrem dan radikalisme agama) mengancam kohesi sosial.
- Media sosial menjadi saluran infiltrasi nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Pancasila.
- Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai luhur bangsa melemahkan imunitas ideologis nasional.

2. Politik

Sistem politik demokratis di Indonesia memberikan ruang partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Stabilitas politik sangat penting dalam menjaga arah pembangunan dan ketahanan nasional.

Tekanan global:

- Campur tangan asing dalam bentuk lobi, pendanaan LSM, dan opini publik digital dapat memengaruhi kebijakan nasional.
- Praktik politik transaksional dan polarisasi akibat informasi hoaks mengganggu kohesivitas masyarakat.
- Keterbukaan politik membuat Indonesia rentan terhadap agenda geopolitik pihak luar.

3. Ekonomi

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional. Ekonomi Indonesia terus tumbuh, namun menghadapi tantangan struktural dan eksternal.

Tekanan global:

- Ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan impor barang jadi menciptakan defisit neraca berjalan.
- Krisis global seperti pandemi, konflik geopolitik, dan kenaikan suku bunga global memengaruhi stabilitas ekonomi domestik.
- Tantangan revolusi industri 4.0 menuntut peningkatan daya saing, inovasi, dan ekonomi digital.

4. Sosial Budaya

Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam merupakan kekayaan tak ternilai, sekaligus modal sosial untuk membangun ketahanan nasional. Nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kekeluargaan menjadi perekat bangsa.

Tekanan global:

- Globalisasi budaya menyebabkan pergeseran nilai dan gaya hidup konsumtif serta individualistis.
- Konflik sosial berbasis identitas, terutama di media sosial, mengancam integrasi sosial.
- Lunturnya nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional membuat masyarakat rentan terhadap disintegrasi budaya.

5. Pertahanan dan Keamanan

Ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan adalah elemen terakhir sekaligus pengaman seluruh aspek Asta Gatra. Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Tekanan global:

- Ancaman keamanan non-tradisional, seperti siber, terorisme, penyelundupan, dan spionase meningkat.
- Perlombaan senjata dan peningkatan kehadiran militer asing di sekitar kawasan Indonesia menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi.
- Kedaulatan wilayah laut dan udara menghadapi tantangan dari manuver kekuatan asing dan konflik perbatasan.

Sinergi Asta Gatra dalam Membangun Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional tidak dapat dibangun secara parsial. Konsep Asta Gatra—yang mencakup tiga gatra alamiah (geografi, demografi, dan kekayaan alam) serta lima gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan)—harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung, saling memengaruhi, dan saling menguatkan. Kekuatan sejati ketahanan nasional Indonesia akan muncul ketika seluruh unsur Asta Gatra dikelola secara terpadu, selaras, dan berkesinambungan.

Setiap gatra memiliki perannya masing-masing, namun tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, **ketahanan ideologi** yang kuat sangat bergantung pada kualitas sistem pendidikan dan budaya bangsa. Pendidikan yang mencetak generasi berkarakter Pancasila akan memperkuat internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Media massa dan platform digital yang bertanggung jawab (gatra politik) juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memperkuat identitas nasional. Tanpa dukungan dari gatra sosial budaya dan politik, ideologi negara rentan digerus arus informasi global yang tidak terfilter.

Ketahanan ekonomi, sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional, sangat terkait erat dengan stabilitas politik dan keamanan. Tidak ada investasi tanpa jaminan stabilitas. Begitu pula, pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan sangat membutuhkan pengelolaan sumber daya

alam yang bijak (gatra kekayaan alam) serta pembangunan manusia yang unggul (gatra demografi). Inovasi dan teknologi—hasil dari ekonomi yang maju—juga menjadi penopang penting bagi pertahanan negara, terutama di era perang siber dan ancaman non-konvensional.

Dalam konteks **pertahanan dan keamanan**, gatra ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kesejahteraan dan keadilan sosial adalah benteng pertama terhadap potensi konflik sosial, radikalisme, maupun disintegrasi bangsa. Kekuatan militer bukan hanya terletak pada jumlah personel dan alutsista, tetapi juga pada kualitas SDM pertahanan, dukungan teknologi nasional, dan legitimasi sosial yang kuat.

Pendekatan holistik terhadap Asta Gatra menuntut kebijakan lintas sektor yang tidak bekerja dalam silo. Sinergi dan koordinasi antarkementerian dan lembaga negara sangat penting. Di sisi lain, keberhasilan pembangunan ketahanan nasional juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sipil. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media (pendekatan *pentahelix*) merupakan keniscayaan dalam menciptakan ekosistem ketahanan yang adaptif, inklusif, dan resilien.

Lebih dari itu, sinergi Asta Gatra harus menjadi ruh dalam perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Setiap kebijakan pembangunan—baik infrastruktur, digitalisasi, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi lokal–harus dianalisis dalam kerangka Asta Gatra untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Dengan memahami dan mengelola keterkaitan antar-gatra secara terpadu, Indonesia tidak hanya mampu memperkuat fondasi ketahanan nasional, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan strategis dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Inilah jalan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan berdaya saing global.

Penutup

Konsep ketahanan nasional melalui pendekatan **Asta Gatra** merupakan fondasi strategis yang menyatukan seluruh potensi bangsa dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Asta Gatra, tercermin pemahaman bahwa kekuatan dan ketahanan Indonesia tidak hanya bertumpu pada aspek militer atau pertahanan semata, tetapi juga mencakup faktor-faktor geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan secara menyeluruh. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengenali keunggulan, mengantisipasi kerentanan, dan merumuskan arah kebijakan yang berkelanjutan.

Di tengah era globalisasi, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, serta perubahan iklim yang semakin intens, setiap gatra menghadapi tekanan dan tantangan yang bersifat multidimensi. Misalnya, gatra ekonomi menghadapi volatilitas pasar global, gatra politik dihadapkan pada tantangan polarisasi dan disinformasi, sementara gatra ideologi diuji oleh arus radikalisme dan lunturnya nilai kebangsaan. Begitu pula, gatra lingkungan semakin rentan oleh degradasi ekosistem, bencana alam, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Namun, Indonesia tidak kekurangan modal untuk bertahan, beradaptasi, bahkan melompat lebih tinggi. Jika seluruh gatra dikelola secara **terintegrasi**, **sinergis**, dan **adaptif terhadap perkembangan zaman**, maka Indonesia bukan hanya mampu menjaga **stabilitas nasional**, tetapi juga dapat memperkuat **daya saing global** dan mendorong **pembangunan berkelanjutan**. Kunci dari semua itu adalah perencanaan strategis yang berbasis data, kolaborasi antarsektor, serta pemimpin-pemimpin yang visioner dan berpihak pada kepentingan bangsa.

Ketahanan nasional idealnya tidak dipahami sekadar sebagai alat bertahan dari ancaman, melainkan sebagai **energi kolektif bangsa**—yang tumbuh dari semangat gotong royong, kepercayaan antar elemen masyarakat, serta kesadaran bersama untuk menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia. Dalam konteks ini, Asta Gatra bukan hanya instrumen analisis, tetapi menjadi arah kebijakan dan paradigma pembangunan nasional yang berkarakter Indonesia.

Mewujudkan **Indonesia Emas 2045**, yaitu Indonesia yang maju, adil, berkelanjutan, dan berperan aktif di tataran global, hanya dapat dicapai bila seluruh pilar Asta Gatra dikembangkan secara seimbang dan selaras. Ketahanan nasional harus menjadi prioritas bersama—bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Dengan **wawasan kebangsaan yang kuat**, **penguatan kapasitas sumber daya manusia**, serta komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa, Indonesia mampu melangkah dengan percaya diri menghadapi masa depan.

Akhirnya, ketahanan nasional adalah tentang **membangun fondasi bangsa yang kokoh**—baik secara fisik, sosial, maupun spiritual. Inilah jalan bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang **berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan**—sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

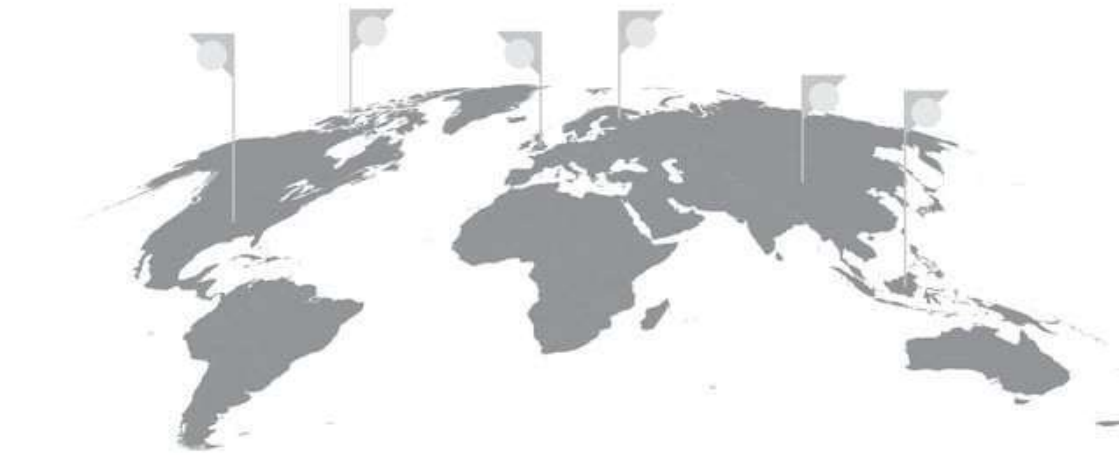

Bab 4 Lanskap Geopolitik Global Kontemporer

Pendahuluan

Dunia saat ini sedang mengalami transformasi besar dalam lanskap geopolitik global. Setelah hampir tiga dekade pasca-Perang Dingin yang ditandai dengan dominasi Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan global dalam tatanan unipolar, dinamika kekuasaan internasional mulai bergeser ke arah yang lebih **multipolar**. Kekuatan-kekuatan baru bermunculan, menciptakan poros-poros pengaruh baru yang membentuk ulang arsitektur geopolitik dan geoekonomi dunia. Kompetisi antarnegara besar semakin menajam, tidak hanya dalam dimensi militer dan ekonomi, tetapi juga dalam aspek teknologi, diplomasi, dan ideologi.

Salah satu rivalitas utama yang membentuk lanskap geopolitik kontemporer adalah **persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok**. Kedua negara ini bersaing dalam membangun pengaruh strategisnya di berbagai kawasan, terutama di **Indo-Pasifik**, yang kini menjadi pusat gravitasi baru dalam kontestasi global. Kawasan ini mencakup jalur perdagangan tersibuk di

dunia, memiliki cadangan energi dan sumber daya alam yang besar, serta merupakan titik temu kepentingan antara negara-negara besar dan kekuatan menengah.

Dalam konteks ini, inisiatif seperti **Belt and Road Initiative (BRI)** yang dipelopori oleh Tiongkok telah memperkuat kehadiran ekonomi dan infrastrukturnya di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa Timur. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya merespons melalui berbagai bentuk aliansi strategis baru, seperti **AUKUS** (Australia, United Kingdom, United States), yang menekankan pada kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik, serta penguatan kembali peran **Quad** (AS, Jepang, India, dan Australia) sebagai forum dialog strategis untuk menjaga tatanan berbasis aturan (rules-based order).

Di sisi lain, aktor-aktor global lainnya juga menunjukkan dinamika baru. Kelompok **BRICS** (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) berkembang menjadi forum alternatif dalam menyuarakan aspirasi negara-negara berkembang yang menginginkan tatanan global yang lebih adil dan inklusif. Di tengah ketegangan geopolitik, **konflik Rusia-Ukraina** telah memperlihatkan kerapuhan arsitektur keamanan internasional dan memperuncing blok politik-ekonomi dunia, berdampak pada ketahanan energi, pangan, serta stabilitas ekonomi global.

Dalam pusaran dinamika ini, peran organisasi regional seperti **ASEAN** juga mengalami transformasi. ASEAN dituntut untuk semakin lincah dan responsif dalam menyikapi pergeseran geopolitik global, menjaga netralitas, dan memperkuat kerja sama regional agar tidak terombang-ambing dalam rivalitas kekuatan besar.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Posisi strategis Indonesia di jantung Indo-Pasifik memberikan keunggulan geopolitik yang signifikan, namun juga menuntut kebijakan luar negeri yang **cerdas, fleksibel, dan berdimensi jangka panjang**. Bab ini akan membahas

lebih dalam bagaimana Indonesia harus merespons dinamika geopolitik global tersebut, dengan tetap menjaga kepentingan nasional, memperkuat posisi tawar di kancah internasional, dan mendorong tatanan dunia yang damai, adil, dan seimbang.

Pergeseran dari Unipolar ke Multipolar

Setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dunia memasuki era dominasi Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan superpower. Tatanan internasional yang terbentuk saat itu dikenal sebagai **tatanan unipolar**, di mana Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam mengatur ekonomi global, kebijakan luar negeri, serta keamanan internasional. Selama hampir dua dekade, AS menjadi aktor dominan dalam berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia.

Namun, memasuki abad ke-21, terutama setelah **krisis finansial global tahun 2008**, dominasi ini mulai mengalami tantangan serius. Munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti **Tiongkok, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan** menandai berakhirnya dominasi tunggal dan dimulainya era **multipolaritas**. Negara-negara ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga memperkuat posisi politik dan militernya dalam percaturan global.

Tatanan multipolar dicirikan oleh beberapa hal utama. Pertama, **tidak ada satu negara pun yang memiliki dominasi absolut** di semua bidang strategis, baik ekonomi, militer, teknologi, maupun diplomasi. Kedua, peran **negara-negara berkembang meningkat secara signifikan** dalam tata kelola global. Mereka mulai menuntut reformasi lembaga internasional agar lebih representatif dan adil. Ketiga, multipolaritas juga ditandai oleh **fragmentasi lembaga internasional** akibat perbedaan visi dan konflik kepentingan antara blok-blok kekuatan yang saling bersaing.

Fenomena ini membuka **peluang besar** bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam tatanan multipolar, negara-negara seperti Indonesia memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk memperjuangkan kepentingan nasional tanpa harus terjebak dalam dikotomi blok Barat atau Timur. Indonesia dapat menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara lebih leluasa, menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak sesuai kepentingan nasional, serta memperkuat diplomasi regional dan global.

Namun demikian, transisi menuju dunia multipolar juga membawa **tantangan dan risiko baru**. Persaingan antar-kekuatan besar dapat memicu ketegangan regional, konflik proksi, atau bahkan perlombaan senjata yang berdampak pada stabilitas global. Ketidakstabilan ini diperparah oleh **melemahnya konsensus global** dalam menyelesaikan isu-isu lintas batas seperti perubahan iklim, pandemi, keamanan siber, dan migrasi. Lembaga internasional sering kali terjebak dalam kebuntuan politik karena tarik-menarik kepentingan antarblok.

Bagi Indonesia, kondisi ini menuntut kebijakan luar negeri yang **adaptif, strategis, dan berprinsip**. Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dengan meningkatkan daya saing nasional, memperluas kerja sama bilateral dan multilateral, serta mengambil peran aktif dalam berbagai forum internasional. Lebih dari itu, Indonesia harus mampu menjadi **jembatan dialog** antar-kekuatan besar dan mendorong terciptanya tata dunia yang damai, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan memanfaatkan ruang strategis yang terbuka dalam tatanan multipolar, Indonesia dapat memperkuat peran geopolitiknya, tidak hanya sebagai penonton dalam rivalitas global, tetapi sebagai aktor penting dalam membentuk masa depan tatanan internasional yang lebih seimbang.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan salah satu dinamika paling menentukan dalam lanskap geopolitik kontemporer. Persaingan antara dua kekuatan besar ini bukan sekadar kontestasi militer atau politik semata, tetapi mencakup **dimensi ekonomi, teknologi, ideologi, dan narasi global** yang semakin kompleks dan saling tumpang tindih. Hubungan antara Washington dan Beijing telah bergeser dari era kerja sama strategis menjadi persaingan terbuka yang berdampak luas terhadap sistem internasional.

Amerika Serikat, sebagai kekuatan hegemonik pasca-Perang Dunia II, berupaya mempertahankan **tatanan liberal internasional** berbasis aturan (rules-based international order). Melalui inisiatif seperti ***Indo-Pacific Strategy***, AS berusaha memperkuat kehadiran militernya di Asia Timur dan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, India (melalui QUAD), serta membentuk aliansi baru seperti **AUKUS** untuk menahan pengaruh militer dan ekonomi Tiongkok. AS juga aktif menggalang dukungan diplomatik di kawasan, mendorong nilai-nilai demokrasi, keterbukaan pasar, dan supremasi hukum internasional.

Di sisi lain, **Tiongkok** tampil sebagai penantang status quo, dengan menawarkan narasi alternatif tentang tatanan dunia berbasis **"*win-win cooperation*"** dan **non-intervensi**. Melalui inisiatif ambisius seperti ***Belt and Road Initiative*** **(BRI)**, Tiongkok membangun jaringan infrastruktur global dan memperluas pengaruh ekonominya di Asia, Afrika, Eropa, dan bahkan Amerika Latin. Di bidang teknologi, Tiongkok secara agresif mengembangkan keunggulan dalam **kecerdasan buatan (AI), jaringan 5G, semikonduktor, dan ruang angkasa**, yang dipandang sebagai sektor strategis masa depan.

Persaingan ini telah memunculkan berbagai **titik panas konflik**, seperti perang dagang yang memuncak sejak 2018 dengan saling mengenakan tarif impor, hingga kebijakan pembatasan teknologi seperti larangan ekspor semikonduktor canggih dan perangkat lunak AS ke perusahaan Tiongkok seperti Huawei. Selain itu, **ketegangan di Laut China Selatan**, serta isu **Taiwan**, menjadi pemicu utama ketegangan militer. Tiongkok terus memperkuat klaimnya atas wilayah sengketa, sementara AS dan sekutunya menegaskan prinsip kebebasan navigasi dan dukungan terhadap demokrasi Taiwan.

Dalam konteks ini, **Indonesia dan banyak negara lainnya di kawasan Indo-Pasifik** menghadapi dilema strategis yang semakin kompleks. Di satu sisi, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar dengan investasi dan perdagangan yang sangat signifikan. Di sisi lain, AS dan sekutu-sekutunya tetap menjadi mitra strategis dalam hal keamanan, teknologi, dan pendidikan. Ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan hubungan pertahanan dengan AS menuntut **posisi luar negeri yang cermat dan seimbang**.

Bagi Indonesia, pendekatan **bebas aktif** tetap menjadi dasar utama dalam menghadapi rivalitas ini. Indonesia harus mampu memainkan peran sebagai **penjaga stabilitas regional**, promotor dialog damai, dan advokat kerja sama multilateral yang inklusif. Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategisnya di ASEAN dan G20 untuk mendorong **tatanan dunia yang adil, damai, dan seimbang**, tanpa terperangkap dalam polarisasi geopolitik yang tajam. Rivalitas AS-Tiongkok bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan memperluas ruang gerak strategisnya di panggung global.

Konflik Rusia-Ukraina dan Geopolitik Eropa

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 merupakan titik balik besar dalam tatanan geopolitik global, khususnya di kawasan Eropa. Konflik ini menandai **eskalasi militer terbesar di benua tersebut sejak Perang Dunia II**, sekaligus mencerminkan pergeseran strategis dari era pasca-Perang Dingin yang relatif stabil menuju masa penuh ketegangan dan ketidakpastian. Lebih dari sekadar konflik bilateral, perang ini telah memicu gelombang perubahan besar dalam konfigurasi kekuatan global, dinamika aliansi, serta ekonomi dunia.

Pertama, konflik Rusia-Ukraina memperjelas **polarisasi geopolitik** antara blok Barat–yang dipimpin oleh Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa—dengan blok Eurasia yang terdiri dari Rusia dan didukung secara tidak langsung oleh Tiongkok serta sejumlah negara lain di Global South. Barat merespons invasi dengan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia, pengiriman bantuan militer ke Ukraina, dan konsolidasi kembali kekuatan NATO yang sebelumnya sempat mengalami krisis identitas. Negara-negara Eropa mempercepat penguatan pertahanan, sementara NATO memperluas keanggotaannya, termasuk Finlandia dan Swedia, yang secara historis bersikap netral.

Kedua, perang ini **mengguncang pasar energi global**, terutama Eropa yang selama ini sangat bergantung pada pasokan gas alam dari Rusia. Pemutusan hubungan energi ini memaksa negara-negara Eropa melakukan diversifikasi sumber energi, mempercepat transisi ke energi terbarukan, dan menjalin kerja sama baru dengan negara produsen lain, seperti Norwegia, Qatar, dan Amerika Serikat. Ketergantungan yang sebelumnya dianggap strategis kini berubah menjadi kerentanan, yang mengilhami kebijakan energi yang lebih resilien dan berorientasi jangka panjang.

Ketiga, konflik turut berkontribusi pada **krisis pangan dan inflasi global**. Ukraina dan Rusia merupakan pemasok utama gandum, jagung, dan pupuk bagi dunia. Blokade pelabuhan, gangguan logistik, dan sanksi perdagangan menyebabkan lonjakan harga bahan pangan dan pupuk, yang sangat berdampak pada negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Asia Selatan. Fenomena ini menambah tekanan terhadap stabilitas sosial-ekonomi di berbagai wilayah dunia.

Bagi kawasan **Asia dan negara-negara *Global South***, konflik Rusia-Ukraina menunjukkan **keterbatasan sistem keamanan kolektif internasional**. Ketidakmampuan PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk menghentikan konflik ini menggarisbawahi lemahnya efektivitas multilateralisme dalam menghadapi agresi bersenjata. Negara-negara berkembang dihadapkan pada dilema: apakah harus berpihak pada salah satu blok kekuatan, atau tetap bersikap netral sambil memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri.

Indonesia, sebagai negara non-blok dan anggota aktif G20 serta ASEAN, dapat memainkan peran sebagai **penjembatan komunikasi antar-blok**. Dalam konteks global yang terfragmentasi, diplomasi Indonesia harus mendorong pendekatan berbasis dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan kemanusiaan. Pengalaman Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan keberhasilannya menjadi tuan rumah G20 tahun 2022 memberi kredibilitas untuk tampil sebagai aktor strategis dalam mendorong perdamaian dan tatanan dunia yang lebih adil. Perang di Eropa memberi pelajaran penting: **tanpa arsitektur keamanan global yang inklusif dan efektif, dunia akan terus berada dalam bayang-bayang instabilitas.**

Indo-Pasifik: Panggung Geopolitik Baru

Kawasan Indo-Pasifik telah menjelma menjadi **epicentrum geopolitik dan geoekonomi** dunia pada abad ke-21. Perubahan dinamika global, yang sebelumnya berfokus pada kawasan Atlantik, kini bergeser ke wilayah ini, mendorong aktor-aktor besar dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, dan bahkan Uni Eropa untuk menetapkan strategi khusus demi memperkuat kehadiran dan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik.

Letak strategis Indo-Pasifik menjadikannya jalur vital bagi perdagangan maritim global. Sekitar **60% perdagangan dunia melewati Laut China Selatan**, menjadikannya titik krusial dalam rantai pasok internasional. Setiap gangguan di wilayah ini, seperti konflik teritorial atau insiden militer, akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global. Karena itu, berbagai inisiatif keamanan maritim dan kebebasan navigasi terus digaungkan, termasuk oleh negara-negara di luar kawasan yang memiliki kepentingan strategis.

Persaingan geopolitik di Indo-Pasifik semakin intensif, **terutama antara Amerika Serikat dan Tiongkok**. Amerika Serikat, melalui strategi *Indo-Pacific Free and Open* (FOIP), membangun aliansi dengan Jepang, Australia, India (melalui Quad), serta membentuk kemitraan baru seperti AUKUS dengan Australia dan Inggris. Di sisi lain, Tiongkok mengedepankan inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) dan memperkuat pengaruhnya lewat jalur diplomasi ekonomi, investasi infrastruktur, serta modernisasi militer. Indo-Pasifik pun menjadi **medan strategis** dalam rivalitas dua kekuatan global ini–baik dalam hal militer, teknologi, maupun pengaruh normatif.

Namun, Indo-Pasifik bukan semata-mata arena perebutan kekuatan eksternal. Kawasan ini juga dihuni oleh **negara-negara *emerging powers*** seperti India, Indonesia, Vietnam, dan Filipina, yang memiliki kepentingan dan aspirasi nasional masing-masing. Negara-negara ini tidak selalu mengikuti garis

kepentingan kekuatan besar, dan lebih memilih kebijakan luar negeri yang otonom serta pragmatis. Indonesia, misalnya, mendorong konsep *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang menekankan **inklusivitas, kerja sama ekonomi, dan stabilitas kawasan** tanpa keberpihakan pada rivalitas geopolitik.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya **arsitektur keamanan dan kerja sama ekonomi yang inklusif** di kawasan Indo-Pasifik. Ketergantungan yang tinggi antarnegara dalam rantai pasok regional, tantangan bersama seperti perubahan iklim dan keamanan siber, serta kepentingan akan perdamaian jangka panjang menjadi dasar bagi pembangunan platform kolaboratif yang terbuka dan saling menghormati.

Tantangan terbesar ke depan adalah **menghindari jebakan rivalitas kekuatan besar** yang dapat mengarah pada konflik terbuka dan memecah stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, diplomasi regional—terutama yang digerakkan ASEAN—harus memainkan peran sentral dalam menciptakan keseimbangan kepentingan dan menjaga harmoni.

Sebagai salah satu negara utama di kawasan, **Indonesia memiliki peluang besar** untuk memainkan peran sebagai penyeimbang strategis (*honest broker*) melalui diplomasi aktif, penguatan institusi regional, serta pembangunan kepercayaan antarnegara. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kerja sama, Indo-Pasifik dapat menjadi **panggung pertumbuhan bersama**, bukan arena konflik yang merugikan semua pihak.

BRICS dan *Belt and Road Initiative* (BRI)

Dalam konteks pergeseran tatanan global dari unipolar menuju multipolar, kelompok **BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan)** serta inisiatif ***Belt and Road Initiative*** **(BRI)** yang dipimpin Tiongkok, menjadi elemen penting dalam konfigurasi kekuatan dunia saat ini. Kedua

entitas ini mencerminkan upaya negara-negara berkembang dan kekuatan baru untuk **menantang dominasi Barat**, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, dalam sistem ekonomi dan politik global.

BRICS awalnya dibentuk sebagai forum konsultatif negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi besar namun bukan bagian dari blok Barat. Kini, BRICS telah berevolusi menjadi **platform geopolitik dan geoekonomi** yang signifikan. Dengan jumlah populasi yang mewakili lebih dari 40% penduduk dunia dan kontribusi ekonomi global yang terus meningkat, BRICS menyuarakan pentingnya **tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan merepresentasikan kepentingan Global South**.

Salah satu pencapaian utama BRICS adalah pendirian ***New Development Bank*** **(NDB)** yang dimaksudkan sebagai alternatif terhadap lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, yang dinilai terlalu dikendalikan oleh negara-negara Barat. Selain itu, isu **dedolarisasi** menjadi fokus penting—anggota BRICS mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam sistem keuangan internasional.

Sementara itu, ***Belt and Road Initiative*** **(BRI)** adalah proyek global mega strategis yang diinisiasi oleh Tiongkok sejak 2013. Melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jalur kereta api, dan jaringan energi lintas negara, BRI bertujuan menciptakan **konektivitas ekonomi global yang dipusatkan pada Tiongkok**. Hingga kini, lebih dari **140 negara telah menandatangani kerja sama dalam kerangka BRI**, termasuk negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, bahkan Eropa Timur.

Namun BRI bukan hanya proyek ekonomi; ia memiliki **dimensi geopolitik yang kuat**. Melalui investasi dan pendanaan proyek infrastruktur, Tiongkok secara perlahan membangun ketergantungan ekonomi jangka panjang, sekaligus memperluas pengaruh politik dan strategisnya. Hal ini

memunculkan kekhawatiran di beberapa negara mengenai **jebakan utang (*debt trap*), kurangnya transparansi proyek, dan potensi hilangnya kedaulatan atas aset strategis**.

Bagi **Indonesia**, keterlibatan dalam BRI membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia dapat memanfaatkan investasi Tiongkok untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti kereta cepat, pelabuhan, dan kawasan industri. Proyek-proyek ini bisa memperkuat konektivitas nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia harus **berhati-hati dalam memastikan bahwa kerja sama dalam BRI tidak merugikan kepentingan nasional**. Isu seperti beban utang luar negeri, ketergantungan teknologi dan tenaga kerja asing, serta keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat posisi tawar melalui negosiasi yang transparan, pengawasan proyek yang ketat, serta strategi diplomasi ekonomi yang berimbang.

Pada akhirnya, keterlibatan dalam BRICS dan BRI harus dilihat sebagai bagian dari **strategi adaptif Indonesia dalam tatanan multipolar**, untuk memaksimalkan manfaat globalisasi sambil tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional secara berkelanjutan.

Tantangan Regionalisme Baru: AUKUS dan Dinamika ASEAN

Kemunculan aliansi pertahanan **AUKUS** (Australia, *United Kingdom*, dan *United States*) pada tahun 2021 menjadi simbol penting dari transformasi regionalisme dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. AUKUS bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas militer di antara anggotanya, serta secara strategis menyeimbangkan pengaruh dan dominasi Tiongkok, khususnya dalam bidang **teknologi pertahanan canggih** seperti kapal selam nuklir, kecerdasan buatan (AI) untuk militer, serta kemampuan siber.

Pembentukan AUKUS mencerminkan perubahan tajam dalam arsitektur keamanan kawasan yang sebelumnya lebih bersifat terbuka dan inklusif, menuju ke arah yang lebih **eksklusif dan berbasis blok kekuatan**.

Keberadaan AUKUS menimbulkan kekhawatiran di sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengenai potensi **perlombaan senjata** di kawasan dan dampaknya terhadap stabilitas jangka panjang. Meskipun AUKUS diklaim bukan aliansi militer konvensional seperti NATO, keberadaannya secara de facto meningkatkan **militerisasi kawasan Indo-Pasifik**, yang dapat memicu ketegangan baru dan memperumit diplomasi regional.

Sementara itu, di sisi lain spektrum regionalisme, peran **ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*)** sebagai motor perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik menghadapi tantangan besar. Sejak berdirinya, ASEAN telah dikenal dengan prinsip **non-intervensi, musyawarah, dan konsensus**, serta berupaya menjaga posisinya sebagai poros (*centrality*) dalam dinamika kawasan. Namun, di tengah meningkatnya rivalitas global, kapasitas ASEAN dalam menjaga relevansi dan efektivitasnya mulai dipertanyakan.

Salah satu tantangan utama adalah **perpecahan internal** dalam menyikapi isu-isu strategis seperti krisis Myanmar, agresivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan, serta dinamika global yang menyeret negara-negara ASEAN ke dalam orbit pengaruh kekuatan besar. Perbedaan kepentingan politik, ekonomi, dan orientasi luar negeri antarnegara anggota menyebabkan **respon ASEAN tidak selalu kompak dan efektif**, sehingga mengurangi kredibilitasnya sebagai aktor utama regional.

Di samping itu, ASEAN juga menghadapi tekanan eksternal dari negara-negara besar yang ingin **memanfaatkan ASEAN sebagai *proxy* pengaruh geopolitik**. Dalam kondisi seperti ini, ASEAN berisiko kehilangan otonomi strategisnya dan hanya menjadi forum simbolik tanpa dampak nyata terhadap stabilitas kawasan.

Meski demikian, ASEAN masih tetap relevan sebagai **platform dialog dan kerja sama multilateral**. Inisiatif seperti ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) menunjukkan keinginan ASEAN untuk tetap menjadi arsitek utama kawasan yang inklusif dan berbasis aturan. Namun, untuk mempertahankan "*centrality*"-nya, ASEAN perlu melakukan reformasi internal, meningkatkan kohesi antar anggota, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan respons terhadap krisis.

Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara kunci di ASEAN, tantangan ini membuka ruang untuk tampil sebagai **pemimpin regional** yang mampu menjembatani kepentingan antar blok dan mendorong ASEAN menjadi lebih adaptif, visioner, dan strategis di tengah perubahan konstelasi geopolitik yang dinamis.

Implikasi Bagi Indonesia

Perubahan lanskap geopolitik global dari unipolar menuju multipolar membawa dampak signifikan bagi Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi prinsip **politik luar negeri bebas aktif**. Dalam konteks rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta dinamika baru di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dihadapkan pada tantangan dan peluang strategis yang memerlukan respons cerdas dan adaptif.

Pertama, **menjaga kedaulatan dan netralitas aktif** menjadi tantangan utama. Indonesia harus mampu menyeimbangkan hubungan dengan kedua kekuatan besar tanpa terjebak dalam orbit salah satu pihak. Ini membutuhkan konsistensi dalam prinsip nonblok serta kebijakan luar negeri yang berfokus pada kepentingan nasional dan perdamaian regional. Dalam situasi seperti ini, posisi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN juga menuntut kemampuan untuk menjadi penengah dan penjaga stabilitas, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti Laut China Selatan dan ketegangan di Selat Taiwan.

Kedua, Indonesia perlu **meningkatkan ketahanan nasional**, khususnya dalam sektor ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Ketahanan ekonomi harus dibangun melalui diversifikasi mitra dagang dan investasi, penguatan sektor strategis domestik, serta peningkatan daya saing nasional. Di bidang pertahanan, pembangunan kekuatan militer yang andal, modernisasi alutsista, serta peningkatan kapasitas siber dan intelijen menjadi krusial untuk menghadapi ancaman asimetris dan dinamika kawasan yang kian kompleks. Selain itu, penguasaan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, energi hijau, dan transformasi digital menjadi elemen penting dalam memastikan kemandirian dan daya saing jangka panjang.

Ketiga, **memperkuat diplomasi multilateral** adalah strategi yang harus terus dikembangkan. Indonesia memiliki posisi unik sebagai anggota G20, ASEAN, dan berbagai forum internasional lainnya. Peran ini harus dimanfaatkan untuk mendorong tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berbasis aturan. Selain itu, kerja sama **Selatan-Selatan** perlu diperluas sebagai bagian dari upaya menciptakan aliansi strategis dengan negara-negara berkembang lain yang memiliki kepentingan serupa dalam menghadapi dominasi kekuatan besar.

Keempat, Indonesia dituntut untuk **meningkatkan kapasitas intelijen geopolitik dan diplomasi strategis**. Ini mencakup kemampuan untuk membaca arah perkembangan global secara akurat, memahami dinamika kekuatan, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman sejak dini. Pendekatan ini harus berbasis pada pemikiran strategis jangka panjang, penguatan SDM diplomatik, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah, militer, akademisi, dan sektor swasta.

Dalam menghadapi era multipolar yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar prinsip, melainkan strategi operasional yang dinamis. Sebagai negara demokratis dengan populasi besar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi **penyeimbang kekuatan**

(***balancer***), **jembatan antar-blok**, sekaligus **promotor stabilitas kawasan**. Peran ini harus dijalankan dengan kecermatan, kemandirian, dan keberanian untuk menavigasi geopolitik global demi melindungi dan memajukan kepentingan nasional.

Penutup

Lanskap geopolitik global saat ini sedang berada dalam fase perubahan yang signifikan, ditandai dengan pergeseran kekuatan, kompetisi antarhegemon, serta fragmentasi regional yang semakin mendalam. Sejak runtuhnya tatanan dunia unipolar yang didominasi oleh Amerika Serikat pasca-Perang Dingin, dunia kini memasuki tatanan multipolar yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan baru. Pergeseran ini membawa berbagai isu kompleks seperti rivalitas ideologi, konflik bersenjata yang semakin meluas, dan diplomasi ekonomi yang semakin agresif, terutama antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia.

Perubahan ini menghadirkan tantangan yang besar bagi negara-negara, termasuk Indonesia, yang harus mampu merespons dinamika ini secara cermat dan adaptif. Indonesia, dengan segala potensinya sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan kawasan dan memperkuat posisi geopolitiknya di dunia internasional. Untuk itu, Indonesia harus memanfaatkan prinsip **diplomasi bebas dan aktif**, yang memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan dan kepentingannya tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.

Salah satu langkah yang perlu diambil adalah dengan memperkuat **ketahanan nasional** melalui peningkatan kapasitas di berbagai bidang strategis, seperti ekonomi, pertahanan, teknologi, dan diplomasi. Di bidang ekonomi, Indonesia harus terus mengembangkan daya saingnya dengan memperluas pasar, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan memanfaatkan peluang di pasar global. Di sisi pertahanan, Indonesia perlu memperkuat

kekuatan militer dengan alutsista yang canggih dan kemampuan siber yang handal. Selain itu, pengembangan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ketahanan negara di era digital.

Tidak hanya itu, Indonesia juga perlu memperkuat posisi diplomatiknya melalui **diplomasi multilateral** dan kerja sama internasional. Sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membangun arsitektur keamanan dan kerja sama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik, serta memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang melalui platform seperti Forum Kerja sama Selatan-Selatan. Ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompleks.

Indonesia juga harus terus meneguhkan peranannya sebagai **penyeimbang kekuatan** yang mampu menjaga stabilitas kawasan dan memainkan peran konstruktif dalam menyelesaikan konflik regional. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjadi mediator yang dipercaya dalam berbagai forum internasional, baik itu di ASEAN, G20, maupun di PBB.

Dengan terus memelihara prinsip **bebas dan aktif**, Indonesia dapat menavigasi lanskap geopolitik yang semakin penuh tantangan ini. Dengan memperkuat posisinya di ASEAN dan memperluas kerja sama dengan negara-negara global Selatan, Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan stabil. Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045** dalam dunia yang semakin kompleks dan multipolar, serta menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

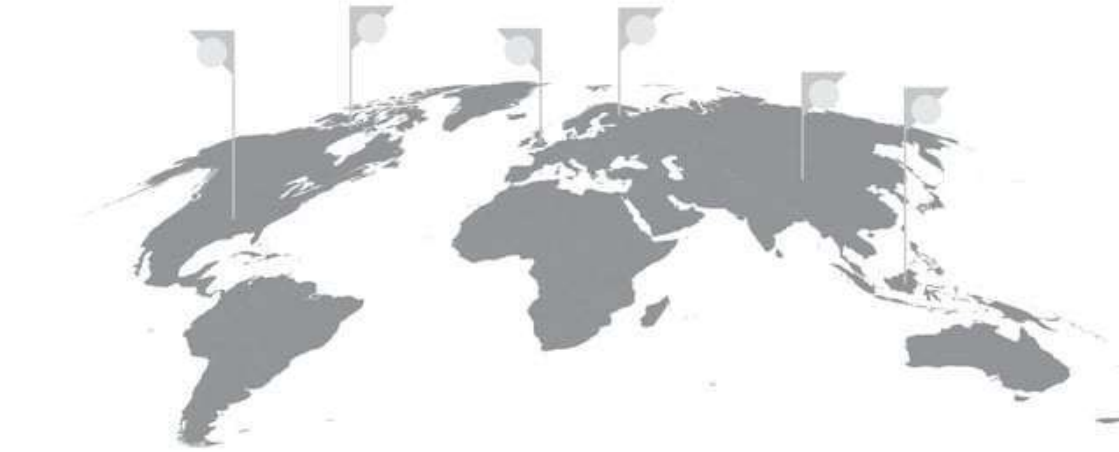

Bab 5 Ancaman dan Risiko Global terhadap Ketahanan Nasional

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin terkoneksi, ketahanan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal suatu negara, tetapi juga sangat tergantung pada dinamika eksternal yang kompleks dan sering kali tak terduga. Perubahan yang terjadi di tingkat global, baik dalam bidang politik, ekonomi, teknologi, maupun sosial, dapat memberikan dampak langsung terhadap stabilitas dan daya tahan suatu negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di pusat jalur perdagangan internasional, tidak dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh eksternal ini. Dalam hal ini, ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia semakin beragam dan tidak lagi terbatas pada masalah-masalah tradisional seperti perang atau serangan fisik, melainkan juga mencakup ancaman yang bersifat multidimensional dan lintas batas.

Berbagai ancaman global yang kini dihadapi oleh Indonesia memiliki karakter yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Ancaman-ancaman ini, seperti konflik bersenjata antarnegara, kejahatan transnasional, kejahatan siber, ekstremisme ideologis, polarisasi politik, dan perubahan iklim, menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Konflik bersenjata antarnegara, misalnya, tidak hanya membahayakan stabilitas kawasan, tetapi juga dapat mengganggu jalur perdagangan dan merusak ekonomi Indonesia yang bergantung pada perdagangan internasional. Kejahatan transnasional, termasuk perdagangan narkoba, terorisme, dan penyelundupan manusia, telah menjadi ancaman nyata yang merusak ketertiban sosial dan stabilitas politik di dalam negeri.

Selain itu, kejahatan siber yang semakin meningkat, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, menjadi ancaman serius yang tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada keamanan data dan informasi nasional. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang dan mempercepat transformasi digital, harus siap menghadapi potensi ancaman terhadap infrastruktur kritis dan sistem pemerintahan yang semakin bergantung pada teknologi.

Ekstremisme ideologis, baik yang bersifat politik, agama, maupun sosial, juga menjadi salah satu ancaman yang tidak bisa diabaikan. Radikalisasi yang berkembang dengan cepat, terutama di kalangan generasi muda, dapat mengarah pada disintegrasi sosial dan ancaman terhadap ideologi negara Pancasila. Selain itu, polarisasi politik yang semakin tajam dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Perubahan iklim juga menjadi ancaman global yang semakin mendesak. Dampak dari perubahan iklim yang berupa bencana alam, peningkatan suhu global, dan naiknya permukaan air laut dapat memperburuk ketahanan pangan, memperburuk kualitas hidup, serta menyebabkan kerusakan ekologis yang dapat mengancam mata pencaharian jutaan rakyat Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

Tak kalah pentingnya, guncangan ekonomi global yang disebabkan oleh volatilitas pasar, krisis finansial, atau dampak dari ketegangan geopolitik juga dapat memengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia. Negara yang terbuka dan bergantung pada perdagangan internasional ini rentan terhadap perubahan-perubahan dalam pasar global yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik.

Bab ini akan membahas secara mendalam bentuk-bentuk ancaman dan risiko global tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional Indonesia. Pemahaman yang lebih baik tentang tantangan-tantangan ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat menjaga ketahanan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan dinamika global yang terus berkembang.

Konflik Bersenjata dan Ketegangan Geopolitik

Salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas global saat ini adalah meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi menyebabkan konflik bersenjata terbuka antarnegara. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan eskalasi ketegangan yang signifikan, terutama melalui konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada 2022, serta ketegangan yang terus meningkat di kawasan Indo-Pasifik, khususnya terkait dengan isu Taiwan dan Laut China Selatan. Konflik-konflik ini menunjukkan bahwa potensi konflik konvensional antarnegara belum sepenuhnya hilang, dan situasi global saat ini menambah ketidakpastian mengenai stabilitas kawasan-kawasan tersebut.

Konflik Rusia-Ukraina telah mengubah tatanan geopolitik Eropa dan dunia, memicu polarisasi antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutu, serta Rusia yang mendapatkan dukungan terbatas dari beberapa negara besar lainnya. Di sisi lain, ketegangan di Indo-Pasifik, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok terkait dengan isu Taiwan

dan Laut China Selatan, semakin memanaskan situasi di kawasan ini. Ketegangan ini melibatkan pertarungan pengaruh antara kekuatan besar, yang berpotensi memicu konflik terbuka jika tidak dikelola dengan hati-hati. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik-konflik ini, dampaknya sangat besar terhadap ketahanan nasional dan stabilitas kawasan.

Bagi Indonesia, konflik-konflik bersenjata global ini memiliki beberapa implikasi strategis yang harus diperhitungkan dengan saksama. Salah satunya adalah potensi ancaman terhadap keamanan wilayah perbatasan, terutama di Natuna dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur perdagangan internasional, Indonesia rentan terhadap potensi gesekan dan klaim teritorial dari negara-negara besar yang terlibat dalam ketegangan geopolitik. Dalam kasus Laut Cina Selatan, misalnya, klaim yang tumpang tindih antara Tiongkok dan negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia, dapat memicu ketegangan di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat postur pertahanan di wilayah perbatasan dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN serta mitra internasional dalam menjaga stabilitas maritim.

Selain itu, eskalasi konflik global juga dapat berdampak pada stabilitas perdagangan dan logistik internasional. Indonesia, sebagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan global, sangat rentan terhadap gangguan dalam jalur pasokan global yang dapat disebabkan oleh konflik bersenjata. Ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan, misalnya, dapat memengaruhi jalur pelayaran yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa dan Amerika. Gangguan terhadap jalur-jalur perdagangan ini dapat berimbas langsung pada ekonomi domestik Indonesia, termasuk menyebabkan lonjakan harga barang, gangguan pasokan energi, dan merugikan sektor-sektor industri yang bergantung pada perdagangan internasional.

Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik juga dapat mendorong Indonesia untuk meningkatkan anggaran pertahanannya guna menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Kenaikan anggaran ini, meskipun penting untuk memperkuat postur pertahanan, dapat memengaruhi pengalokasian anggaran negara untuk sektor-sektor sosial yang penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang hati-hati antara peningkatan pengeluaran pertahanan dengan kebutuhan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia harus memprioritaskan strategi diplomasi aktif yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat kerja sama internasional. Di samping itu, pembangunan postur pertahanan yang tangguh dan modern juga menjadi keharusan untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat.

Kejahatan Transnasional: Terorisme, Narkotika, dan Perdagangan Manusia

Kejahatan transnasional (*transnational organized crimes*) telah menjadi ancaman serius yang tidak mengenal batas negara dan dapat mengikis ketahanan sosial serta hukum suatu negara. Kejahatan ini melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir di berbagai negara dan memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada stabilitas internal negara, tetapi juga pada hubungan internasional. Bagi Indonesia, tiga bentuk utama kejahatan transnasional yang sangat krusial untuk ditangani adalah terorisme internasional, perdagangan narkotika, dan perdagangan manusia.

Terorisme Internasional

Terorisme internasional menjadi ancaman yang sangat nyata di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jaringan terorisme global seperti ISIS dan afiliasinya terus berusaha untuk memperluas pengaruhnya dengan

menjadikan Asia Tenggara sebagai basis operasi baru. Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dan sebagai negara dengan sejarah serangan teroris, menjadi target potensial. Serangan terorisme yang terjadi di masa lalu, seperti bom Bali 2002 dan serangan-serangan lainnya, menunjukkan betapa bahayanya ancaman ini. Selain itu, radikalisasi yang terjadi melalui media sosial menambah tantangan baru dalam memerangi ekstremisme. Ideologi teroris yang menyebar melalui platform digital sering kali menyasar kalangan muda yang mudah terpengaruh, sehingga menjadikannya sebagai tantangan serius bagi upaya kontra-terorisme Indonesia.

Perdagangan Narkotika

Perdagangan narkotika menjadi ancaman besar bagi Indonesia, yang berfungsi sebagai pasar dan jalur transit utama untuk sindikat narkoba internasional. Narkotika bukan hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan masalah sosial dan kriminal yang lebih luas. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi peredaran narkoba yang kian meningkat, yang melibatkan jaringan internasional yang kuat dan terorganisir. Maraknya peredaran narkotika telah menimbulkan dampak buruk pada generasi muda, merusak struktur sosial, serta menyebabkan korupsi di lembaga penegak hukum. Upaya pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara sistematis, dengan memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum domestik dan internasional.

Perdagangan Manusia dan Migrasi Ilegal

Perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan dan anak, adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dan sulit diawasi. Indonesia merupakan sumber, transit, dan tujuan utama dalam perdagangan manusia, dengan banyaknya kasus *trafficking* melalui jalur laut dan darat. Korban perdagangan manusia sering kali dijadikan buruh paksa, pekerja seks komersial, atau diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi lainnya. Selain itu, krisis migrasi yang melibatkan pengungsi dan migran ilegal juga

berpotensi menciptakan instabilitas di wilayah perbatasan Indonesia, serta memperburuk citra internasional negara. Implikasi sosial dan hukum dari perdagangan manusia tidak hanya merusak individu, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan antarnegara.

Penanganan Kejahatan Transnasional

Menghadapi kejahatan transnasional membutuhkan sinergi yang erat antara institusi domestik Indonesia, seperti kepolisian, militer, dan badan intelijen, serta kerja sama yang lebih intensif dengan lembaga-lembaga internasional. Kerja sama dalam bidang intelijen, penguatan hukum, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum di tingkat domestik harus diutamakan. Selain itu, Indonesia perlu aktif dalam forum internasional untuk memperkuat mekanisme hukum dan kerja sama transnasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara ini. Tindakan preventif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perbaikan sistem hukum domestik juga menjadi bagian penting dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional secara menyeluruh.

Kejahatan Siber dan Disinformasi Digital

Di era digital yang semakin berkembang, ancaman siber dan disinformasi digital telah menjadi medan baru konflik non-fisik yang memiliki potensi kerusakan besar bagi negara. Serangan siber dapat menargetkan berbagai sistem vital, mulai dari sistem keuangan, data pemerintah, hingga infrastruktur kritis seperti jaringan listrik dan layanan kesehatan. Pada saat yang sama, penyebaran disinformasi dan propaganda melalui media digital dapat merusak kohesi sosial-politik, memperburuk polarisasi masyarakat, dan bahkan mengancam demokrasi.

Kejahatan Siber: Ancaman terhadap Infrastruktur Nasional

Kejahatan siber merupakan ancaman yang semakin nyata bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia maya telah menjadi sarana yang digunakan oleh kelompok peretas, individu, dan negara-negara untuk melancarkan serangan yang dapat merusak sistem vital. Infrastruktur kritis, termasuk sistem keuangan, jaringan listrik, komunikasi, dan transportasi, sangat rentan terhadap serangan yang dapat merusak kestabilan ekonomi dan sosial negara. Indonesia, sebagai negara dengan perkembangan teknologi yang pesat, harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan siber di sektor publik maupun swasta.

Selain itu, serangan siber yang menyasar data-data sensitif milik pemerintah dan perusahaan besar dapat menyebabkan kebocoran informasi yang merugikan. Dalam konteks ini, masih terdapat banyak kelemahan dalam sistem pertahanan siber Indonesia, baik di sektor pemerintahan maupun sektor privat. Minimnya *cyber resilience*, atau ketahanan terhadap ancaman siber, membuat Indonesia rentan terhadap potensi serangan yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi.

Disinformasi Digital: Ancaman terhadap Kohesi Sosial

Selain ancaman siber, penyebaran disinformasi melalui platform media sosial juga menjadi masalah besar bagi Indonesia. Hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi digital dapat dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat, menciptakan polarisasi politik dan sosial yang semakin tajam. Penyebaran informasi palsu sering kali digunakan untuk memperburuk ketegangan antar kelompok, merusak reputasi individu atau lembaga, dan bahkan menghasut kekerasan. Dalam konteks pemilu dan politik, disinformasi dapat merusak proses demokrasi, memanipulasi opini publik, serta memengaruhi hasil pemilihan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan tingkat pengguna media sosial yang tinggi, menjadi pasar subur bagi penyebaran hoaks dan berita palsu. Kecepatan dan jangkauan media sosial dalam menyebarkan informasi membuat upaya untuk mengendalikan disinformasi semakin sulit. Di samping itu, ujaran kebencian dan provokasi digital yang tersebar di dunia maya dapat merusak kohesi sosial masyarakat, memicu ketegangan antar kelompok, dan mengancam stabilitas politik.

Kerentanan Sistem Pemilu dan Layanan Digital

Selain itu, kerentanan dalam sistem pemilu, layanan digital pemerintah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap peretasan juga menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia. Pemilu yang dijalankan secara elektronik, meskipun menawarkan kemudahan, juga membuka celah bagi peretasan dan manipulasi data. Serangan siber yang mengarah pada pengubahan hasil pemilu atau gangguan dalam sistem pemilihan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi negara. Demikian juga, BUMN yang semakin bergantung pada teknologi digital, jika tidak dijaga dengan baik, dapat menjadi sasaran empuk bagi peretas yang ingin mengekspos data sensitif atau merusak operasional perusahaan.

Strategi Keamanan Siber dan Literasi Digital

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat strategi nasional dalam bidang keamanan siber dan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Penguatan infrastruktur keamanan siber, peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi, serta pengembangan regulasi yang mengatur tentang keamanan data dan privasi harus menjadi prioritas. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital, khususnya terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi hoaks dan disinformasi, sangat penting untuk menjaga ketahanan sosial-politik. Pemerintah, bersama sektor swasta dan masyarakat, harus bekerja sama untuk membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan inklusif.

Ekstremisme dan Polarisasi Politik

Ekstremisme ideologis, baik dari sisi kanan (konservatif radikal) maupun kiri (anarkis), telah menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini telah berkembang pesat, memperburuk ketegangan sosial-politik, dan menciptakan tantangan besar bagi stabilitas negara. Di Indonesia, masalah ini semakin diperparah oleh polarisasi politik pasca pemilu yang terjadi di berbagai level, terutama melalui media sosial dan wacana publik. Fenomena ini menambah lapisan kompleksitas dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia, baik dari sisi ideologi, sosial, maupun budaya.

Ekstremisme Ideologis dan Dampaknya

Ekstremisme ideologis muncul ketika kelompok tertentu, baik dari pihak konservatif radikal maupun kelompok dengan pandangan kiri yang ekstrem, menuntut perubahan drastis dan kadang-kadang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Di Indonesia, meskipun gerakan-gerakan ini mungkin masih marginal, penyebarannya melalui media sosial dan kelompok-kelompok tertentu dapat memengaruhi pola pikir generasi muda dan memperburuk ketegangan sosial. Kelompok-kelompok ini sering kali memanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama, etnisitas, dan identitas politik untuk membangkitkan emosi dan menciptakan polarisasi yang mendalam.

Di sisi lain, polarisasi politik pasca pemilu juga telah memperburuk keadaan. Ketika suhu politik meningkat, terutama melalui perdebatan di media sosial, masyarakat mulai terbagi menjadi dua kelompok besar yang saling menyalahkan dan mencurigai satu sama lain. Hal ini bukan hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga merusak solidaritas sosial, dengan semakin sedikitnya ruang untuk diskusi yang sehat dan konstruktif antar kelompok yang berbeda pandangan. Polarisasi ini memperburuk rasa ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan sistem demokrasi, yang merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dampak terhadap Ketahanan Nasional

Dampak dari ekstremisme ideologis dan polarisasi politik terhadap ketahanan nasional sangat signifikan. Salah satu dampak utama adalah pelemahan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika masyarakat terpecah oleh perbedaan ideologi yang tajam, kepercayaan terhadap pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sistem politik secara umum dapat menurun drastis. Hal ini dapat mengganggu efektivitas kebijakan publik, memperburuk kondisi sosial, dan meningkatkan potensi ketidakstabilan.

Disintegrasi sosial juga merupakan ancaman nyata. Narasi eksklusivisme identitas yang dibawa oleh ekstremisme dan polarisasi politik dapat mendorong segregasi sosial dan menciptakan ruang bagi ketegangan antar kelompok. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi konflik horizontal, yang lebih berbahaya ketika suhu politik sedang memanas. Di Indonesia, yang memiliki keberagaman etnis, agama, dan budaya, potensi konflik ini sangat besar jika tidak ada upaya serius untuk menjaga kerukunan antar kelompok.

Upaya Membangun Ketahanan Ideologi dan Sosial Budaya

Menghadapi tantangan ini, penting untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pancasila yang mengajarkan tentang kesatuan, toleransi, dan saling menghargai antarsesama, perlu menjadi pegangan dalam menghadapi ekstremisme ideologis. Moderasi beragama juga harus diperkuat, dengan menekankan pentingnya sikap moderat yang menghindari pandangan ekstrem yang bisa memecah belah bangsa. Selain itu, peran aktif tokoh masyarakat, ulama, dan pemimpin lokal dalam membangun dialog antar kelompok sangat diperlukan untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah eskalasi konflik. Mereka harus menjadi jembatan dalam menciptakan ruang untuk toleransi, pengertian, dan kebersamaan di tengah keberagaman Indonesia.

Pendidikan politik yang berlandaskan pada demokrasi yang sehat, nilai-nilai kebangsaan, dan penguatan literasi sosial juga penting untuk membentuk masyarakat yang kritis, namun tetap menghargai perbedaan. Jika ketiga aspek ini dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan baik, Indonesia dapat mengurangi dampak buruk dari ekstremisme ideologis dan polarisasi politik, serta menjaga ketahanan nasional yang kokoh.

Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Perubahan iklim global merupakan salah satu ancaman yang semakin nyata dan membawa dampak yang luas terhadap kehidupan nasional, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan tropis, Indonesia sangat rentan terhadap efek negatif dari perubahan iklim yang dapat mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak perubahan iklim tersebut dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan, mulai dari pertanian, perikanan, hingga ketahanan energi dan infrastruktur. Oleh karena itu, perubahan iklim harus dipandang sebagai ancaman yang memerlukan respons cepat dan strategi mitigasi yang terintegrasi dalam kerangka ketahanan nasional Indonesia.

Naiknya Permukaan Laut dan Ancaman Wilayah Pesisir

Salah satu dampak paling signifikan dari perubahan iklim adalah naiknya permukaan laut yang mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari daerah pesisir yang padat penduduk, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub dan pemanasan global dapat mengakibatkan banjir rob yang semakin meluas. Wilayah pesisir yang rendah dan pulau-pulau kecil sangat rentan tenggelam atau mengalami erosi, yang dapat mengancam tempat tinggal bagi jutaan orang, serta merusak infrastruktur vital seperti pelabuhan, jalan raya, dan fasilitas industri.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga berpotensi menciptakan migrasi internal yang besar, di mana masyarakat yang terimbas akan mencari tempat tinggal yang lebih aman. Hal ini bisa menambah tekanan pada kota-kota besar dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam negeri.

Bencana Hidrometeorologi yang Makin Intens

Indonesia juga sering menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang lebih ekstrem dan tidak terduga, memperburuk intensitas dan frekuensi bencana alam ini. Banjir yang melanda kota-kota besar akibat curah hujan tinggi sering kali menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan mengganggu kehidupan masyarakat. Selain itu, kekeringan yang berkepanjangan di beberapa wilayah menyebabkan kekurangan pasokan air bersih dan mengancam ketahanan pangan nasional, terutama bagi sektor pertanian.

Tanah longsor juga menjadi ancaman serius di daerah-daerah perbukitan yang rawan, seperti di Jawa dan Sumatra. Curah hujan yang tinggi dan perubahan penggunaan lahan sering kali memperburuk risiko longsor, yang dapat menyebabkan kerugian materiil dan bahkan korban jiwa. Semua jenis bencana ini membutuhkan sistem peringatan dini yang lebih baik dan kesiapsiagaan yang lebih matang untuk mengurangi dampak yang timbul.

Kerusakan Ekosistem dan Hilangnya Biodiversitas

Perubahan iklim juga menyebabkan kerusakan besar terhadap ekosistem alami di Indonesia, seperti hutan hujan tropis, terumbu karang, dan mangrove. Meningkatnya suhu permukaan laut menyebabkan terumbu karang mengalami pemutihan massal, yang mengancam kehidupan biota laut dan ketahanan pangan bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada

hasil laut. Selain itu, deforestasi dan perusakan habitat alami lainnya memperburuk dampak perubahan iklim, mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida dan merusak keanekaragaman hayati.

Pengaruh negatif terhadap ekosistem juga berhubungan erat dengan ketahanan pangan dan air. Degradasi lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim memperburuk masalah akses terhadap sumber daya alam yang dibutuhkan untuk pertanian dan konsumsi air bersih, yang semakin penting bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Tantangan dan Respons Indonesia

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih terintegrasi dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Salah satu langkah penting adalah penguatan sistem mitigasi bencana melalui perencanaan yang memperhatikan potensi bencana yang lebih sering terjadi. Selain itu, pembangunan rendah karbon yang mengurangi emisi gas rumah kaca harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Integrasi perubahan iklim dalam kebijakan ketahanan nasional juga perlu dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengurangi dampak dari ancaman perubahan iklim dan bencana alam yang semakin nyata.

Volatilitas Ekonomi Global dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Kondisi ekonomi global saat ini menghadapi tantangan besar yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Fluktuasi ekonomi global, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik, perang, konflik dagang, serta kebijakan suku bunga global yang tidak menentu, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Menghadapi

volatilitas ini, ketahanan ekonomi nasional menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman dan risiko eksternal yang dapat mengganggu perekonomian domestik.

Inflasi Global dan Krisis Pangan-Energi

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah inflasi global yang meningkat akibat lonjakan harga pangan dan energi. Ketegangan geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, menyebabkan gangguan pada pasokan bahan pangan dan energi dunia, yang berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Indonesia, sebagai negara yang bergantung pada impor sejumlah bahan pangan dan energi, menghadapi tekanan inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, beras, dan energi, dapat menyebabkan kesulitan bagi banyak rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Di sisi lain, krisis pangan dan energi ini juga meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan yang tergantung pada impor bahan baku dan energi menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan harga dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Dalam kondisi ini, kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian.

Ketergantungan terhadap Impor

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dan komoditas strategis juga merupakan tantangan dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Negara ini sangat bergantung pada impor barang seperti bahan bakar, bahan baku industri, dan barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Ketergantungan tersebut membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan yang dapat disebabkan oleh krisis internasional.

Jika ketergantungan ini tidak diatasi dengan baik, Indonesia akan semakin terjebak dalam ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, diversifikasi sektor ekonomi dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Melalui hilirisasi industri, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang dapat mengurangi dampak dari ketidakstabilan ekonomi global.

Ketidakpastian Investasi Global

Ketidakpastian di pasar investasi global juga dapat memperlambat laju pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Ketika pasar global sedang dalam keadaan tidak stabil, banyak investor cenderung menahan diri dari berinvestasi, baik di sektor real estate, industri, maupun pasar modal. Hal ini berimbas pada keterbatasan dana yang masuk untuk pembangunan infrastruktur, inovasi teknologi, dan sektor-sektor penting lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, ketidakpastian ini juga menghambat penciptaan lapangan kerja, karena sektor-sektor yang bergantung pada investasi asing mengalami perlambatan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan ramah, serta memperkuat sektor domestik agar lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global.

Strategi Memperkuat Ekonomi Domestik

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia perlu memperkuat ekonomi domestik dengan beberapa langkah strategis. Diversifikasi sektor ekonomi, termasuk pengembangan industri manufaktur, pertanian, dan teknologi, harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan pasar internasional. Selain itu, hilirisasi industri akan memberikan nilai tambah pada produk dalam negeri, meningkatkan daya saing global, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Ketahanan pangan dan energi berbasis sumber daya lokal juga perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Pengembangan energi terbarukan dan peningkatan produksi pangan domestik dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan ketahanan jangka panjang. Terakhir, reformasi fiskal dan sistem perlindungan sosial yang adaptif sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, serta memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi pasca krisis.

Dengan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, Indonesia dapat menghadapi volatilitas ekonomi global dan memastikan kestabilan ekonomi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Krisis Multilateral dan Ketidakpastian *Global Governance*

Ketidakpastian dan ketidakmampuan organisasi internasional dalam menangani krisis global dengan efektif mencerminkan terjadinya krisis dalam tata kelola global (*global governance*). Organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga internasional untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan masalah global sering kali tidak mampu merespons situasi dengan cepat dan tepat. Hal ini semakin jelas terlihat dalam krisis-krisis yang telah melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir, seperti pandemi Covid-19, perubahan iklim, serta ketegangan geopolitik.

Salah satu penyebab utama dari ketidakmampuan ini adalah fragmentasi kepentingan antara negara-negara besar yang kerap bertindak berdasarkan kepentingan nasional masing-masing, bukan melalui pendekatan bersama. Munculnya blok-blok kekuatan baru dan rivalitas antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia semakin memperumit upaya untuk mencapai konsensus dalam forum-forum internasional. Selain

itu, struktur organisasi internasional yang sudah ada sering kali dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika politik dan ekonomi global yang berubah dengan cepat.

Dalam menghadapi ketidakpastian *global governance* ini, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, harus memainkan peran yang lebih strategis di tingkat internasional. Ada beberapa langkah penting yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mendorong tata kelola global yang lebih efektif dan inklusif.

Peran Aktif dalam Forum Internasional

Indonesia harus terus memperkuat posisinya dalam forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, dan BRICS. Melalui keterlibatan yang aktif di organisasi ini, Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan menjembatani kepentingan global yang lebih luas. Misalnya, Indonesia dapat memperjuangkan masalah perubahan iklim, ketahanan pangan, dan reformasi sistem perdagangan internasional agar lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memberikan kontribusi konstruktif dalam diskusi-diskusi internasional, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan solusi atas tantangan global.

Diplomasi Global untuk Tata Kelola Inklusif dan Adil

Indonesia juga perlu mendorong diplomasi global yang berfokus pada tata kelola yang lebih inklusif dan adil. Negara-negara besar tidak boleh mendominasi keputusan-keputusan penting di tingkat internasional, sementara negara-negara kecil atau berkembang tidak memiliki suara yang setara. Diplomasi yang dijalankan Indonesia harus memperjuangkan reformasi struktur tata kelola global agar dapat lebih mencerminkan keseimbangan kepentingan antara negara-negara besar dan negara berkembang, serta menjamin adanya partisipasi aktif dari negara-negara yang kurang beruntung dalam sistem internasional.

Selain itu, Indonesia dapat mengembangkan inisiatif baru yang berfokus pada kerja sama antarnegara Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*), yang memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk saling mendukung dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas. Dengan memperkuat solidaritas antarnegara berkembang, Indonesia dapat menciptakan dampak positif dalam merespons berbagai tantangan global.

Kepemimpinan Moral yang Mencerminkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Global

Kepemimpinan Indonesia di dunia internasional harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global. Indonesia, sebagai negara yang mendasarkan politik luar negerinya pada prinsip bebas aktif, harus terus mempromosikan perdamaian, keamanan, dan keadilan global. Di tengah ketidakpastian dan ketegangan internasional, Indonesia dapat menawarkan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Kepemimpinan moral ini akan meningkatkan peran Indonesia di mata dunia dan mengarah pada terciptanya tata kelola global yang lebih efektif dan inklusif.

Secara keseluruhan, meskipun krisis global governance saat ini menunjukkan ketidakmampuan banyak organisasi internasional, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran penting dalam menciptakan tatanan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan terus mendorong diplomasi yang konstruktif, memperkuat kerja sama antarnegara, dan menjadi pemimpin moral di dunia internasional, Indonesia dapat membantu mengatasi krisis tata kelola global yang sedang berlangsung.

Penutup

Ketahanan nasional Indonesia dihadapkan pada tantangan nyata dari dinamika dan ancaman global yang berkembang sangat cepat dan tidak terduga. Berbagai faktor eksternal seperti konflik bersenjata, kejahatan transnasional, *cyber crime*, ekstremisme, polarisasi politik, perubahan iklim, hingga guncangan ekonomi global, semuanya merupakan variabel yang saling berinteraksi dan memperkuat kerentanan nasional. Tanpa upaya yang tepat, ancaman-ancaman ini dapat merusak stabilitas dan integritas Indonesia sebagai negara.

Dalam menghadapi kompleksitas ancaman ini, Indonesia perlu mengembangkan ketahanan nasional yang holistik dan adaptif, dengan pendekatan berbasis Asta Gatra—yakni melalui penanggulangan dan pengelolaan geografi, demografi, sumber daya alam (SDA), ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta hankam (pertahanan dan keamanan). Pendekatan ini memastikan bahwa ketahanan nasional tidak hanya mengandalkan satu sektor atau aspek saja, melainkan mencakup berbagai dimensi yang saling mendukung dan melengkapi.

Untuk itu, kerja sama antarlembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi sangat penting. Koordinasi yang efektif antara kementerian dan lembaga terkait, serta dengan pihak swasta dan masyarakat sipil, dapat mempercepat pencapaian ketahanan nasional yang lebih tangguh. Kesiapsiagaan masyarakat juga harus terus diperkuat melalui pendidikan dan penyuluhan agar dapat menghadapi krisis yang mungkin datang kapan saja, dengan penuh kesiapan dan ketahanan mental.

Selain itu, penguatan nilai kebangsaan, yang berakar pada Pancasila sebagai dasar negara, menjadi kunci untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang bertujuan memecah belah keutuhan bangsa. Melalui

pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, Indonesia dapat memastikan bahwa warganya memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan kesadaran akan pentingnya menjaga perdamaian serta stabilitas nasional.

Tak kalah pentingnya, ketangguhan ekonomi dan teknologi harus menjadi fokus utama. Dalam dunia yang semakin terhubung, Indonesia perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diversifikasi sektor ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta inovasi dalam teknologi informasi akan mendukung daya saing Indonesia di kancah global.

Pada akhirnya, ketahanan nasional Indonesia harus dibangun dengan kesadaran bersama akan pentingnya kolaborasi antar berbagai elemen bangsa. Dengan adanya kerja sama yang solid, serta komitmen untuk menguatkan nilai kebangsaan dan inovasi teknologi, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Cita-cita Indonesia Emas 2045, sebagai negara yang maju, sejahtera, dan berdaulat, akan terwujud jika ketahanan nasionalnya mampu menjaga stabilitas dan integritas negara di tengah dunia yang penuh ketidakpastian.

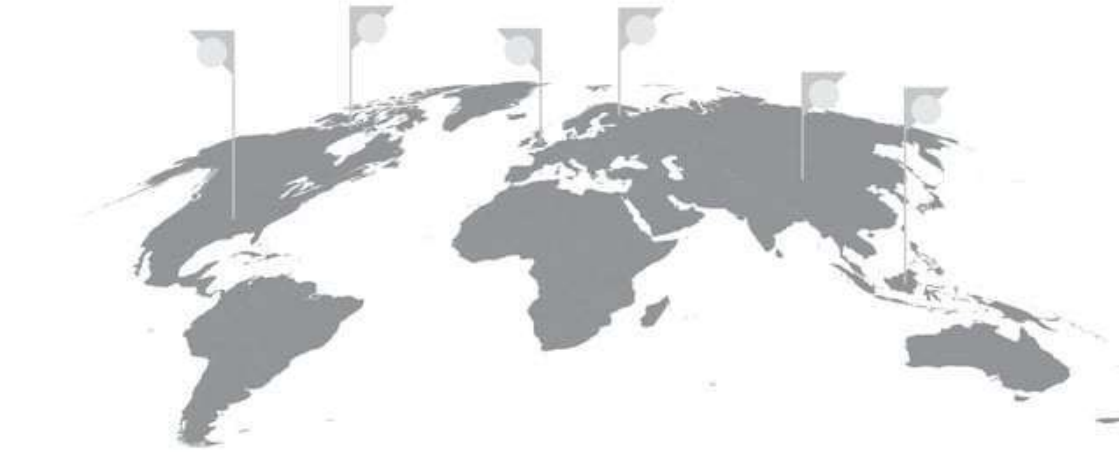

Bab 6 Asta Cita—Jalan menuju Ketahanan Nasional yang Tangguh

Pendahuluan

Bangsa Indonesia telah menetapkan visi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita kolektif yang bertumpu pada ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Indonesia melalui berbagai dokumen strategis, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), telah merumuskan delapan cita-cita strategis yang dikenal dengan nama Asta Cita. Asta Cita mencakup delapan arah kebijakan utama yang menjadi peta jalan pembangunan nasional Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi tantangan dan dinamika global, regional, serta domestik.

Asta Cita bukan sekadar agenda pembangunan sektoral yang bersifat sempit, melainkan merupakan fondasi utama yang mendasari pembentukan sistem ketahanan nasional yang kokoh. Dengan pendekatan yang berbasis pada Asta Gatra—yakni geografi, demografi, sumber daya alam (SDA),

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan—Asta Cita mengarahkan pembangunan Indonesia menuju kemajuan yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan-tantangan besar yang terus berkembang.

Setiap elemen dalam Asta Cita memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Misalnya, kebijakan yang memperkuat daya tahan geografis dan demografis Indonesia akan memungkinkan bangsa ini untuk memanfaatkan potensi besar yang dimilikinya sebagai negara kepulauan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berkelanjutan akan mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia tanpa merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem.

Selain itu, aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan juga menjadi pilar utama dalam memperkokoh ketahanan nasional. Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan moral harus tetap dijaga dan diperkuat untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, penguatan politik melalui demokrasi yang sehat dan sistem pemerintahan yang transparan akan memperkuat legitimasi negara dalam menghadapi tantangan domestik dan global.

Perekonomian yang berdaya saing tinggi dan berbasis pada keberlanjutan serta kecerdasan sosial budaya akan membantu Indonesia menjadi negara yang mandiri, inklusif, dan berkemajuan. Tidak kalah penting, sektor pertahanan dan keamanan yang tangguh akan menjaga kedaulatan negara di tengah ancaman global yang semakin kompleks, baik dari sisi militer, ekonomi, maupun non-militer.

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai delapan Asta Cita yang telah digariskan dalam RPJMN serta kontribusinya terhadap pembentukan ketahanan nasional yang tangguh. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang Asta Cita, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kapasitasnya

dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menjadikan bangsa ini lebih resilien dalam menghadapi berbagai ancaman dan perubahan yang terus berlangsung di dunia ini.

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Cita-cita pertama dalam Asta Cita adalah membentuk manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter. Visi ini sangat penting karena kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan nasional yang tangguh. Manusia yang sehat dan cerdas akan menjadi motor penggerak pembangunan nasional, sementara karakter yang kuat akan menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, investasi yang besar dalam pendidikan, kesehatan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi langkah krusial untuk menciptakan SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan global.

Untuk mewujudkan cita-cita ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia di berbagai bidang. Salah satunya adalah transformasi pendidikan, yang merupakan kunci utama dalam menciptakan generasi masa depan yang cerdas dan kompeten. Dalam era digital, pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan dan kurikulum berbasis kompetensi masa depan menjadi sangat penting. Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan global. Dengan adanya pendidikan berbasis kompetensi, diharapkan SDM Indonesia dapat bersaing di pasar global dan menghadapi revolusi industri 4.0 dengan kesiapan yang matang.

Selain itu, reformasi sistem kesehatan menjadi bagian integral dari peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kesehatan adalah aset utama dalam pembangunan bangsa, dan dengan sistem kesehatan yang kuat, Indonesia

dapat menciptakan SDM yang produktif dan berdaya saing tinggi. Program *Universal Health Coverage* (UHC) menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, ketahanan farmasi dan peningkatan fasilitas kesehatan juga harus diperkuat agar Indonesia tidak hanya mampu mengatasi masalah kesehatan di dalam negeri, tetapi juga siap menghadapi potensi ancaman kesehatan global.

Penguatan karakter melalui pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara juga sangat penting dalam membangun ketahanan sosial dan ideologi. Karakter bangsa yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila akan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman. Pendidikan Pancasila dan bela negara juga memainkan peran kunci dalam memperkokoh rasa cinta tanah air, meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memupuk semangat gotong royong di masyarakat. Semua ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan ketahanan ideologi bangsa, yang merupakan elemen penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui transformasi pendidikan, reformasi sistem kesehatan, dan penguatan karakter adalah elemen penting dalam membangun ketahanan nasional. Dengan SDM yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global dan membangun masa depan yang gemilang. Program-program ini akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana setiap warganya dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.

Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Merata

Cita kedua dalam Asta Cita menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan ekonomi yang tangguh. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Indonesia harus mampu menciptakan ekonomi yang tidak hanya stabil, tetapi juga mampu menghadapi berbagai tantangan global, seperti fluktuasi pasar, krisis energi, dan ketidakpastian ekonomi dunia, sembari memastikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang inklusif merupakan dasar utama dari cita ini, dengan menekankan pengurangan kesenjangan ekonomi, baik antarwilayah maupun antarindividu. Salah satu langkah utama dalam mencapai hal ini adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berarti bahwa pertumbuhan tersebut harus menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara adil oleh semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi adalah kesenjangan antarwilayah yang masih besar. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi prioritas penting. Pemerintah telah mengalokasikan dana transfer dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, untuk mendukung pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur ini akan membuka akses ke pasar, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan

konektivitas antarwilayah. Dengan meningkatkan infrastruktur, daerah-daerah yang selama ini tertinggal dapat lebih mudah mengakses peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat sangat penting. UMKM berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk itu, kebijakan yang mendukung penguatan UMKM, seperti penyediaan akses pembiayaan yang mudah, pelatihan keterampilan, dan dukungan pemasaran, sangat diperlukan. Koperasi juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan memfasilitasi kolaborasi antara individu untuk meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan bersama.

Ketahanan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan ekonomi nasional dalam bertahan dan bangkit dari krisis. Pengalaman Indonesia menghadapi krisis ekonomi global, seperti krisis finansial 2008 dan dampak pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan untuk membangun sistem ekonomi yang fleksibel dan tangguh. Diversifikasi ekonomi, penguatan sektor-sektor strategis, serta penerapan teknologi yang berkelanjutan menjadi langkah-langkah kunci untuk membangun ketahanan ekonomi yang tahan terhadap guncangan eksternal.

Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata akan menjadi pilar utama dalam menciptakan ketahanan nasional. Dengan fokus pada pemerataan pembangunan antarwilayah, pemberdayaan UMKM, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global dan menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Inilah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Mendorong Pertumbuhan

Asta Cita ketiga dalam visi pembangunan Indonesia menekankan pentingnya penguatan ketahanan wilayah, terutama di wilayah pinggiran, perbatasan, dan kawasan timur Indonesia. Ketahanan nasional yang kokoh tidak dapat terwujud tanpa adanya integrasi teritorial yang merata dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan daerah pinggiran atau perbatasan sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, pembangunan wilayah yang adil dan merata menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Salah satu langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah adalah dengan memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur transportasi yang efektif, seperti jalan, pelabuhan, dan tol laut, menjadi kunci utama untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi dan perdagangan. Konektivitas yang baik tidak hanya mempercepat arus barang dan jasa, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat di daerah untuk mengakses pasar yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan tol laut, misalnya, akan mengurangi biaya transportasi antar pulau dan mempercepat distribusi barang, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Selain penguatan konektivitas, pengembangan kawasan ekonomi baru dan kawasan industri di luar Jawa menjadi prioritas untuk mendorong pemerataan pembangunan. Jawa selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun ketergantungan yang berlebihan pada Jawa dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Oleh karena itu, upaya untuk mengalihkan perhatian pada pengembangan kawasan industri di luar Jawa, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,

sangat penting untuk mendorong desentralisasi ekonomi dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pemerintah harus memberikan insentif kepada investor untuk berinvestasi di kawasan-kawasan ini, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri, seperti penyediaan energi, air bersih, dan fasilitas logistik.

Revitalisasi desa dan daerah tertinggal juga merupakan bagian penting dari pembangunan wilayah yang berkeadilan. Melalui pendekatan "*One Village One Product*" (OVOP), setiap desa diberdayakan untuk mengembangkan potensi lokalnya, baik itu produk pertanian, kerajinan tangan, atau sektor pariwisata. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga menciptakan identitas daerah yang kuat. Selain itu, pengembangan desa digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap informasi, pendidikan, dan layanan publik. Teknologi digital dapat membuka peluang baru dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang selama ini tertinggal.

Pembangunan wilayah yang adil dan merata merupakan wujud nyata dari prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini juga merupakan penguatan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan pembangunan yang merata, seluruh wilayah Indonesia akan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, dan memperkuat kohesi sosial. Pembangunan wilayah yang seimbang ini tidak hanya akan mengurangi ketimpangan antarwilayah, tetapi juga menjadikan Indonesia lebih kuat dan lebih stabil dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, penguatan ketahanan wilayah melalui konektivitas yang lebih baik, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan revitalisasi desa adalah langkah-langkah kunci dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan kuat. Dengan demikian, kita semakin mendekati tujuan besar Indonesia Emas 2045.

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Ketahanan nasional Indonesia sangat bergantung pada kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintahannya. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama yang menguatkan legitimasi negara dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Asta Cita keempat menekankan pentingnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari korupsi, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan nasional secara keseluruhan. Untuk mewujudkan cita-cita ini, sejumlah langkah strategis perlu diambil untuk memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia.

Salah satu langkah utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif adalah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi layanan pemerintahan akan mempercepat proses administrasi dan memungkinkan transparansi yang lebih besar. Dengan SPBE, pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, digitalisasi juga mengurangi peluang bagi praktik korupsi, karena data dan proses administrasi menjadi lebih terbuka dan terpantau dengan baik. Penerapan SPBE akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik, seperti perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan lainnya, dengan lebih efisien dan tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Selain itu, penguatan kapasitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) menjadi aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. ASN memegang peranan penting dalam menjalankan kebijakan publik, oleh karena itu, mereka harus memiliki kompetensi yang tinggi dan sikap profesional yang kuat. Pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, penguatan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pekerjaan ASN

menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah harus memastikan bahwa ASN tidak hanya memenuhi standar kompetensi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kejujuran, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang terbaik.

Di samping itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap integritas pemerintahan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta sistem pelaporan yang aman dan efektif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan korupsi. Penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap tindak pidana korupsi akan memberikan sinyal yang kuat bahwa pemerintah tidak mentolerir penyalahgunaan wewenang.

Dengan mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, penguatan digitalisasi, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik korupsi, tata kelola pemerintahan akan menjadi lebih akuntabel dan transparan. Akuntabilitas pemerintahan tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks ketahanan nasional, pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya akan meningkatkan daya tahan institusional negara terhadap segala tekanan yang mungkin muncul, baik yang berasal dari krisis internal maupun dari dinamika global yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, melalui upaya tersebut, Indonesia akan mampu mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya bersih dan efektif, tetapi juga mampu menciptakan ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045.

Membangun Indonesia dari Desa dan Pinggiran

Pemberdayaan desa merupakan elemen fundamental dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia. Asta Cita kelima menekankan peran penting desa dalam membangun ketahanan nasional, dengan menyadari bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya bergantung pada kota-kota besar, melainkan juga pada kemandirian dan kekuatan masyarakat lokal di desa dan kawasan pinggiran. Desa yang kuat, mandiri, dan berkembang secara berkelanjutan akan membentuk fondasi ketahanan nasional yang lebih kokoh.

Pemberdayaan desa menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan Indonesia, dan untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar. Dana ini digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan di desa yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi lokal. Program ini merupakan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Salah satu fokus utama dalam pemberdayaan desa adalah penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kewirausahaan. BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi desa, menyediakan layanan, dan menciptakan lapangan kerja di tingkat desa. Melalui BUMDes, desa dapat mengelola potensi sumber daya alam dan produk lokal yang dimiliki, serta menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di desa juga menjadi kunci dalam mengembangkan kewirausahaan di tingkat lokal.

Pelestarian nilai-nilai lokal juga menjadi bagian integral dari pemberdayaan desa. Setiap desa di Indonesia memiliki budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang menjadi identitas mereka. Nilai-nilai ini bukan hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun ketahanan budaya yang dapat memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pembangunan desa, Indonesia dapat menjaga warisan budaya dan tradisi yang telah ada sejak lama.

Selain aspek ekonomi dan budaya, pembangunan infrastruktur dasar di desa menjadi prioritas utama dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi. Akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan listrik merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Infrastruktur yang memadai juga akan mempermudah mobilitas dan akses pasar bagi produk-produk desa, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Desa yang kuat dan mandiri memiliki ketahanan yang tinggi dalam menghadapi ancaman disintegrasi sosial dan guncangan ekonomi global. Ketika masyarakat desa memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan eksternal dan internal. Selain itu, desa yang mampu berinovasi dan mengelola potensi lokalnya akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap guncangan ekonomi global, seperti fluktuasi harga pangan atau perubahan iklim.

Dengan pemberdayaan desa yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia dapat membangun ketahanan sosial dan ekonomi yang berbasis pada kekuatan lokal. Membangun Indonesia dari desa dan pinggiran adalah langkah strategis untuk menciptakan ketahanan nasional yang kokoh, adil, dan merata, menuju Indonesia Emas 2045.

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Cita keenam Asta Cita menekankan pentingnya transformasi ekonomi Indonesia dari pola konsumtif menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan daya saing yang tinggi menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Salah satu langkah strategis yang diambil dalam mewujudkan tujuan ini adalah industrialisasi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam lokal dan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

Hilirisasi komoditas unggulan Indonesia, seperti nikel, bauksit, dan sawit, menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pembangunan ekonomi. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini, sebagian besar komoditas tersebut masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah. Dengan mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada komoditas-komoditas unggulan tersebut, Indonesia dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Selain itu, pengembangan kawasan industri dan *special economic zones* (SEZ) merupakan langkah penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia. Kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas yang mendukung proses produksi dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya produksi, dan menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun asing. *Special economic zones* juga memberikan insentif bagi industri-industri tertentu untuk berkembang, menciptakan kesempatan untuk inovasi, dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga sektor jasa, memberikan peluang besar untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, dan mengurangi biaya operasional. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas di sektor-sektor kritis seperti pertanian, energi, dan kesehatan, serta mempercepat transformasi digital di sektor industri dan bisnis. Hal ini juga mendukung pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.

Meningkatkan produktivitas bukan hanya tentang memperbesar output ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor barang dan teknologi, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mengurangi kerentanannya terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga global atau ketegangan geopolitik. Lebih penting lagi, peningkatan produktivitas akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di masa depan.

Dengan langkah-langkah strategis yang terencana dan terkoordinasi, Indonesia dapat meningkatkan daya saing ekonomi global dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal dan teknologi digital adalah bagian dari upaya Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana ekonomi yang produktif dan daya saing yang tinggi menjadi landasan utama bagi kemajuan bangsa.

Revolusi Karakter Bangsa

Pembangunan karakter bangsa merupakan fondasi utama bagi ketahanan ideologi dan sosial budaya Indonesia. Dalam menghadapi tantangan zaman, Asta Cita ketujuh menegaskan pentingnya revolusi mental untuk membentuk watak bangsa yang berintegritas, toleran, dan mencintai tanah air. Proses ini bukan hanya sekadar pembentukan moral individu, tetapi juga sebuah upaya kolektif untuk menguatkan kohesi sosial dan memperkokoh jati diri bangsa.

Revolusi karakter bangsa dimulai dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila dan nilai luhur bangsa. Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila akan membentuk generasi yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara, menghargai perbedaan, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman yang ada. Implementasi pendidikan karakter ini harus dimulai sejak dini, dengan menanamkan nilai-nilai moral yang kuat kepada anak-anak dan remaja agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Gerakan revolusi mental di instansi pemerintahan dan masyarakat juga menjadi langkah strategis dalam membangun karakter bangsa. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dengan menjadikan revolusi mental sebagai agenda utama dalam birokrasi, organisasi, dan lembaga-lembaga publik. Penerapan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan lembaga negara. Gerakan ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah pusat hingga daerah, untuk bersama-sama menanggulangi praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan yang dapat merusak tatanan sosial.

Selain itu, penguatan peran keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam membentuk moral generasi muda sangatlah penting. Keluarga merupakan institusi pertama yang membentuk karakter anak-anak. Melalui pola asuh yang baik, nilai-nilai agama dan budaya dapat ditanamkan sejak usia dini, yang akan menjadi dasar bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang memiliki integritas dan cinta tanah air. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memegang peran penting dalam memberikan teladan dan membimbing masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial. Mereka dapat berperan sebagai agen perubahan, mengajarkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan kesatuan kepada masyarakat luas.

Dalam konteks ancaman polarisasi, radikalisme, dan krisis identitas, pembangunan karakter menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan bangsa. Ancaman-ancaman ini dapat menggerogoti rasa persatuan dan kesatuan bangsa, yang pada akhirnya dapat merusak ketahanan nasional. Oleh karena itu, revolusi karakter bukan hanya soal membangun individu yang baik, tetapi juga menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan memiliki solidaritas tinggi terhadap sesama.

Dengan revolusi karakter yang tepat, Indonesia dapat memperkokoh dasar ideologi dan sosial budaya bangsa. Ketahanan bangsa akan semakin kuat ketika setiap individu dan kelompok memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, menghormati keberagaman, dan berperan aktif dalam menjaga persatuan. Revolusi mental yang terintegrasi dengan pendidikan karakter akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya maju dari segi ekonomi dan teknologi, tetapi juga sebagai bangsa yang berintegritas, beradab, dan berdedikasi tinggi terhadap kemajuan bersama.

Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial

Indonesia, sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, memiliki identitas kebhinekaan yang unik dan kaya. Keberagaman ini adalah salah satu kekuatan terbesar bangsa, tetapi juga merupakan potensi kerentanan yang harus dikelola dengan bijaksana. Asta Cita kedelapan menekankan pentingnya memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial sebagai dasar ketahanan nasional yang kokoh. Sebagai bangsa yang plural, Indonesia harus terus-menerus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai keberagaman yang harmonis.

Pendidikan multikultural adalah salah satu strategi utama dalam memperteguh kebhinekaan. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan pengertian terhadap perbedaan sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui pendidikan multikultural, anak-anak diajarkan untuk melihat perbedaan bukan sebagai sumber konflik, tetapi sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Pengajaran ini tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah formal, tetapi juga melalui berbagai media dan platform digital untuk menjangkau masyarakat luas. Melalui pendidikan ini, diharapkan generasi penerus bangsa akan lebih siap dalam menghadapi tantangan sosial yang berkaitan dengan keberagaman.

Selain pendidikan, kampanye toleransi menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya kebhinekaan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, televisi, dan kegiatan masyarakat. Kampanye toleransi harus mampu mengedukasi masyarakat tentang bahaya ekstremisme, intoleransi, dan diskriminasi yang dapat merusak tatanan sosial. Kampanye ini juga perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama, untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan

penuh pengertian. Toleransi bukan hanya soal menerima perbedaan, tetapi juga tentang saling menghargai hak dan martabat setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya.

Pelibatan aktif masyarakat sipil dalam rekonsiliasi dan restorasi sosial juga merupakan bagian penting dalam memperkuat kohesi sosial. Rekonsiliasi pasca-konflik atau ketegangan sosial memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga independen untuk membangun kembali rasa kepercayaan dan persatuan. Organisasi masyarakat sipil, kelompok pemuda, dan tokoh masyarakat dapat berperan dalam memperlancar proses ini dengan mengedepankan dialog dan kerja sama antar kelompok yang sebelumnya terpisah oleh perbedaan. Restorasi sosial tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak dan memperkuat solidaritas sosial di tingkat komunitas.

Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi juga merupakan langkah penting dalam menjaga kebhinekaan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas terhadap siapa pun yang melakukan tindakan atau menyebarkan ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa. Selain itu, tindakan preventif juga perlu dilakukan dengan memperkuat regulasi yang melarang segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun gender. Dengan penegakan hukum yang tegas, masyarakat akan merasa lebih terlindungi, dan rasa saling percaya antara kelompok-kelompok yang berbeda akan semakin terjaga.

Ketahanan nasional yang kuat tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi atau militer, tetapi juga pada kemauan untuk merawat kebhinekaan dengan adil dan inklusif. Sebuah bangsa yang mampu merangkul semua perbedaan dengan saling menghargai dan memahami akan memiliki landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan memperteguh

kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial, Indonesia dapat memastikan bahwa nilai-nilai persatuan dan kesatuan tetap menjadi dasar dari ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Penutup

Asta Cita adalah kompas pembangunan nasional yang mengarahkan Indonesia menuju bangsa yang tangguh, adil, dan berdaulat. Delapan cita-cita strategis yang termuat dalam Asta Cita ini tidak hanya sekadar tujuan, tetapi merupakan langkah-langkah konkret yang harus diimplementasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan nasional yang utuh. Setiap cita-cita saling terkait, membentuk struktur kokoh yang mendukung keberlanjutan dan kedaulatan negara.

Kualitas manusia Indonesia menjadi fondasi pertama dalam membangun ketahanan nasional. Pendidikan, kesehatan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Begitu juga dengan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang mampu memberikan kesejahteraan merata, serta menciptakan ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Dalam hal ini, Indonesia harus mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan memanfaatkan potensi lokal, memperkuat sektor UMKM, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan antarwilayah.

Selanjutnya, pembangunan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya menjadi elemen penting dalam mewujudkan ketahanan nasional. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat legitimasi negara di mata rakyat. Pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi akan memastikan stabilitas politik yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Selain itu, memperkuat kohesi sosial dan merawat kebhinekaan juga menjadi langkah tak terpisahkan dalam menjaga ketahanan nasional. Masyarakat Indonesia yang majemuk memerlukan kerangka kerja yang inklusif, di mana perbedaan dihargai, dan kesetaraan ditegakkan. Melalui pendidikan multikultural, kampanye toleransi, dan upaya restorasi sosial, Indonesia dapat memastikan bahwa keragaman budaya dan identitas tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru kekuatan yang memperkaya bangsa.

Keseluruhan aspek dalam Asta Cita ini tidak dapat dicapai secara terpisah. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan nasional yang tangguh memerlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penguatan ketahanan nasional harus dilakukan secara holistik, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. Negara yang kuat dan berdaulat adalah negara yang mampu mengelola tantangan internal dan eksternal dengan bijaksana, sambil menjaga nilai-nilai luhur yang telah membentuk identitas bangsa.

Dengan implementasi Asta Cita yang konsisten dan kolaboratif, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045. Ketahanan nasional bukanlah tujuan akhir, melainkan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk memastikan Indonesia tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah gempuran perubahan global yang semakin kompleks. Melalui ketahanan ini, Indonesia dapat menjelma menjadi negara yang tidak hanya berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi juga tangguh dalam menjaga identitas dan jati dirinya sebagai bangsa besar.

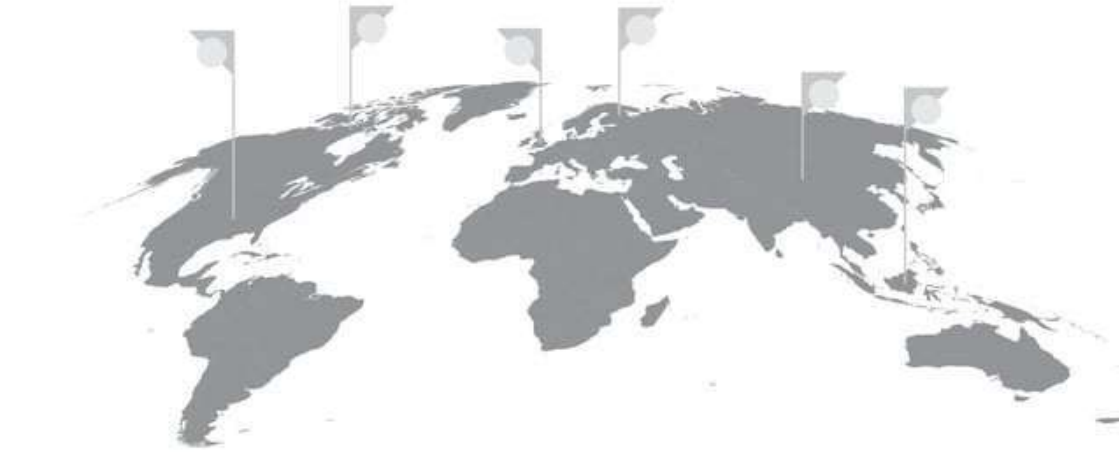

Bab 7 Peran Kepala Daerah sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Pendahuluan

Ketahanan nasional bukan semata-mata urusan pemerintah pusat. Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, peran daerah sangatlah krusial. Meskipun kebijakan strategis sering kali diputuskan di tingkat nasional, implementasi yang efektif dari kebijakan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan di tingkat daerah. Kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—memegang peran strategis sebagai ujung tombak dalam memperkuat daya tahan bangsa di akar rumput. Mereka adalah pemimpin terdepan yang menghubungkan antara kebijakan nasional dan realitas lokal. Dengan posisi yang begitu penting, kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dan pemberdaya masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Ketahanan nasional yang kokoh memerlukan sinergi antara kebijakan nasional dan upaya pembangunan yang terarah di tingkat daerah. Penguatan kesadaran geopolitik daerah, tata kelola yang efektif, serta pengamalan nilai-

nilai kebangsaan di tingkat lokal, merupakan bagian integral dari sistem ketahanan nasional. Hal ini mengingat, ketahanan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dari kekuatan sosial dan politik yang terbentuk di masyarakat. Ketahanan tersebut dibangun dari bawah, dengan kepala daerah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya dan potensi daerah secara optimal.

Bab ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif peran kepala daerah dalam menopang ketahanan nasional melalui tiga pilar utama: pertama, kesadaran geopolitik daerah, yaitu pemahaman tentang posisi strategis daerah dalam peta politik, sosial, dan ekonomi nasional maupun global; kedua, strategi pembangunan dan penggunaan anggaran daerah (APBD) yang efektif untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan; dan ketiga, penguatan nilai-nilai kebangsaan yang perlu dijaga dan dilestarikan di tingkat daerah, agar kesatuan dan persatuan bangsa dapat terus terjaga.

Ketiga pilar ini saling mendukung dan menjadi landasan dalam memperkuat ketahanan nasional. Kesadaran geopolitik daerah memberikan dasar bagi Kepala Daerah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan tantangan lokal dan global. Sementara itu, penggunaan anggaran daerah yang efisien dan tepat sasaran akan mempercepat pembangunan yang merata, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi. Di sisi lain, penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan dan pembinaan karakter akan memperkokoh rasa persatuan di tengah keberagaman Indonesia.

Sebagai ujung tombak pembangunan, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Tugas ini bukan hanya membutuhkan keterampilan administratif, tetapi juga wawasan yang luas mengenai geopolitik, kemampuan untuk mengelola anggaran dengan bijak, serta komitmen untuk mengedepankan nilai-nilai

kebangsaan dalam setiap kebijakan yang diambil. Pendekatan yang integratif dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci untuk menciptakan ketahanan nasional yang kokoh dan menyeluruh.

Kesadaran Geopolitik di Tingkat Daerah

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan 38 provinsi, memiliki keragaman geografis, budaya, dan sosial yang membentuk dinamika geopolitik yang unik di setiap wilayah. Keberagaman ini memberikan tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan sumber daya, pemerintahan, dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, kepala daerah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menyikapi tantangan serta peluang yang muncul dari letak strategis wilayah mereka, baik dalam konteks nasional maupun internasional.

Kesadaran geopolitik di tingkat daerah bukan sekadar pengetahuan tentang peta wilayah, tetapi melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap posisi strategis daerah dalam kaitannya dengan dinamika global dan nasional. Kepala daerah yang memiliki kesadaran geopolitik akan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga dapat menjaga ketahanan wilayah di tengah perubahan global yang cepat.

Ada beberapa aspek penting dalam membangun kesadaran geopolitik di tingkat daerah:

Memahami Letak Strategis Wilayah

Kepala daerah harus memahami letak strategis wilayahnya dalam konteks nasional dan internasional. Beberapa daerah mungkin memiliki posisi yang sangat penting sebagai wilayah perbatasan, jalur perdagangan internasional, atau daerah yang rawan bencana alam. Misalnya, provinsi-provinsi perbatasan, seperti Papua, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara

Timur, memiliki peran vital dalam menjaga integritas teritorial Indonesia. Kepala daerah di wilayah ini harus memahami bahwa mereka bukan hanya mengelola pemerintahan lokal, tetapi juga bertanggung jawab terhadap stabilitas wilayah yang berhubungan langsung dengan kepentingan nasional dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga.

Mewaspadai Potensi Konflik dan Disintegrasi

Salah satu tantangan terbesar dalam kesadaran geopolitik adalah mewaspadai potensi konflik atau disintegrasi yang dapat muncul akibat ketimpangan pembangunan, ketegangan identitas, atau pengaruh asing. Di beberapa daerah, terutama yang memiliki keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, ketimpangan pembangunan dapat memicu ketegangan. Kepala daerah perlu memastikan bahwa pembangunan merata dan inklusif, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial di dalam masyarakat. Selain itu, penting bagi kepala daerah untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman yang mungkin timbul dari luar, seperti pengaruh asing yang dapat merusak integritas wilayah.

Mempromosikan Stabilitas dan Kohesi Sosial

Ketahanan nasional sangat bergantung pada stabilitas sosial dan kohesi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kepala daerah memiliki peran strategis dalam mempromosikan stabilitas ini dengan memastikan adanya dialog antarbudaya, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta memfasilitasi integrasi sosial antar kelompok yang berbeda. Di daerah-daerah yang rawan konflik, kepala daerah perlu bertindak sebagai pemimpin yang mampu menyatukan masyarakat, menjaga perdamaian, dan mencegah potensi ketegangan sosial.

Sebagai contoh, gubernur provinsi perbatasan seperti Papua harus mampu menjaga integrasi wilayah melalui pendekatan yang mengutamakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga berperan

sebagai representasi diplomasi informal terhadap negara-negara tetangga, yang dapat memperkuat hubungan bilateral dan mencegah potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas daerah.

Secara keseluruhan, kesadaran geopolitik di tingkat daerah sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Kepala daerah yang memahami dan mengelola posisi strategis wilayahnya dengan bijak akan mampu memperkuat ketahanan sosial, politik, dan ekonomi daerah, yang pada gilirannya mendukung stabilitas nasional.

Strategi Efektif Penggunaan APBD untuk Ketahanan Nasional

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen vital bagi kepala daerah dalam membangun ketahanan lokal. Ketahanan nasional yang kokoh tidak hanya terbentuk melalui kebijakan yang diambil di tingkat pusat, tetapi juga sangat bergantung pada upaya di tingkat daerah. Oleh karena itu, penggunaan APBD harus difokuskan pada program-program yang dapat memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tekanan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan, maupun keamanan. Berikut adalah beberapa strategi efektif dalam penggunaan APBD yang dapat meningkatkan ketahanan nasional.

Alokasi Prioritas pada Kebutuhan Dasar

Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar merupakan pilar utama dalam memperkuat ketahanan masyarakat. Kepala daerah perlu memastikan bahwa alokasi APBD memprioritaskan pengembangan sektor-sektor ini agar dapat memberikan dasar yang kuat bagi ketahanan lokal.

Peningkatan layanan kesehatan harus mencakup akses yang merata di seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil dan terisolasi. Rumah sakit dan puskesmas yang ada perlu ditingkatkan kualitas dan jumlahnya, sementara program kesehatan preventif dan promotif dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Di sektor **pendidikan**, alokasi APBD harus mendukung pendidikan yang inklusif, yang tidak hanya berfokus pada kualitas tetapi juga aksesibilitas. Pemerintah daerah harus mengembangkan program yang dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang akan menjadi pilar kemajuan daerah dan negara di masa depan.

Selain itu, **infrastruktur dasar** seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik harus menjadi prioritas. Meningkatkan konektivitas antarwilayah akan membuka akses ekonomi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas penduduk, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial daerah.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada kekuatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, APBD harus diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan **dukungan kepada UMKM, petani, dan nelayan**, yang merupakan pilar utama perekonomian di banyak daerah. Program pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses pasar, serta bantuan modal usaha dapat membantu mereka meningkatkan daya saing dan produktivitas.

Kehadiran **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** yang produktif akan memberikan kontribusi besar terhadap kemandirian ekonomi lokal. BUMDes yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan pendapatan untuk desa, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pusat.

Selain itu, kepala daerah juga perlu mengalokasikan sebagian APBD untuk **akses permodalan** bagi sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi besar, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Dengan demikian, daerah akan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tahan terhadap krisis dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Responsif terhadap Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik itu bencana alam maupun perubahan iklim, memerlukan perhatian khusus dalam hal **ketahanan bencana**. Oleh karena itu, penggunaan APBD harus memperhatikan penguatan sistem mitigasi bencana dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman bencana.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan **perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim**. Wilayah yang rawan bencana, seperti daerah pesisir atau perbukitan, perlu mendapatkan perhatian dalam hal pengelolaan ruang yang bijaksana, misalnya dengan membatasi pembangunan di daerah rawan longsor atau banjir.

Pengembangan sistem peringatan dini yang efektif juga harus menjadi fokus utama dalam APBD, guna mengurangi dampak bencana. Selain itu, program-program **lingkungan berkelanjutan** dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat akan membantu meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana alam yang tak terduga.

Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Kemiskinan adalah akar dari berbagai kerentanan sosial dan dapat menjadi pemicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan APBD. Kepala daerah perlu memastikan bahwa **pendataan sosial yang akurat dan dinamis** dilakukan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat miskin di daerah.

Bantuan sosial yang tepat sasaran dan terintegrasi juga harus menjadi fokus APBD, dengan memastikan bahwa program bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program-program perlindungan sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif, seperti

pemberian bantuan pangan, bantuan pendidikan, atau bantuan kesehatan, akan memberikan rasa aman bagi masyarakat miskin dan memperkuat kohesi sosial di daerah.

Selain itu, peningkatan kapasitas warga miskin melalui **pelatihan kerja dan pendidikan vokasi** dapat membantu mereka memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mandiri. Ini akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penggunaan APBD yang efektif dan terarah adalah kunci untuk membangun ketahanan lokal yang pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional. Dengan alokasi yang tepat pada sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, mitigasi bencana, dan pengentasan kemiskinan, kepala daerah dapat menciptakan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi tantangan. Dengan demikian, APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelola keuangan daerah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan

Kepala daerah memainkan peran penting bukan hanya sebagai pengelola pemerintahan, tetapi juga sebagai agen ideologis yang bertanggung jawab dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan di wilayahnya. Di tengah berbagai tantangan global, seperti polarisasi politik, penyebaran disinformasi, dan meningkatnya radikalisme, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi semakin penting. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan adalah nilai dasar yang harus dijaga agar keutuhan bangsa tetap terjaga. Oleh karena itu, kepala daerah harus aktif dalam memastikan nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh kepala daerah dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan:

Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Daerah

Pendidikan karakter adalah sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Kepala daerah, bekerja sama dengan dinas pendidikan dan komunitas lokal, dapat memastikan bahwa **wawasan kebangsaan** menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan. Ini tidak hanya mencakup mata pelajaran kewarganegaraan, tetapi juga pengajaran tentang **Pancasila**, **Bhinneka Tunggal Ika**, dan semangat nasionalisme yang relevan dengan konteks lokal.

Selain itu, kepala daerah juga dapat **mendukung kegiatan ekstrakurikuler** yang memperkuat semangat kebangsaan, seperti pramuka, bela negara, atau organisasi pelajar lainnya. Kegiatan ini dapat mengajarkan kepemimpinan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab terhadap negara. Pembelajaran berbasis pengalaman seperti ini sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Agama

Tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di tingkat lokal. Kepala daerah harus **membangun forum-forum dialog** antarumat beragama dan antarkelompok sosial, sehingga setiap perbedaan dapat diterima dengan penuh rasa hormat. Dialog ini tidak hanya membahas masalah sosial atau agama, tetapi juga membahas bagaimana memperkuat kebersamaan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, kepala daerah juga harus mendorong **partisipasi tokoh adat** dan tokoh agama dalam menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. Dengan cara ini, pesan kebangsaan akan lebih mudah diterima karena disampaikan

oleh figur yang dihormati oleh masyarakat. Mereka juga dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun persatuan dan kesatuan.

Menjaga Ruang Publik dari Polarisasi dan Intoleransi

Di era digital, media sosial dan ruang digital sering kali menjadi sarana penyebaran narasi yang dapat merusak persatuan bangsa. Penyebaran **hoaks**, **ekstremisme**, dan **separatisme** sering kali terjadi tanpa batasan, yang memicu ketegangan sosial dan politik. Kepala daerah perlu **bersikap tegas dan proaktif** dalam menangkal narasi-narasi tersebut.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan **pendekatan edukatif dan persuasif**, seperti mengadakan seminar atau lokakarya tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama dan antarkelompok sosial. Kepala daerah juga bisa **membangun tim literasi digital** yang bekerja sama dengan komunitas media lokal untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih bijaksana dalam menyaring informasi yang diterima, serta lebih mampu mencegah perpecahan akibat informasi yang salah atau provokatif.

Kepala daerah harus memastikan bahwa ruang publik, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, tetap menjadi tempat yang aman untuk berdiskusi dan berbagi informasi yang membangun persatuan. Ini akan memperkuat nilai kebangsaan di tingkat lokal dan mengurangi potensi polarisasi yang dapat merusak keutuhan bangsa.

Penguatan nilai-nilai kebangsaan bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kepala daerah, sebagai pemimpin di tingkat lokal, memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan langkah-langkah konkret seperti integrasi pendidikan karakter, pelibatan tokoh masyarakat dan agama, serta menjaga ruang publik

dari polarisasi dan intoleransi, kepala daerah dapat memperkuat ketahanan sosial dan ideologis di daerahnya. Hal ini pada akhirnya akan mendukung ketahanan nasional yang lebih kokoh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Strategis

Ketahanan nasional tidak dapat terwujud secara maksimal tanpa adanya sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai ujung tombak implementasi kebijakan, kepala daerah memiliki peran krusial dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal yang lebih konkret. Oleh karena itu, kepala daerah harus aktif berkolaborasi dengan pemerintah pusat serta lembaga-lembaga strategis untuk memperkuat daya tahan bangsa di setiap level.

Salah satu langkah utama dalam menciptakan sinergi adalah **sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)** dan **RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)**. Kepala daerah harus memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, tetapi terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi ini penting agar pembangunan di tingkat daerah dapat mendukung tercapainya sasaran-sasaran nasional, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan ekonomi dan sosial. Hal ini juga membantu pemerintah pusat dalam memonitor dan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan di daerah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal.

Selain itu, kepala daerah harus terlibat secara aktif dalam forum-forum koordinasi nasional seperti **Rakornas** (Rapat Koordinasi Nasional), **Musrenbangnas** (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional), dan **forum Forkopimda** (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Dalam

forum-forum ini, kepala daerah dapat menyampaikan isu-isu lokal yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, sekaligus memperoleh informasi dan arahan strategis terkait kebijakan nasional yang perlu diterapkan di daerah. Kehadiran kepala daerah dalam forum-forum ini juga memastikan bahwa suara daerah didengar dan kebutuhan lokal menjadi bagian dari kebijakan nasional yang lebih inklusif.

Kerja sama yang erat dengan **lembaga-lembaga strategis** seperti **TNI**, **Polri**, **Lemhannas**, dan **BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)** juga sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional di tingkat daerah. Sebagai contoh, TNI dan Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala daerah harus berkoordinasi dengan kedua institusi ini untuk menjaga stabilitas daerah, terutama di daerah rawan konflik atau daerah perbatasan yang sering kali menjadi titik fokus ancaman keamanan.

Selain itu, Lemhannas sebagai lembaga yang berfokus pada pendidikan dan pembinaan nilai-nilai kebangsaan dapat memberikan pelatihan dan penguatan karakter kepada aparatur daerah serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kerangka kebhinekaan. BSSN juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan siber daerah, terutama mengingat ancaman dunia maya yang semakin berkembang. Kepala daerah perlu bekerja sama dengan BSSN untuk memastikan bahwa sistem informasi dan data yang ada di daerah terlindungi dengan baik, serta tidak mudah terpapar ancaman siber yang dapat merusak stabilitas daerah.

Dengan terjalinnya sinergi antara pemerintah pusat, kepala daerah, dan lembaga-lembaga strategis, ketahanan nasional akan semakin kokoh. Kepala daerah sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan realitas lokal, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung tujuan

nasional yang lebih besar. Kolaborasi ini, pada akhirnya, akan memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.

Penutup

Kepala daerah memegang peran penting sebagai pilar ketahanan nasional yang berada di garis depan. Mereka bukan hanya eksekutor kebijakan, tetapi juga pemimpin geopolitik lokal, manajer sumber daya daerah, dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan tidak pasti, seperti perubahan iklim, konflik sosial, krisis ekonomi, serta ancaman ideologis, kepemimpinan kepala daerah haruslah bersifat adaptif, inklusif, dan visioner. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera bagi masyarakat lokal sambil menjaga kedaulatan dan integritas bangsa.

Meningkatkan kesadaran geopolitik di tingkat daerah menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Kepala Daerah yang memahami posisi strategis wilayahnya—baik dalam konteks nasional maupun internasional—dapat mengambil langkah-langkah preventif terhadap ancaman yang mungkin muncul. Baik itu ancaman sosial, politik, atau keamanan, pemahaman terhadap geopolitik lokal akan memberikan kepala daerah perspektif yang lebih luas dan mendalam dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Selain itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara strategis adalah instrumen utama dalam mewujudkan ketahanan lokal. Dengan alokasi anggaran yang tepat untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, kepala daerah dapat memastikan bahwa ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat tetap terjaga. Penguatan sektor ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana juga sangat penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi yang solid di tingkat daerah.

Tidak kalah pentingnya, kepala daerah harus menjadi agen penyebar nilai-nilai kebangsaan yang mempersatukan. Di tengah potensi polarisasi yang kerap terjadi, penguatan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di tingkat lokal menjadi langkah penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kepala daerah harus mampu menggugah semangat nasionalisme masyarakat melalui pendidikan karakter, kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat, serta pembinaan hubungan antar kelompok sosial. Dengan menjaga harmoni sosial dan menanamkan rasa cinta tanah air, kepala daerah membantu memperkokoh ketahanan nasional.

Ketahanan nasional sejatinya tumbuh dari ketahanan lokal. Kepala daerah yang menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab akan secara langsung berkontribusi pada kelangsungan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh. Dalam menghadapi berbagai ancaman global dan domestik, kepala daerah tidak hanya memperkuat wilayahnya, tetapi juga memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Sebagai ujung tombak yang menghubungkan kebijakan nasional dengan realitas lokal, kepala daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

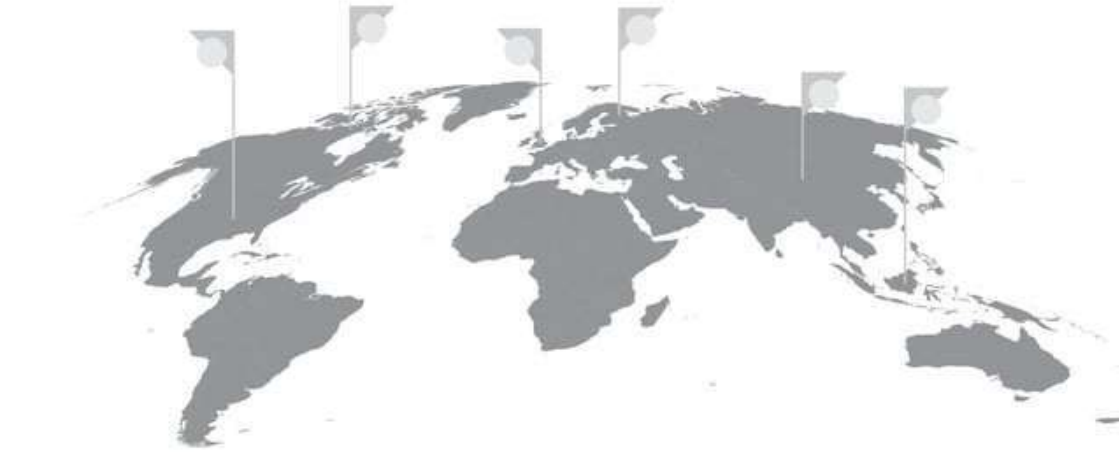

Bab 8 Menuju Indonesia Emas 2045: Refleksi dan Proyeksi

Pendahuluan

Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia, masuk dalam jajaran sepuluh besar negara berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini bukanlah angan-angan tanpa dasar, melainkan merupakan potensi realistis yang dapat dicapai apabila bangsa ini mampu mengelola seluruh sumber daya secara efektif, melakukan transformasi struktural yang mendalam, dan menjawab tantangan global dengan strategi yang adaptif dan inklusif. Momentum peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi simbol penting dalam perjalanan menuju cita-cita tersebut—sebuah fase bersejarah yang menandai kesiapan Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) dan melangkah menjadi negara maju.

Untuk meraih visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada ketahanan sosial, pemerataan pembangunan,

peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Transformasi ini harus menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dari pusat hingga ke daerah, dari elite pengambil kebijakan hingga masyarakat akar rumput. Pembangunan ekonomi tanpa disertai ketahanan nasional yang kuat akan rentan terhadap gejolak, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, ketahanan nasional yang kokoh akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan menjadi faktor penentu. Diperlukan pemimpin yang visioner, berani mengambil keputusan strategis, namun tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika global. Kepemimpinan yang kolaboratif, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan adalah kunci untuk memastikan bahwa seluruh elemen bangsa dapat bergerak secara harmonis menuju tujuan bersama. Ini termasuk kepala daerah yang harus berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah masing-masing, serta sebagai penjaga ketahanan lokal yang menjadi fondasi bagi ketahanan nasional.

Bab ini mengulas bagaimana Indonesia dapat mencapai visinya pada tahun 2045 melalui refleksi atas perjalanan sejarah bangsa, identifikasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi, serta perumusan langkah-langkah proyektif yang konkret. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan jangka panjang nasional dengan kebijakan-kebijakan lokal yang kontekstual. Selain itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan, pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi secara strategis menjadi elemen penting dalam mencapai transformasi menuju Indonesia Emas.

Dengan landasan historis yang kuat, semangat kolektif yang tinggi, dan komitmen terhadap pembaruan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan tahun 2045 sebagai tonggak kemajuan peradaban bangsa—bukan hanya dalam arti ekonomi, tetapi juga dalam kualitas hidup, martabat, dan peran strategis di tingkat global.

Refleksi: Perjalanan Indonesia Menuju 2045

Perjalanan Indonesia menuju 2045 adalah refleksi dari perjalanan panjang sebuah bangsa yang terus tumbuh dan belajar di tengah dinamika global serta tantangan domestik yang kompleks. Dengan visi menjadi negara maju berpendapatan tinggi tepat pada satu abad kemerdekaannya, Indonesia berada pada titik krusial untuk menentukan arah transformasi masa depan. Namun, jalan menuju Indonesia Emas tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*), kondisi ketika negara yang telah mencapai pendapatan menengah kesulitan untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi karena pertumbuhan ekonomi yang melambat, stagnasi inovasi, dan rendahnya produktivitas.

Meski demikian, Indonesia memiliki sejumlah modal dasar yang sangat kuat untuk melakukan lompatan besar menuju negara maju. Potensi ini dapat menjadi titik balik penting apabila dikelola secara tepat, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam luar biasa. Dari hutan hujan tropis yang luas di Kalimantan dan Papua, kekayaan laut yang menyimpan potensi perikanan dan wisata bahari, hingga cadangan energi seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, serta energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga surya, semuanya merupakan kekuatan yang dapat menopang transformasi ekonomi Indonesia. Jika dikelola dengan prinsip keberlanjutan, kekayaan ini bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan, ketahanan energi, dan daya saing industri nasional.

Keanekaragaman hayati juga berpotensi mendorong pertumbuhan sektor bioekonomi, farmasi, dan agroteknologi. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang tidak bijak akan mempercepat degradasi lingkungan dan memperbesar risiko bencana iklim. Oleh karena itu, keberhasilan Indonesia tergantung pada keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi.

Demografi dan Bonus Demografi

Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Yang menjadi sorotan adalah struktur demografi yang didominasi oleh usia produktif. Bonus demografi ini—yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030-an—merupakan peluang emas untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, asalkan disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, bonus demografi tidak akan secara otomatis menghasilkan pertumbuhan. Dibutuhkan investasi besar dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, teknologi, serta sistem kesehatan yang merata dan tangguh. Kualitas tenaga kerja Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya produktivitas, ketimpangan akses pendidikan, dan keterbatasan kemampuan digital. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama dalam dekade-dekade mendatang.

Posisi Geostrategis

Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan strategis yang menghubungkan dua benua dan dua samudera. Letak ini tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan penting dunia, tetapi juga sebagai simpul geopolitik dan geoekonomi kawasan Indo-Pasifik. Di tengah meningkatnya ketegangan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat peran diplomatiknya sebagai negara penyeimbang dan pemersatu.

Selain itu, konektivitas antarwilayah harus terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun digital, sehingga manfaat dari posisi geostrategis tersebut dapat dirasakan oleh seluruh daerah. Peningkatan kerja sama ekonomi regional, investasi asing, dan perdagangan internasional menjadi instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang merata.

Mengatasi Ketimpangan dan Tantangan Struktural

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dua dekade terakhir memang patut diapresiasi. Namun, ketimpangan antarwilayah, kemiskinan struktural, pengangguran tersembunyi, serta dominasi sektor informal masih menjadi tantangan nyata. Sektor industri yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nasional masih lemah, dengan kontribusi manufaktur terhadap PDB yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri, penguatan UMKM, dan diversifikasi ekonomi menjadi langkah penting dalam membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh dan produktif.

Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau dan digital juga harus dimanfaatkan secara optimal. Indonesia harus mampu menjadi bagian dari rantai pasok global yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan inovasi.

Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, perjalanan Indonesia menuju 2045 harus dimaknai sebagai panggilan untuk berbenah secara menyeluruh. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas hidup, ketahanan nasional, dan kedaulatan bangsa dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Refleksi atas kekuatan dan kelemahan saat ini harus menjadi dasar dalam menyusun strategi masa depan yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki semua elemen untuk menjadi negara besar. Namun, keberhasilan akan sangat tergantung pada arah kebijakan, kualitas kepemimpinan, serta peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Proyeksi: Menyongsong Indonesia Emas 2045

Menyongsong satu abad kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Proyeksi Indonesia Emas 2045 mencerminkan visi strategis menuju pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Namun, untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah transformasional yang menyeluruh dalam berbagai sektor, dari pembangunan manusia hingga penguatan daya saing nasional.

Meningkatkan Investasi dalam Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Infrastruktur yang kuat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan konektivitas nasional yang merata dan mendorong aktivitas ekonomi lintas daerah, Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, serta jaringan digital. Konektivitas yang baik akan memperluas akses pasar, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Bonus demografi hanya akan menjadi berkah apabila Indonesia berhasil mencetak generasi produktif dan inovatif. Investasi dalam pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masa depan, pelatihan vokasional yang sesuai dengan perkembangan industri, serta penguatan karakter dan literasi digital sangat penting untuk memastikan SDM Indonesia siap menghadapi tantangan global.

Diversifikasi Ekonomi dan Hilirisasi Industri

Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah harus dikurangi melalui strategi hilirisasi yang menyeluruh. Indonesia perlu membangun industri pengolahan di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Hilirisasi tidak hanya mencakup sektor pertambangan dan pertanian, tetapi juga sektor maritim, energi terbarukan, serta industri kreatif.

Diversifikasi ekonomi juga mencakup pengembangan ekonomi digital dan teknologi tinggi. Indonesia harus bersiap menjadi bagian dari ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan dengan mendorong lahirnya perusahaan rintisan (startup) teknologi, pusat riset, dan inovasi di berbagai daerah. Teknologi seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan *big data* perlu didorong pemanfaatannya di sektor industri, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan.

Meningkatkan Daya Saing Global

Dalam era globalisasi yang penuh persaingan, daya saing menjadi kunci. Untuk itu, Indonesia perlu memperbaiki iklim usaha dengan deregulasi, penyederhanaan birokrasi, dan sistem perpajakan yang mendukung. Reformasi struktural yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Peningkatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D) harus menjadi agenda strategis. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura menunjukkan bahwa investasi dalam R&D mampu mempercepat transformasi industri dan menumbuhkan ekosistem inovatif. Indonesia juga perlu menjalin kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi riset yang menghasilkan solusi nyata.

Memperkuat Sistem Ketahanan Nasional

Transformasi ekonomi menuju 2045 harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional yang adaptif terhadap krisis. Ketahanan ekonomi, pangan, energi, dan kesehatan harus diperkuat untuk memastikan stabilitas dalam menghadapi guncangan eksternal seperti pandemi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim. Sistem logistik yang tangguh, cadangan pangan nasional, serta kebijakan fiskal yang fleksibel menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan nasional.

Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan lokal. Selain itu, kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan untuk membangun kekuatan ekonomi nasional yang solid dan berdaya saing.

Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi baru dunia. Menyongsong Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar mimpi, tetapi tujuan yang dapat dicapai jika didukung oleh pembangunan manusia unggul, inovasi teknologi, tata kelola yang baik, serta solidaritas nasional yang kokoh.

Kepemimpinan Visioner dan Kolaboratif

Dalam upaya besar menjemput Indonesia Emas 2045, kepemimpinan menjadi elemen strategis yang menentukan arah perjalanan bangsa. Lebih dari sekadar memiliki visi yang menginspirasi, kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia adalah yang visioner dan kolaboratif—yakni kepemimpinan yang mampu menatap jauh ke depan sembari membangun jembatan kerja sama dengan seluruh elemen bangsa.

Kepemimpinan visioner mengacu pada sosok pemimpin yang tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek, melainkan berani mengambil keputusan strategis untuk kepentingan jangka panjang. Seorang pemimpin visioner mampu memahami dinamika global dan nasional, membaca tren perubahan

zaman, serta menerjemahkan visi besar bangsa menjadi kebijakan-kebijakan konkret yang memberi dampak luas. Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat penting untuk mengawal transformasi ekonomi melalui penguatan pendidikan, pengembangan teknologi, hilirisasi industri, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia.

Namun, visi sebesar apa pun tidak akan menghasilkan perubahan nyata tanpa disertai kemampuan membangun kolaborasi. Di sinilah pentingnya kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin kolaboratif adalah mereka yang menyadari bahwa tantangan bangsa terlalu kompleks untuk diselesaikan sendiri. Mereka terbuka terhadap dialog, mendorong partisipasi aktif dari berbagai sektor, dan menjadikan kolaborasi sebagai prinsip kerja utama. Pendekatan *whole of government* dan *whole of society* bukan sekadar jargon, tetapi menjadi fondasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik.

Kolaborasi ini mencakup sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, antara kementerian dan lembaga, antara pemerintah dan sektor swasta, hingga kolaborasi lintas generasi serta antara negara dan masyarakat sipil. Kepemimpinan kolaboratif tidak hanya membangun konsensus, tetapi juga mengorkestrasi potensi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas sebagai kekuatan bersama untuk mencapai kemajuan.

Sebagai negara demokratis yang besar dan majemuk, Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang tidak hanya piawai dalam menyampaikan gagasan, tetapi juga rendah hati untuk mendengar. Tidak cukup hanya cerdas secara intelektual, pemimpin Indonesia ke depan harus memiliki integritas, empati, dan keteladanan moral. Mereka harus mampu menyatukan energi bangsa, membangun kepercayaan publik, dan mendorong budaya gotong royong sebagai kekuatan sosial.

Lebih jauh, kepemimpinan visioner dan kolaboratif bukan hanya tugas pejabat publik, melainkan harus menjadi budaya yang tertanam di setiap lapisan masyarakat—dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa, dari lembaga besar hingga komunitas akar rumput. Kepemimpinan ini adalah fondasi yang akan membawa Indonesia tidak sekadar maju, tetapi juga berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Hanya dengan kepemimpinan seperti inilah, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

Penutup: Menuju Indonesia Emas 2045

Proyeksi Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 bukanlah angan-angan belaka, melainkan sebuah cita-cita besar yang realistis dan dapat dicapai. Dengan jumlah penduduk yang besar, bonus demografi yang masih berjalan, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki semua modal dasar untuk tampil sebagai kekuatan global baru. Namun, mewujudkan proyeksi tersebut tidak akan terjadi secara otomatis. Diperlukan kerja keras yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, serta kepemimpinan yang memiliki visi jauh ke depan.

Untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), Indonesia harus memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Kekayaan alam yang luar biasa harus diolah melalui proses hilirisasi agar memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Sumber daya manusia yang unggul harus dibentuk melalui pendidikan yang berkualitas, pelatihan berbasis kompetensi, dan penguatan karakter kebangsaan. Di sisi lain, pembangunan industri, penguasaan teknologi, serta transformasi digital harus menjadi prioritas agar Indonesia mampu bersaing di tengah revolusi industri 4.0 dan gelombang disrupsi global.

Lebih jauh, pembangunan ekonomi semata tidak cukup jika tidak disertai dengan fondasi sosial-politik yang kuat. Keadilan sosial, stabilitas politik, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah elemen-elemen penting untuk menjamin keberlanjutan kemajuan bangsa. Indonesia harus membangun institusi-institusi yang tangguh dan akuntabel, yang mampu menjaga keberlangsungan pembangunan lintas pemerintahan dan menjawab tantangan zaman secara adaptif.

Dalam proses transformasi besar ini, peran kepemimpinan menjadi kunci penentu. Kepemimpinan visioner akan mengarahkan bangsa pada pilihan-pilihan strategis yang berorientasi masa depan, sementara kepemimpinan kolaboratif akan memastikan bahwa seluruh elemen bangsa terlibat aktif dalam perjalanan bersama menuju cita-cita nasional. Pemimpin-pemimpin di berbagai level harus menjadi penggerak perubahan, bukan hanya pengelola *status quo*.

Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang capaian ekonomi yang membanggakan, tetapi juga tentang mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, makmur, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Sebuah bangsa yang mampu berdiri sejajar dengan negara maju lainnya, tanpa kehilangan jati dirinya. Untuk itu, dibutuhkan semangat gotong royong, komitmen kolektif, dan keberanian untuk berubah dari seluruh komponen masyarakat.

Kini saatnya bagi Indonesia untuk bergerak lebih cepat, lebih cermat, dan lebih terintegrasi. Tidak ada waktu untuk berpuas diri. Dengan langkah yang terukur dan berkesinambungan, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, melainkan keniscayaan sejarah yang sedang kita bangun bersama.

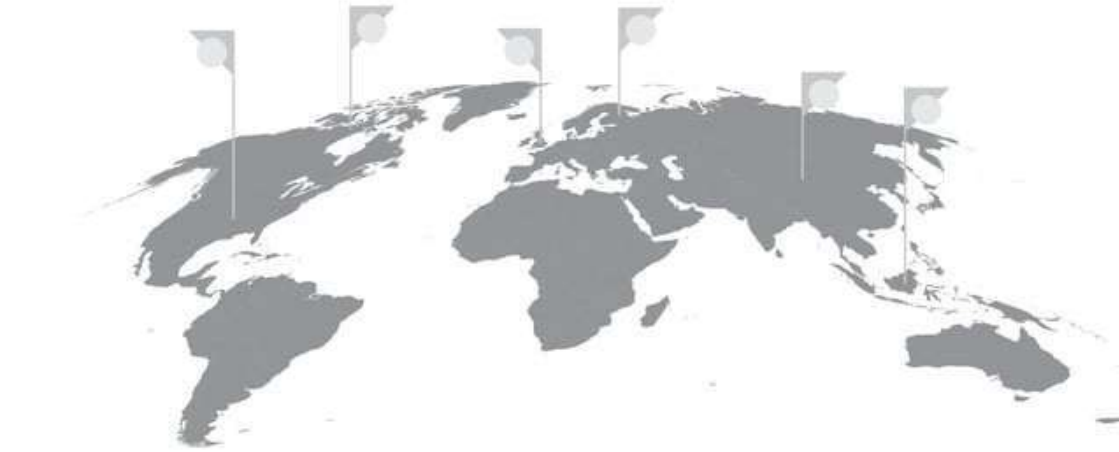

Penutup

"*Berpikirlah Besar, Karena Kita adalah Bangsa Besar*"

Pendahuluan

Pernyataan "*Berpikirlah besar, karena kita adalah bangsa besar*" menggema sebagai pengingat akan visi besar yang telah ditanamkan oleh Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno. Kalimat ini bukan sekadar ungkapan retoris, melainkan refleksi dari semangat kepemimpinan visioner yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan jati diri bangsa. Soekarno, dengan semangat juangnya yang membara, menanamkan keyakinan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu gerbang untuk mewujudkan cita-cita luhur sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pemikiran besar yang dimaksud oleh Soekarno adalah panggilan untuk seluruh elemen bangsa Indonesia agar senantiasa berani bermimpi besar, berani menetapkan visi jangka panjang, dan tidak terjebak pada pola pikir sempit yang hanya berorientasi pada keuntungan sesaat.

Indonesia sebagai bangsa besar memiliki banyak alasan untuk berpikir besar. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keragaman budaya yang luar biasa, serta posisi geostrategis yang vital, Indonesia memiliki segala modal untuk memainkan peran penting dalam kancah global. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika bangsa ini mampu menyelaraskan mimpi besar dengan kerja keras yang terstruktur, kepemimpinan yang visioner, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, seruan "berpikirlah besar" juga mengandung pesan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan dunia, tetapi tampil sebagai pemain utama yang berkontribusi dalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan global.

Di era yang penuh tantangan dan kompleksitas seperti sekarang—dari perubahan iklim, ketimpangan ekonomi global, hingga transformasi digital dan geopolitik dunia yang dinamis—Indonesia membutuhkan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dan terobosan-terobosan strategis. Pemikiran besar adalah kunci untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), untuk mendorong inovasi di segala bidang, serta untuk menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inilah semangat yang seharusnya merasuki setiap kebijakan pembangunan nasional, pendidikan karakter, dan agenda diplomasi luar negeri Indonesia.

Lebih jauh lagi, berpikir besar juga berarti membangun generasi muda Indonesia yang memiliki kapasitas global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur kebangsaan. Ini adalah tentang mencetak pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, komitmen moral, dan integritas yang tinggi. Pendidikan, riset dan inovasi, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta penguatan institusi menjadi pilar-pilar utama dalam mewujudkan visi besar ini.

Dengan menghidupkan kembali semangat "berpikir besar" ala Soekarno, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengukir sejarah baru sebagai bangsa yang tidak hanya besar secara jumlah dan sumber daya, tetapi juga besar dalam kontribusi dan martabat di panggung dunia. Maka, berpikir besar bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi bangsa yang ingin menjawab tantangan zaman dan memastikan masa depan yang gemilang bagi generasi yang akan datang.

Visi Soekarno: Pembentukan Bangsa yang Merdeka, Kuat, dan Dihormati

Ir. Soekarno, sebagai arsitek kemerdekaan dan pemimpin visioner Indonesia, mewariskan bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga sebuah visi besar tentang pembentukan bangsa yang merdeka, kuat, dan dihormati di mata dunia. Pemikiran dan gagasan Soekarno jauh melampaui zamannya, menjangkau masa depan Indonesia yang ia impikan sebagai negara yang mandiri, berdaulat, dan mampu menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi kekuatan asing. Dalam berbagai pidato dan tulisan, Soekarno terus-menerus menyerukan agar bangsa Indonesia tidak berpikir kecil, tidak puas dengan pencapaian sesaat, tetapi senantiasa menatap jauh ke depan dan menggagas hal-hal besar untuk kepentingan nasional.

Visi besar Soekarno dibangun di atas keyakinan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dalam berpikir, berkarya, dan menentukan arah bangsa sendiri. Ia melihat kemerdekaan sebagai langkah awal untuk membentuk *nation building*—membangun Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, bersatu, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Dalam konteks ini, Soekarno menekankan pentingnya kemandirian dalam segala aspek: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Bagi Soekarno, ketergantungan pada kekuatan asing merupakan bentuk penjajahan baru yang harus dilawan dengan kesadaran kolektif dan pembangunan jati diri bangsa.

Salah satu warisan terbesar Soekarno adalah Pancasila, yang ia rumuskan sebagai dasar negara dan panduan moral bangsa Indonesia. Melalui Pancasila, Soekarno ingin membangun bangsa yang tidak hanya kuat secara fisik dan ekonomi, tetapi juga secara spiritual dan ideologis. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah komponen penting dari cita-cita besar Soekarno. Ia percaya bahwa hanya dengan fondasi moral yang kokoh, Indonesia dapat menjadi bangsa yang dihormati di kancah internasional.

Dalam kerangka berpikir besar itu pula, Soekarno mendorong pembangunan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia meyakini bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada kemandirian rakyatnya—petani, buruh, pelajar, dan seluruh lapisan masyarakat yang diberdayakan. Soekarno ingin membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, yang turut serta aktif dalam pembangunan bangsa, dan yang bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Dengan kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, serta letak geografis yang strategis, Soekarno yakin bahwa Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi bangsa besar di dunia. Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan apabila bangsa Indonesia berani bermimpi besar dan bekerja keras mewujudkannya. Visi besar Soekarno menjadi pengingat abadi bahwa bangsa ini dilahirkan bukan untuk menjadi bangsa pengikut, tetapi bangsa pemimpin—bangsa yang merdeka dalam segala aspek dan dihormati karena keteguhan prinsip serta kontribusinya bagi peradaban dunia.

Semangat Kepemimpinan Kontemporer Indonesia

Memasuki abad ke-21, dunia berada dalam arus perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Fenomena global seperti perubahan iklim, dinamika geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi digital, serta ketegangan antarnegara semakin menuntut adanya kepemimpinan nasional yang adaptif, tangguh, dan berpandangan jauh ke depan. Di tengah guncangan zaman

ini, semangat kepemimpinan yang berakar pada pemikiran dan visi besar Soekarno tetap menjadi sumber inspirasi dan fondasi yang kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Warisan semangat berpikir besar dan berdaulat dari Soekarno relevan untuk mengarahkan Indonesia agar tetap berdiri tegak dan tidak menjadi korban dari arus globalisasi yang tidak terkendali.

Pemimpin Indonesia masa kini dituntut untuk memiliki visi global yang tidak hanya responsif terhadap perubahan, tetapi juga proaktif dalam menentukan arah masa depan bangsa. Mereka harus berani mengambil keputusan strategis yang mencerminkan kepentingan nasional jangka panjang, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek. Di tengah persaingan antarnegara yang semakin ketat, Indonesia harus mampu memanfaatkan keunggulan demografis, potensi ekonomi kreatif, kekayaan budaya, serta letak geografisnya untuk memperkuat posisi tawar di dunia internasional. Kepemimpinan visioner seperti yang diteladankan oleh Soekarno menjadi penting sebagai pedoman dalam membangun Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan diperhitungkan secara global.

Namun, kepemimpinan kontemporer tidak cukup hanya mengandalkan visi besar semata. Ia juga harus diwujudkan dalam praktik yang kolaboratif dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda harus diperkuat dalam semangat gotong royong untuk menjawab berbagai tantangan bangsa. Pembangunan tidak bisa berjalan efektif jika hanya bertumpu pada kekuasaan negara tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan yang membumi, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memberdayakan potensi lokal menjadi sangat penting dalam mendorong transformasi Indonesia ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Lebih jauh, semangat kepemimpinan kontemporer juga harus menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Pendidikan berkualitas, keterampilan digital, inovasi, serta karakter kebangsaan perlu dikembangkan

secara terpadu agar Indonesia tidak hanya unggul dalam hal sumber daya alam, tetapi juga dalam kapasitas sumber daya manusia. Di era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan, kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai kebangsaan akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, semangat kepemimpinan kontemporer Indonesia adalah semangat untuk berpikir besar seperti Soekarno, namun juga bersifat adaptif, kolaboratif, dan inklusif dalam implementasinya. Hanya dengan kepemimpinan yang berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan sekaligus mampu membaca arah zaman, Indonesia dapat melangkah maju sebagai bangsa besar yang berdaulat, adil, makmur, dan dihormati di panggung dunia.

Tantangan Global dan Peran Indonesia di Tengah Dinamika Dunia

Perkembangan global yang pesat dan terus berubah menuntut Indonesia untuk beradaptasi dengan cepat dan berpikir lebih besar. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami pergeseran besar dalam tatanan geopolitik yang secara langsung memengaruhi posisi Indonesia di panggung internasional. Tatanan dunia yang sebelumnya didominasi oleh satu kekuatan besar, Amerika Serikat, kini bertransformasi menjadi tatanan multipolar, dengan munculnya kekuatan besar baru seperti Tiongkok, India, serta blok-blok ekonomi lainnya yang semakin memengaruhi dinamika politik dan ekonomi global. Selain itu, kawasan Indo-Pasifik, yang menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, juga semakin kompetitif, dengan berbagai negara besar yang berusaha memperluas pengaruh mereka di kawasan ini.

Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan tersebut, harus menyadari tantangan ini dan mengambil peran yang lebih besar dalam tatanan dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi pada penyelesaian

masalah-masalah global. Namun, potensi ini hanya akan terwujud jika Indonesia mampu merumuskan strategi diplomasi yang lebih proaktif dan berbasis pada kepentingan nasional yang lebih luas. Diplomasi Indonesia harus semakin terbuka untuk menjalin hubungan dengan berbagai negara besar, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun isu-isu global lainnya, seperti perubahan iklim, keamanan global, serta ketidakstabilan ekonomi.

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Indonesia harus memperkuat kehadirannya di berbagai forum internasional. Sebagai negara anggota G20, ASEAN, serta organisasi internasional lainnya, Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas regional dan global. Kontribusi Indonesia dalam menyelesaikan berbagai isu global, seperti perubahan iklim, perdamaian, serta pengurangan kemiskinan, akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya melihat dirinya sebagai aktor domestik, tetapi juga sebagai kekuatan yang memiliki dampak positif di tingkat internasional.

Selain itu, Indonesia harus memanfaatkan posisi geografisnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga keutuhan wilayahnya dan mengelola sumber daya alam yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Tantangan ini juga membawa peluang besar untuk menjadi kekuatan maritim yang disegani di kawasan dan dunia internasional. Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam mengelola dan menjaga perairan internasional, serta memanfaatkan sumber daya alam laut yang dimilikinya untuk kepentingan ekonomi yang berkelanjutan.

Berpikir besar dalam konteks ini berarti melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara dengan berbagai tantangan internal, tetapi juga sebagai negara yang mampu mengatur dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana, menjaga kedaulatan wilayah, dan turut serta dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan global. Untuk itu, Indonesia harus terus mengembangkan kekuatan maritim, meningkatkan kapasitas diplomasi internasional,

serta mendorong pembangunan yang berbasis pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Dengan cara ini, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global dan memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan stabil.

Mengoptimalkan Potensi Indonesia: Menuju Indonesia Emas 2045

Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia harus memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya untuk menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Cita-cita untuk menjadi negara yang maju, berdaya saing tinggi, dan dihormati di tingkat global membutuhkan perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pencapaian ini dapat terwujud jika Indonesia mampu mengoptimalkan potensi terbesar yang dimilikinya, yakni sumber daya manusia (SDM), serta mengembangkan sektor-sektor vital yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pendidikan yang berkualitas dan pengembangan keterampilan merupakan langkah pertama yang harus diambil untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia global yang semakin kompleks. Penguatan sistem pendidikan formal, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan akses pendidikan yang merata di seluruh Indonesia adalah langkah-langkah penting yang harus segera dilaksanakan. Selain itu, peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis melalui pelatihan vokasi dan program pengembangan kewirausahaan harus digalakkan untuk memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan industri yang cepat, seperti revolusi industri 4.0. Dengan memiliki SDM yang unggul dan kompetitif, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara dengan ekonomi besar, tetapi juga dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang merata juga merupakan salah satu prioritas utama menuju Indonesia Emas 2045. Infrastruktur yang baik dan terintegrasi akan mempercepat mobilitas barang dan orang, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Jawa, untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Pembangunan infrastruktur yang merata akan mendorong pemerataan ekonomi, membuka peluang pekerjaan baru, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Dalam menghadapi tantangan global, Indonesia juga harus memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi industri dan pemanfaatan teknologi digital. Potensi sektor industri dan ekonomi digital sangat besar, dan Indonesia harus memanfaatkan kedua sektor ini untuk menciptakan daya saing yang lebih kuat di tingkat global. Hilirisasi industri, terutama di sektor sumber daya alam, akan meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas. Sementara itu, pemanfaatan teknologi digital akan membuka peluang baru dalam pengembangan ekonomi kreatif, *e-commerce*, dan sektor teknologi informasi yang semakin berkembang pesat.

Selain faktor-faktor tersebut, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta generasi muda sangat diperlukan. Kepemimpinan yang visioner, inklusif, dan kolaboratif akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan besar yang ada. Masyarakat yang bersatu dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama akan mempercepat tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045. Indonesia harus mampu mengelola keberagaman dan potensi yang dimilikinya untuk menjadi negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga dapat berperan aktif dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera.

Kesimpulan

Kalimat "*Berpikirlah besar, karena kita adalah bangsa besar*" bukan sekadar seruan kosong. Ini adalah panggilan untuk menumbuhkan keyakinan diri dan semangat kebangsaan yang mendalam. Indonesia, dengan segala potensi yang dimilikinya, memiliki peluang untuk menjadi negara besar di kancah global. Sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, serta keragaman budaya yang kaya adalah aset besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Namun, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara besar yang dihormati dan berdaya saing di dunia, negara ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya mampu berpikir besar, tetapi juga berani untuk bertindak sesuai dengan visi dan cita-cita jangka panjang yang mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Visi besar yang digagas oleh Soekarno, sebagai fondasi negara ini, seharusnya tetap relevan dan menjadi pedoman dalam memajukan Indonesia. Soekarno mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada pencapaian jangka pendek, tetapi untuk melihat jauh ke depan, membangun bangsa yang kuat, berdaulat, dan dihormati di dunia internasional. Semangat yang sama harus dihidupkan kembali oleh para pemimpin Indonesia masa kini. Pemimpin yang mampu melihat dan menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan sosial, serta memanfaatkan teknologi untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian ekonomi, berpikir besar adalah kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang. Indonesia harus berani mengambil langkah berani dalam menghadapi persaingan global, memperkuat hubungan internasional, serta berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan global, seperti perubahan

iklim dan ketidakstabilan ekonomi dunia. Dengan kepemimpinan yang visioner dan proaktif, Indonesia dapat mengambil peran yang lebih besar di kancah global.

Berpikirlah besar, karena kita adalah bangsa besar. Indonesia Emas 2045 bukanlah sebuah mimpi yang tidak mungkin tercapai, melainkan sebuah tujuan yang harus diusahakan bersama dengan semangat kolektif. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan pembangunan yang inklusif, serta pemanfaatan teknologi dan hilirisasi industri harus menjadi prioritas. Indonesia harus memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks sosial dan budaya. Negara yang kokoh dan berdaya saing global akan muncul dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang bekerja bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Dengan semangat kebangsaan yang tumbuh dari visi besar Soekarno, dan dengan kepemimpinan yang berani dan terarah, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari *middle income trap* dan mencapai kemajuan yang signifikan. Indonesia Emas 2045 adalah impian yang layak dicapai, asalkan kita berani berpikir besar, bekerja keras, dan bersatu untuk mewujudkannya. Berpikirlah besar, karena kita adalah bangsa besar.

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

Daftar Pustaka

ASEAN Secretariat. 2023. *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP): Cooperation for Stability and Prosperity*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2025. Statistik Indonesia 2025: Potret Pembangunan Nasional. Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. 2025. *Laporan Perekonomian Indonesia 2025: Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: Bank Indonesia.

Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2024. *Indonesia's Role in the Indo-Pacific: Balancing Great Power Competition*. Jakarta: CSIS Indonesia.

Institute for Peace and Democracy. 2023. *Building Social Cohesion in Multicultural Societies: Lessons from Indonesia*. Denpasar: IPD.

International Monetary Fund (IMF). 2024. *Global Economic Outlook: Challenges and Opportunities for Emerging Economies*. Washington, D.C.: IMF.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2025. *Laporan Pelaksanaan Dana Desa dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2025. *Potensi dan Tantangan Maritim Indonesia dalam Perspektif Geopolitik*. Jakarta: KKP.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2025. Strategi Nasional Keamanan Siber Indonesia 2025–2029. Jakarta: Kominfo.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024. Jakarta: KLHK.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2024. *Panduan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila*. Jakarta: Kemendikbud.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2025. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2025*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). 2024. *Kajian Strategis Ketahanan Nasional Berbasis Asta Gatra*. Jakarta: Lemhannas RI.

National Research Council. 2023. *Climate Change and National Security: Strategies for Resilience*. Washington, D.C.: National Academies Press.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Soekarno. 1965. *Pidato-Pidato Presiden Soekarno tentang Geopolitik dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Transparency International. 2024. *Global Corruption Report 2024: Challenges and Reforms*. Berlin: Transparency International..

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.

United Nations Development Programme (UNDP). 2024. *Human Development Report 2024: Indonesia's Path to Sustainable Development*. New York: UNDP.

World Bank. 2024. *Indonesia Economic Prospects: Navigating Global Uncertainty*. Washington, D.C.: World Bank Group.

Tentang Penulis

Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

TB. Ace Hasan Syadzily, lahir pada 19 September 1976, adalah seorang akademisi dan politikus Indonesia yang kini menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024. Sebelum memimpin Lemhannas, Ace merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golongan Karya (Golkar) untuk daerah pemilihan Jawa Barat II sejak 2019, serta pernah menjabat pada periode 2014–2019 sebagai pengganti antarwaktu (PAW) menggantikan Andika Hazrumy yang maju dalam Pilgub Banten 2017.

Ace lahir dari keluarga religius di Pandeglang, Banten, sebagai putra dari KH. Tubagus Achmad Rafe'i Ali, pengasuh Pondok Pesantren An-Nizhomiyyah. Ia merupakan keturunan kesembilan Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin terkemuka Kesultanan Banten. Pendidikan formalnya dimulai di SD Negeri 1 Labuan, berlanjut ke SMP Islam Cipasung dan Madrasah Aliyah Sukamanah di Tasikmalaya. Ia kemudian menempuh studi di Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran di bidang antropologi dan ilmu pemerintahan.

Di masa kuliah, Ace aktif berorganisasi, baik di senat mahasiswa maupun HMI. Ia turut terlibat dalam gerakan mahasiswa reformasi 1998, bahkan menjabat Ketua BEM IAIN Syarif Hidayatullah (1998–2000). Setelah

lulus, ia berkarier sebagai dosen dan mendirikan *Indonesian Institute for Civil Society* (2000–2008), serta aktif di Gerakan Pemuda Ansor dan Majelis Dakwah Islamiah.

Karier politik Ace dimulai pada 2004 dengan bergabung di Partai Golkar. Pada 2009, ia menjadi staf ahli di DPR, lalu diangkat sebagai anggota DPR pada 2013 melalui PAW. Di pemilu 2019, ia terpilih secara langsung sebagai anggota DPR. Ace kemudian dipercaya menjadi pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Jawa Barat pada 2021 dan terpilih sebagai ketua definitif pada 2022. Pada 2024, Munas Golkar mengangkatnya sebagai Wakil Ketua Umum, yang menjadi landasan karier politiknya hingga ditunjuk sebagai Gubernur Lemhannas RI.

Dr. Dadang Solihin, S.E., M.A.

Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof). Wredatama ini menempuh pendidikan S-1 dan S-2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar S.E ia peroleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari *University of Colorado at Denver,* USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung (2011).

Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009), dan Presiden Jokowi (2019).

Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015–2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat Akademiknya adalah *Associate Professor*/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018–2022. Di dunia kampus, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Institut STIAMI.

Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021. Di dunia kampus, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Institut STIAMI.

Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan *Bike to Work* ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan *Policy Paper*-nya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

Dr. Antoni Ludfi Arifin, S.E., M.M.

Ia merupakan ayah empat orang putra: Atha Adiwidya Ludfi, Artawidya Ihsan Ludfi, Widyatama Cendekia Ludfi, dan Setya Widyarachma Ludfi buah pernikahannya dengan Sari Rahma Yulianthi.

Ia lahir di Kotabumi Lampung Utara pada 11 Juni 1977. Ketertarikannya dalam dunia menulis muncul sejak beberapa artikelnya dimuat di situs *online* seperti www.andriewongso.com dan majalah. Ia juga telah menulis banyak buku, Bacaan Wajib Semua *Sales* (VisiMedia, 2011), Demi Waktu: *So, Use Your Time Effectively* (Gramedia, 2012), *Be A Writer* (Gramedia, 2012), *Be A Reader* (Gramedia, 2013), *Up: Super Vision, Super Action!* (Gramedia, 2014), *Building Personal Brand Equity* (Gramedia, 2015), *Mantra: The Power of Words* (Gramedia, 2017), bersama rekan-rekan di SDM Cendekia Ia menulis buku *HR As A Credible Business Partner* (Gramedia, 2018), buku *The Secret to Millennial Engagement* (Gramedia, 2019); SDM Naik Kelas! (Gramedia, 2020), Kepemimpinan Cendekia (Gramedia, 2020), dan Kepemimpinan Cendekia: SYIAR, DOA, & IKHTIAR Menuju Indonesia Emas (Gramedia, 2021), Penjaminan Pembiayaan Syariah: Penguatan UMKM Melalui penjaminan Syariah (IPB Press, 2022), dan masih banyak lainnya.

Saat ini penulis bekerja di salah satu perusahaan *education, advertising, and* TI sebagai *Sales Director* di Jadihebat.id (PT Sumber Daya Multi Cendekia) dan sebelumnya pernah menjabat posisi Kadiv Unit Usaha Syariah (2021–2023), Kadiv HR & GA (2018–2021) di PT Jamkrida Jakarta (BUMD Pemprov DKI). Saat ini, penulis adalah *associate professor* di Institut STIAMI, Dosen Luar Biasa di S-2 MM Paramadina *University*, menjadi tutor tatap muka di Universitas Terbuka (UPBJJ Jakarta), dan Tim Dosen S-3 UNJ.

Pendidikan formal tertinggi diselesaikan pada Universitas Negeri Jakarta, Program Doktor MSDM, sebelumnya ia bersekolah di Pascasarjana Sahid Jakarta, dengan mengambil konsentrasi Manajemen Pemasaran pada tahun 2008. Ia sempat mengenyam pendidikan Diploma III pada Fakultas Pertanian Unila melalui program Penelusuran Minat dan Kemampuan Akademik (PMKA), dan diwisuda pada tahun 1998. Saat lulus Diploma ia langsung diberikan kesempatan oleh fakultas untuk melanjutkan kuliah pada jenjang S-1 di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada universitas yang sama.

Namun, karena tuntutan kerja untuk membiayai hidup, pada 2001 di saat sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi, ia memutuskan meninggalkan bangku kuliah S-1 untuk bekerja di perusahaan farmasi PT Kimia Farma Tbk, sebagai tenaga pemasar dan ditempatkan di Area Palembang.

Keinginannya sangat kuat untuk sekolah, pada akhirnya, pendidikan sarjananya dapat diselesaikan di Universitas Sahid Jakarta, dengan menempuh Studi Pembangunan, dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Ia juga aktif dalam kepengurusan Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) sebagai Ketua Bidang Kerja Sama dengan Korporasi(2021–2025), Forum Doktor Bisnis Indonesia (FORDOBI) sebagai Sekretaris Jenderal (2022–2027), dan aktif di Ikatan Doktor Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKADA UNJ). Antoni Ludfi Arifin adalah pendiri SDM Cendekia. Ia sendiri adalah penggagas Strategi Membangun SDM Unggul berbasis SDM Cendekia melalui penulisan buku, artikel ilmiah, seminar, dan pelatihan.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

TANHANA DHARMMA MANGRVA

Geopolitik Global

Asta Cita dan Tantangan Mewujudkan Ketahanan Nasional

PT Penerbit IPB Press
Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp. 0251-8355 158 E-mail: ipbpress@apps.ipb.ac.id
Penerbit IPB Press ipbpress.official ipbpress.com

Politik
ISBN 978-1-78280-808-4